Teguh Sarwono
Asy'ari
Menik Indah N.
Sajali Hadi S.

BUKU SEKOLAH bse ELEKTRONIK

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SD/MI Kelas 6



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Teguh S. Menik I.N. Asy'ari Sajali H.S. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD / MI Kelas 6

Teguh Sarwono
Menik Indah N.
Asy'ari
Sajali Hadi S.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SD/MI Kelas 6



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SD/MI Kelas 6

372.8
TEG TEGUH Sarwono
p Pendidikan Kewarganegaraan 6 : untuk SD/ MI Kelas 6
/ penyusun, Teguh Sarwono… [et al] ; illustrasi, Sekar. -- Jakarta :
Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vii, 186 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm.183-184
Indeks
ISBN 978-979-068-625-0 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-068-646-5

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar I. Judul
II. Sekar

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Diperbanyak oleh .....

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet *(website)* Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh *(down load)*, digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta,   Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini.

Kami ucapkan selamat atas keberhasilan kalian duduk di bangku kelas 6. Tetap rajin-rajinlah dalam belajar serta jangan lupa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kelak kalian berhasil lulus dengan memuaskan.

Buku materi pelajaran agaknya memang tampil beda. Semua disusun dengan mempertimbangkan kemampuan berpikir serta potensi kalian. Tujuannya tidak lain agar kalian mengenal dengan baik konsep-konsep penting dari buku ini. Dengan demikian akhirnya dapat menjadi warga negara yang baik dan siap menghadapi tantangan zaman.

Perlu diketahui buku ini juga dilengkapi dengan tugas-tugas dan soal uji kompetensi yang memadai baik dari jumlah maupun kualitasnya guna mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi. Dengan demikian kalian diharapkan akan memiliki kemampuan yang lebih sebagai dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, dan peka dalam memandang serta memecahkan masalah.

Akhir kata semoga buku ini bermanfaat dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tak ada gading yang tak retak. Saran dan kritik akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Penulis

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi alat belajar yang efektif, bila digunakan secara tepat. Untuk itu diperlukan petunjuk penggunaan buku. Apa saja yang ada dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 ini?

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kamu sudah hafal di luar kepala dengan teks tersebut, bukan?

Tahukah kamu tentang proses perjalanan perumusan dasar negara tersebut?

→ Mengantarkan peserta didik untuk mengenal dan memahami materi yang akan dipaparkan.

Tujuan Pembelajaraan

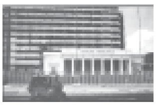
Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila dan
2. mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.

→ Menggambarkan tujuan yang hendak dicapai setelah mempelajari materi.

A. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Mendirikan suatu negara butuh landasan-landasan dasar. Landasan-landasan dasar tersebut merupakan pondasi. Landasan dasar atau pondasi tersebut dikenal sebagai dasar negara.



→ Materi disajikan secara sistem dengan bahasa yang mudah dipahami.

→ Ilustrasi untuk membantu memahami materi

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!

Kamu telah mengikuti uraian tentang nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai juang apa saja yang patut kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, isilah kolom berikut ini!

No	Jenis Pembiasaan Sikap	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Bermusyawarah untuk kepentingan bersama	Ya	-	Di sekolah Di Rumah

→ Berisi tugas atau kegiatan yang dikerjakan untuk lebih memahami materi

Uji Kompetensi Semester Gasal

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Jumlah anggota BPUPKI seluruhnya kurang lebih ....
   a. 60 orang
   b. 64 orang
   c. 67 orang
   d. 70 orang

→ Uji Kompetensi Semester Gasal

Glosarium

Amandemen : Usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat

Asas : Sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir

→ Berisi istilah penting dengan penjelasan arti dan ditulis alfabetis

Demikian petunjuk penggunaan buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6. Semoga ada manfaatnya.

Daftar Isi

Bab I

Nilai Juang Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara



Sumber: ClipArt Corel

Gambar 1.1 Garuda Pancasila

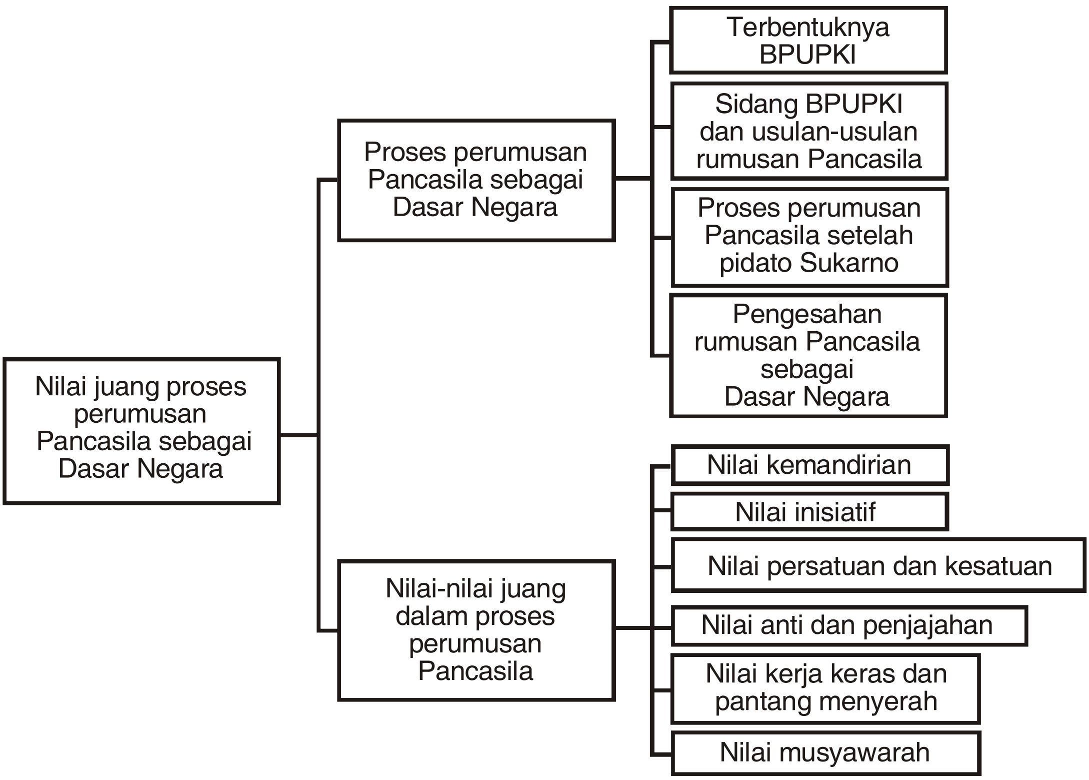
Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kamu sudah hafal di luar kepala dengan teks tersebut, bukan?

Tahukah kamu tentang proses perjalanan perumusan dasar negara tersebut?

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila dan
2. mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kata Kunci

- Pancasila
- BPUPKI
- PPKI
- Panitia kecil
- Piagam Jakarta
- Nilai juang

A. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Mendirikan suatu negara butuh landasan-landasan dasar. Landasan-landasan dasar tersebut merupakan pondasi. Landasan dasar atau pondasi tersebut dikenal sebagai dasar negara.

Dasar-dasar yang menjadi landasan berdirinya suatu negara biasanya digali dari jiwa bangsa atau negara yang bersangkutan. Oleh karena itu dasar-dasar negara antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Sebagai contoh, dasar negara Republik Rakyat Cina (RRC) adalah *San Mincu I*, sementara itu dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar-dasar negara tersebut dirumuskan dari jiwa (rakyat) bangsa atau negara masing-masing.

Bagaimana proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia tercinta ini?

Mari kita uraikan bersama-sama.

1. Terbentuknya BPUPKI



Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 1.2 Gedung Pancasila

Tahukah kamu, mengapa gedung di atas dinamakan gedung Pancasila? Perlu diketahui bahwa di gedung itulah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dirumuskan. Siapa yang merumuskan Pancasila?

Waktu itu wilayah Indonesia berada di bawah pendudukan tentara *Dai Nippon* atau Jepang. Tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan ke seluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dalam waktu dekat.

Bersamaan dengan itu, keberadaan tentara Jepang terus mendesak oleh tentara Sekutu. Tentara Sekutu sudah menyerang beberapa wilayah pendudukan Jepang seperti Papua Nugini, kepulauan Marshal, Salamon, Ambon, Menado, Makasar, juga Surabaya. Karena itu, maka tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikikan Kumakici Herada (Panglima tertinggi bala tentara *Dai Nippon* di Indonesia) mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau lebih dikenal dengan sebutan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Bertindak sebagai ketua K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dibantu dua ketua muda. Masing-masing ketua muda tersebut adalah Ketua Muda I (orang Jepang) dan Ketua Muda II R. Pandji Suroso.

2. Sidang BPUPKI dan Usulan-usulan Rumusan Pancasila



Sumber: www.puas.or.id

Gambar 1.3 Sidang BPUPKI

Tahukah kamu tujuan dibentuknya BPUPKI? Tujuannya adalah untuk menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei - 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei sidang dibuka dengan sambutan dari wakil tentara *Dai Nippon*. Dalam sambutannya wakil Dai Nippon tersebut memberi nasihat agar BPUPKI mengadakan penyelidikan secara cermat terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia Merdeka.

Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia merdeka oleh anggota-anggota BPUPKI. Para anggota BPUPKI melalui pidato-pidatonya tampil. Mereka mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia.

Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui. Mengapa? Tidak lain karena baru 3 pidato yang ditemukan teksnya secara lengkap. Masing-masing dari teks pidato tersebut adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno.

Sebaiknya Kamu Tahu

Sukarno Sebagai Penemu Pertama Istilah Pancasila

Sidang BPUPKI sudah berjalan dua hari. Masing-masing anggota sidang sudah tampil dengan pidato-pidatonya mengajukan usulan tentang dasar-dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Namun demikian seluruh anggota sidang merasa belum menemukan hal-hal yang pantas disepakati untuk dijadikan sebagai dasar negara.



Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 1.4 Sukarno sebagai pengusul istilah Pancasila

Setelah tampilnya Muh. Yamin, Supomo, dan Sukarno barulah ketua BPUPKI menghentikan sidang. Penghentian sidang tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Kecil yang bertugas untuk merumuskan dasar negara.

Antara Supomo, Muh. Yamin, dan Sukarno, sama-sama mengusulkan lima dasar negara. Namun demikian, yang diusulkan oleh masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Dasar negara yang diusulkan oleh Supomo bisa digaris bawahi sebagai berikut:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Sementara itu dasar negara yang diusulkan Muh. Yamin adalah sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Khusus tentang Sukarno, ia mengajukan lima dasar negara sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
2. Peri Kemanusiaan (Internasionalisme)
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

Lima dasar tersebut Sukarno kemudian menyebutnya sebagai **Pancasila**. *Panca* berarti lima, sedangkan *sila* berarti asas atau dasar.

3. Proses Perumusan Pancasila Setelah Pidato Sukarno

Setelah Sukarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga ketua BPUPKI menunjuk dan membentuk Panitia Kecil. Tugas Panitia Kecil itu adalah merumuskan kembali pidato Sukarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara itu.

Bagaimana perjalanan lebih lanjut perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Kecil? Setidaknya terdapat peristiwa-peristiwa penting sebagaimana berikut.

a. Perbedaan Pandangan Antara Golongan Islam dan Paham Kebangsaan

Dalam keanggotaan Panitia Kecil, ada dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara. Sementara itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara.

Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang Panitia Kecil bersama anggota BPUPKI yang seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet. Karena sidang macet, Panitia Kecil ini kemudian menunjuk sembilan orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan.

Anggota Panitia Sembilan itu adalah 1) Ki Bagus Hadikusuma, 2) Kyai Haji Wakhid Hasyim, 3) Muhammad Yamin, 4) Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, 5) Abdul Kahar Muzakir, 6) Abikusno Cokrosuyoso, 7) Moh. Hatta, 8) H. Agus Salim, dan 9) Sukarno sebagai ketua.

b. Lahirnya Piagam Jakarta

Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Sukarno melaporkan bahwa sidang Panitia Sembilan (tanggal 22 Juni 1945) telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia Sembilan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta (*Djakarta Charter*).

Bagaimana rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu? Bunyinya adalah sebagai berikut :

1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tentang Piagam Jakarta ini Sukarno sebagai ketua Panitia Sembilan mengatakan, bahwa "Ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya" merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan kebangsaan.

Sebenarnya banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta ini. Sebagai contoh, keberatan yang disampaikan oleh Latuharhary yang didukung oleh Wongsonegoro dan Husein Joyodiningrat dalam sidang panitia perancang UUD tanggal 11 Juli 1945. Keberatan yang sama juga diajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang ketua BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.

4. Pengesahan Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disyahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari *preambul* (pembukaan) Undang-Undang Dasar negara tersebut. Namun demikian sehari sebelum tanggal ini ada peristiwa penting.

Peristiwa penting yang dimaksud adalah seperti ini. Sore hari setelah kemerdekaan Negara Indonesia diproklamirkan, Moh. Hatta menerima Nisyijima (pembantu Laksamana Mayda/Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia merdeka.

Pesan tersebut, kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian Timur di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama (Piagam Jakarta) : .”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Bagaimana dengan sikap Moh. Hatta saat itu? Ketika itu Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia Merdeka yang baru saja dicapai. Jika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan daerah (Indonesia) luar Jawa akan kembali dikuasai oleh kaum Kolonial Belanda. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut, bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) esok hari (tanggal 18 Agustus 1945).

Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama (dalam rumusan Piagam Jakarta) diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan pada buku tugas!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Apa singkatan dan nama dalam Bahasa Jepang dari BPUPKI?
2. Siapa saja tokoh yang termasuk Panitia Sembilan? (sebutkan lima saja)
3. Siapa tokoh yang mengajukan usul pertama tentang istilah Pancasila?
4. Kapan BPUPKI terbentuk?
5. Tuliskan rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta!

6. Siapa ketua dari Panitia Sembilan?
7. Jelaskan nilai inisiatif dalam proses perumusan Pancasila!
8. Mengapa sila pertama Pancasila rumusan Piagam Jakarta mulai tanggal 18 Agustus 1945 berubah?
9. Sebutkan beberapa tokoh yang menyatakan keberatan dengan rumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta!
10. Tanggal berapa BPUPKI mengadakan sidang kedua?

B. Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Banyak nilai juang yang dapat kamu petik dari proses perumusan Pancasila sebagaimana telah dipaparkan di atas. Nilai-nilai juang tersebut adalah pelajaran yang dapat dijadikan contoh dari berbagai peristiwa penting dalam proses perumusan Dasar Negara (Pancasila) itu. Tentu saja meliputi tahap usulan (dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 28 Mei - 1 Juni 1945), maupun tahap perumusan sesudah pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945.

Apa saja nilai-nilai juang yang dimaksud? Apabila kita memerhatikan dengan baik proses dan perjalanan perumusan Pancasila sebagai dasar negara tersebut, maka nilai-nilai juang itu meliputi :

1. Nilai Kemandirian

Kamu barangkali sepakat, bahwa dibalik proses peristiwa perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita apa? Tidak lain untuk menjadi bangsa dan negara merdeka yang dapat menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, di antara nilai penting dari proses perumusan Pancasila adalah nilai kemandirian.

2. Nilai Inisiatif

Inisiatif artinya pintar memanfaatkan peluang, berani tampil, menjadi pelopor untuk berperan dengan aktif menyampaikan segala gagasan, pendapat, dan pandangan yang dimilikinya dan sejenisnya. Semua tokoh pendahulu kita, termasuk yang tergabung tim perumusan Pancasila merupakan orang-orang yang berinisiatif tinggi. Barangkali kita sepakat, bahwa tanpa daya inisiatif yang tinggi dari para tokoh pendahulu kita ini, negara Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila akan mustahil terwujud.

3. Nilai Persatuan dan Kesatuan

Para perumus Pancasila merupakan wakil dari segala golongan dan lapisan masyarakat (Indonesia). Ada yang dari bagian barat, tengah, maupun timur. Mereka bekerja sama saling bahu-membahu dalam satu keinginan bersama, yakni terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu dalam segala kejadian dan peristiwa perumusan Pancasila ini akan selalu tercermin nilai persatuan dan kesatuan.

4. Nilai Anti Penjajahan

Segala kegiatan dan peristiwa perumusan dasar negara Indonesia didasari oleh semangat anti penjajahan. Selain itu, tentu ada keinginan yang kuat bangsa Indonesia mewujudkan negara merdeka. Karena itu secara langsung atau tidak langsung berbagai macam hal dalam peristiwa perumusan dasar negara Pancasila mencerminkan nilai anti penjajahan.

5. Nilai Kerja Keras dan Pantang Menyerah

Mewujudkan dasar negara merdeka dengan penduduk yang beraneka ragam (suku, kebudayaan, daerah, dan lain-lain) bukanlah pekerjaan yang ringan. Namun demikian, kuatnya semangat untuk menjadi bangsa atau negara merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa atau negara-negara lain di dunia menjadikan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia itu bukan sebagai halangan. Dalam proses perumusan Pancasila para tokoh pendahulu yang tergabung dalam tim tampak bekerja dengan sangat keras dan pantang menyerah mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam rangka mewujudkan keinginan menjadi bangsa yang merdeka.

6. Nilai Musyawarah

Mewujudkan satu cita-cita atau tujuan yang besar untuk kepentingan bersama, dalam pelaksanaannya memang menuntut adanya musyawarah. Peristiwa perumusan Pancasila dari tahap yang satu ke tahap yang lain tentu saja mencerminkan nilai-nilai musyawarah. Mengapa? Sebab segala sesuatu dalam kegiatan tersebut selalu dibicarakan orang banyak melalui kegiatan-kegiatan persidangan.

Rangkuman

1. Dasar-dasar suatu negara digali dari jiwa bangsa atau negara yang bersangkutan.
2. Bunyi teks dasar negara Pancasila seperti yang ada sekarang dirumuskan melalui berbagai tahap dan proses.
3. Tahap pertama proses perumusan Pancasila dimulai sejak sidang pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 28 Mei - 1 Juni 1945.
4. Tokoh pertama yang menemukan/mengemukakan istilah Pancasila adalah Sukarno, dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Maka tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila.
5. Setelah pidato Sukarno tanggal 1 Juni, ketua BPUPKI mengakhiri sidang (pertama) dan membentuk Panitia Kecil. Panitia Kecil ini bertugas menyusun dan merumuskan dasar-dasar negara berdasarkan pidato Sukarno. Panitia Kecil ini kemudian dikenal sebagai Panitia Sembilan.
6. Dalam proses perumusan banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa tersebut mengandung nilai-nilai juang penting yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan

Tugas Kelompok

Nilai-nilai juang yang terkandung dalam peristiwa perumusan Pancasila banyak. Enam hal yang ditunjukkan sebagai contoh sebagaimana bisa kamu simak, hanyalah sebagian saja. Nah, dalam kegiatan ini cobalah kamu bekerja secara kelompok untuk mengambarkan berbagai nilai juang dalam perumusan Pancasila. Agar lebih terarah, coba tunjukkanlah nilai-nilai seperti toleransi, kerja sama, rela berkorban, dan rendah hati dalam peristiwa perumusan Pancasila.

Selamat Bekerja!

Tugas Individu

Ayo mengutarakan pendapat!

1. Andi merupakan ketua kelas yang pandai dan pintar. Sebagai ketua kelas Andi selalu berusaha penuh semangat ingin memajukan kelas yang ia pimpin dalam segala hal. Oleh karena itu segala yang menurutnya baik, pasti akan dilakukan dengan segera. Bahwa karena begitu semangatnya, Andi tidak bermusyawarah dengan teman-teman lebih dulu dalam beberapa kegiatan penting yang akan dilakukan.

   Setujukah kamu dengan sikap Andi?

   Apa alasan-alasanmu?

2. Toni, Made, dan Tomas merupakan teman sekelas. Mereka saling bersahabat dan akrab walaupun di antara masing-masing berbeda keyakinan agama, juga daerah. Mereka bahkan memasalahkan perbedaan itu. Mereka sering belajar bersama, dan musyawarah untuk mengadakan kegiatan bersama semisal rekreasi, tampil menyanyi bersama di panggung sekolah, dan lain-lain.

   Setujukah kamu dengan sikap Toni, Made, dan Tomas?

   Apa alasan-alasanmu?

3. Ali, Asep, dan Anton teman sekelas dan berasal dari daerah yang berlainan. Biasanya mereka selalu rukun, dan tidak saling mempersalahkan perbedaan. Akan tetapi saat ini kelas mereka akan membentuk ketua kelas. Kebetulan, para calon ketua kelas dalam pemilihan sekarang ini punya asal daerah yang tidak sama dengan Ali, Asep, juga Anton. Maka, dalam pemilihan ketua kelas itu, Ali, Asep, serta Anton, mendukung calon ketua kelas yang punya kesamaan asal daerah.
   Setujukah kamu dengan Ali, Asep, dan Anton?
   Mengapa?

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!

Kamu telah mengikuti uraian tentang nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai juang apa saja yang patut kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, isilah kolom berikut ini!

No.	Jenis Pembiasaan Sikap	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Bermusyawarah untuk kepentingan bersama.	ya	-	Di sekolah Di rumah
2.	Mengutamakan kepentingan bersama.			
3.	Suka berinisiatif.			
4.	Suka bekerja keras.			
5.	Melaksanakan hasil keputusan			
6.	bersama. Menghargai teman dalam perbedaan			
7.	pendapat. Tidak meremehkan teman dalam kegiatan musyawarah.			

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pada tahap ini proses perumusan Pancasila masih berupa usulan-usulan mengenai dasar negara tanggal ....
   a. 28 Mei - 1 Juni 1945
   b. 22 Juni 1945
   c. 10 - 11 Juli 1945
   d. 18 Agustus 1945
2. Dalam lembaga ini dasar-dasar negara Pancasila mulai dibicarakan. Lembaga yang dimaksud adalah ....
   a. BPUPKI
   b. PPKI
   c. DPR
   d. MPR
3. Tugas Panitia Kecil dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah ....
   a. menyusun kembali tentang usulan-usulan dasar negara
   b. membuat aturan main proses penyusunan Pancasila
   c. merumuskan kembali pidato Sukarno
   d. meneliti usulan-usulan dasar negara
4. Yang termasuk anggota Panitia Sembilan ....
   a. Muhammad Yamin
   b. Kasman Singodimejo
   c. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat
   d. R. Pandji Suroso
5. Tanggal lahirnya istilah Pancasila ....
   a. 29 Mei 1945
   b. 1 Juni 1945
   c. 22 Juni 1945
   d. 10 Juli 1945
6. Tidak ada anggota yang merasa kalah dalam musyawarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, meskipun pendapat-pendapat di antara mereka tidak disetujui. Hal tersebut merupakan nilai ....
   a. rendah hati
   b. mufakat
   c. berjiwa besar
   d. kerja keras
7. Rumusan dasar negara yang sempat menjadi perdebatan panjang dan sengit hingga akhir penetapan tanggal 18 Agustus 1945 ....
   a. sila pertama
   b. sila kedua
   c. sila ketiga
   d. sila keempat dan kelima

8. Terhadap kepentingan yang lebih besar, seharusnya kita menunjukkan sikap ....
   a. mempertahankan pendapat sendiri
   b. menghargai pendapat teman
   c. rela berkorban
   d. merasa paling benar pendapatnya

9. Tokoh berikut ini pernah menyatakan keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta ....
   a. Sukarno
   b. Muhammad Yamin
   c. Ki Bagushadikusumo
   d. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat

10. Berikut ini termasuk nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila ....
   a. rendah diri
   b. rendah hati
   c. ingin menang sendiri
   d. merendahkan pendapat orang lain

11. Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara merupakan tugas yang berat. Namun demikian hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan tersebut dikatakan telah menunjukkan sikap ....
   a. rendah hati
   b. menghargai orang lain
   c. kerja keras
   d. toleransi

12. Hasil keputusan musyawarah yang baik akan mencerminkan ....
   a. kemenangan satu pendapat
   b. kemenangan pendapat orang terpandai
   c. kemenangan semua anggota musyawarah
   d. kemenangan pendapat suatu kelompok

13. Dua golongan atau kubu yang saling berdebat seru dalam Panitia Sembilan ....
   a. paham kebangsaan dan agama
   b. Islam dan paham kebangsaan
   c. paham kebangsaan dan Protestan
   d. paham kebangsaan dan Katolik

14. Nilai juang penting dari para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk dilaksanakan seorang pelajar ....
   a. banyak menonton acara televisi
   b. suka menonton film-film luar negeri
   c. giat dan rajin membaca
   d. suka mengikuti berita

15. Sebagai siswa yang memiliki sikap tanggung jawab, terhadap hasil-hasil keputusan musyawarah seharusnya ....
    a. melaksanakan meskipun tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
    b. tidak perlu melaksanakan
    c. melaksanakan selagi sesuai dengan pendapat yang pernah diusulkan
    d. melaksanakan dengan syarat-syarat

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Anggota BPUPKI terdiri atas beberapa ... orang.
2. Ketua BPUPKI adalah ....
3. BPUPKI mengadakan sidang tanggal ....
4. Tokoh yang merumuskan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta adalah ....
5. Musyawarah dalam pengambilan keputusan merupakan pengamalan Pancasila sila ke ....
6. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara pada tanggal ....
7. BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal ....
8. Nama dalam bahasa Jepang dari BPUPKI adalah ....
9. Ketua dari Panitia Sembilan adalah ....
10. Tokoh pertama kali yang mengemukakan istilah Pancasila adalah ....

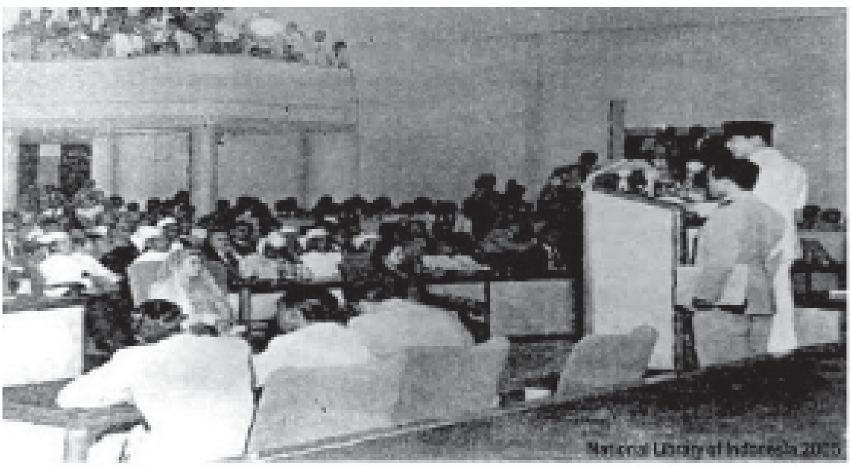
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan tiga tokoh penting yang pernah mengajukan usul tentang dasar-dasar negara dalam sidang BPUPKI!
2. Jelaskan pokok-pokok pikiran pidato Sukarno tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945!
3. Apa yang kamu ketahui tentang Panitia Kecil dan Panitia Sembilan?
4. Apa yang kamu ketahui tentang nilai rela berkorban dari peristiwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara?
5. Apa yang kamu ketahui tentang Piagam Jakarta?

Bab II

Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pidato Sukarno Tanggal 1 Juni 1945



Sumber: www.puas.or.id

Gambar 2.1 Pidato Sukarno Tanggal 1 Juni 1945

"... Saudara-saudaraku sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya. Banyak pikiran yang telah dikemukakan, macam-macam. Tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki Bagus Hadikusuma, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persetujuan dasar negara yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin (Muhammad Yamin) setuju, yang Ki Bagus setuju, yang saudara Abikusno setuju, yang saudara Liem Koen Hian setuju ...."

Demikian bunyi kutipan sebagian pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945 dihadapan sidang BPUPKI yang terkenal itu. Pidato tokoh yang selanjutnya menjadi salah seorang proklamator ini memang mengakhiri sidang BPUPKI tahap pertama. Dalam sidang tersebut semua peserta sidang telah mengajukan pandangan-pandangan dan usulannya mengenai dasar negara Indonesia.

Peta Konsep

- Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
  - Beberapa peristiwa penting dalam proses perumusan Pancasila
    1. Rumusan Pancasila hasil Sidang Panitia Sembilan
    2. Utusan pembawa pesan Dari wakil-wakil Indonesia Bagian timur
  - Cermin nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila
    1. Nilai kebersamaan dalam sidang pertama BPUPKI
    2. Nilai kebersamaan hasil Keputusan sidang Panitia Sembilan
    3. Nilai kebersamaan Menjelang tanggal 18 Agustus 1945

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila dan
2. menjelaskan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Kata Kunci

- Nilai kebersamaan
- Dasar negara
- Sidang BPUPKI
- Sidang PPKI

“.... Kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persetujuan dasar negara yang kita semua setuju ....” Inilah salah satu contoh nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Mereka para tokoh itu duduk bersama-sama di meja persidangan, mengemukakan usulan, pendapat, maupun pandangan, dengan kesamaan tujuan, mencari kesepakatan tentang dasar negara.

Tentu saja ada perbedaan-perbedaan pandangan di antara mereka mengenai rumusan dasar-dasar negara itu. Namun karena kesepahaman mereka, nilai-nilai kebersamaan dalam pikiran para tokoh-tokoh itu lebih diutamakan. Semua rintangan dan kendala dapat mereka lewati.

Bagaimana perjalanan nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Mari kita ikuti uraiannya.

A. Beberapa Peristiwa Penting dalam Proses Perumusan Pancasila

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak dari perjuangan dan cita-cita bersama menuju Indonesia merdeka. Kita tahu, bahwa perjalanan perjuangan dan cita-cita bersama tersebut telah dirintis oleh para tokoh pemuda sejak mereka mencetuskan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Perjalanan perjuangan dan cita-cita bersama menuju Indonesia merdeka tersebut juga harus dibayar dengan berbagai pengorbanan yang tidak sedikit, baik itu jiwa, harta, maupun tenaga dan pikiran.

Kini, wujud nyata dari perjuangan dan cita-cita bersama tadi sudah ada di depan mata. Kesempatan untuk membentuk kebangsaan negara Indonesia yang merdeka, tinggal menunggu waktu. Sejumlah toko dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia sedang duduk bersama-sama di meja persidangan untuk membicarakan masalah dasar negara yang dapat diterima oleh rakyat Indonesia dari segala lapisan. Mereka mencari kesepahaman tentang rumusan dasar negara.

Namun demikian, merumuskan dasar-dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, ternyata harus melalui proses yang berliku-liku. Ada golongan yang setuju dan tidak setuju tentang suatu pendapat. Mereka saling beradu juga berselisih pandangan. Maka, ada pendapat-pendapat yang diterima, ada pula yang tidak diterima. Bahkan ada yang harus diambil jalan tengah. Pendeknya, banyak peristiwa penting yang muncul mengiringi proses mencari kesepahaman tentang rumusan dasar negara itu.

Bagaimana liku-liku dan proses mencari kesepahaman tentang rumusan dasar negara tersebut? Paling tidak uraiannya adalah sebagai berikut.

1. Rumusan Pancasila Hasil Sidang Panitia Sembilan

Sesudah pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI berakhir. Ketika itu ketua BPUPKI juga membentuk Panitia Kecil yang perjalanan selanjutnya biasa dikenal sebagai Panitia Sembilan.

Dalam Panitia Sembilan ini terdapat dua golongan yang saling berbeda pandangan. Yang pertama adalah golongan yang menghendaki Islam mendasari pendirian negara. Golongan yang kedua, menghendaki paham kebangsaan sebagai dasar pendirian negara. Jalan tengah yang diambil dalam perbedaan pandangan tersebut adalah rumusan Pancasila yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Adakah keberatan yang muncul atas hasil kerja Panitia Sembilan itu? Jelas! Dalam beberapa kesempatan, keberatan itu beberapa kali muncul. Sebagai contoh, Ki Bagus Hadikusumo, Wongsonegoro, Latuharhary, dan Husen Joyodiningrat. Mereka mengajukan usulan agar rumusan sila "Ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya" dalam Piagam Jakarta diganti.

Namun demikian, Sukarno sebagai ketua Panitia Sembilan pada waktu itu mengatakan, bahwa Piagam Jakarta merupakan jalan tengah yang sudah disepakati oleh dua golongan yang saling berbeda pandangan. Artinya, jika keberatan-keberatan tersebut diterima, kesepakatan yang sudah dicapai sebagai jalan tengah menjadi masalah baru. Dengan kata lain, Sukarno tidak ingin menodai kesepakatan yang telah dicapai sebagai jalan tengah yang telah diambil tersebut.

Sebaiknya Kamu Tahu

Rancangan Preambul Hukum Dasar Persembahan dari Panitia Kecil

Sukarno memang memberi laporan pada hari pertama sidang BPUPKI ke dua (tanggal 10 Juli 1945). Laporan tersebut adalah tentang sidang Panitia Sembilan yang telah menghasilkan rumusan dasar negara. Rumusan tersebut dicantumkan dalam suatu rancangan preambul atau pembukaan hukum dasar yang selanjutnya dipersembahkan oleh Panitia Kecil kepada sidang BPUPKI. Bunyi selengkapnya pembukaan hukum dasar yang memuat rumusan dasar negara (Pancasila) tersebut selengkapnya adalah:

Pemboekaan.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan Perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat jang bahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia jang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasarkan kepada : ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Sumber : Muhammad Yamin, dikutip dari PJ Suwarno, 1993).

2. Utusan Pembawa Pesan dari Wakil-wakil Indonesia Bagian Timur

Sore hari setelah kemerdekaan Negara Indonesia diproklamirkan, Moh. Hatta menerima telepon dari Nisyijima (pembantu Laksamana Mayda/AL Jepang). Telepon tersebut memberitahukan bahwa ada seorang opsir yang ingin menyampaikan pesan berkaitan dengan Indonesia merdeka.

Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai AL. Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama (Piagam Jakarta) : "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Utusan tersebut juga menyampaikan bahwa bunyi rumusan sila pertama tersebut membedakan sekaligus tidak mengikat keberadaan mereka (umat Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia bagian timur).

Oleh karena itu, keesokan hari tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Hassan untuk mengadakan rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan yang menyatakan tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya mereka sepakat, bahwa Indonesia tidak boleh pecah. Akhirnya, kesepakatan akhir dari pembicaraan mereka adalah sila pertama (dalam rumusan Piagam Jakarta) diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kegiatan

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo memberi tanda cek (✓) pada kolom setuju dan tidak setuju!

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Demi kebersamaan, dalam musyawarah kelas kamu tidak perlu usul mengenai masalah yang kamu tidak setuju.		

2.	Kepentingan pribadi perlu lebih diutamakan daripada kepentingan bersama.		
3.	Dalam kelas Tomas tidak ikut musyawarah mengenai kegiatan mengunjungi korban bencana alam di tempat pengungsian. Tomas juga tidak sepakat tentang hari dan tanggal yang sudah diputuskan dalam musyawarah. Karena itu, lebih baik Tomas tidak mengikuti kegiatan mengunjungi korban bencana alam di tempat pengungsian.		
4.	Pendapat sendiri selalu benar sementara pendapat teman lain belum tentu benar.		
5.	Antara Ali dan teman-teman satu kelas terdapat banyak perbedaan. Ada perbedaan suku, ada juga perbedaan keyakinan. Namun kegiatan-kegiatan di kelas Ali selalu berjalan lancar. Dalam segala kegiatan di kelas Ali dan teman-temannya tidak mempermasalahkan berbagai perbedaan.		
6.	Dalam kegiatan musyawarah, pendapat-pendapat teman perlu kamu dengar.		
7.	Teman Tedi tidak dapat mengerjakan soal-soal ulangan harian. Lama teman Tedi tidak dapat masuk sekolah karena sakit. Maka, Tedi perlu membantu temannya memberi contekan demi kebersamaan.		
8.	Teman dan kamu saling berbeda pendapat dalam kegiatan diskusi kelompok di kelas. Maka, kamu dan teman tidak perlu bertegur sapa di jalan.		
9.	Untuk menjaga nilai kebersamaan, dalam segala tindakan kita harus menjauhkan sikap mau menang sendiri.		
10.	Usul Alex dalam musyawarah remaja tingkat RW ditolak keras. Oleh karena itu Alex segera pergi dan tidak mau lagi melanjutkan untuk mengikuti musyawarah lebih lanjut.		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Secara umum nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila tampak pada kegiatan ....
2. Semua anggota BPUPKI dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada tahap usulan mengajukan ....
3. Yang menjadi ketua dalam Panitia Sembilan adalah ....
4. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada tahap usulan contohnya ....
5. Dalam Panitia Kecil atau Panitia Sembilan ada dua kubu penting yang saling berbeda dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan masing-masing dari kubu tersebut adalah ....
6. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta yang banyak memunculkan keberatan adalah rumusan yang berbunyi ....
7. Pada tanggal 18 Agustus PPKI bersidang untuk menetapkan ....
8. Di antara tokoh yang pernah menyatakan keberatan terhadap rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta misalnya ....
9. Alasan wakil dari kalangan Katolik dan Protestan keberatan terhadap rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta adalah karena ....
10. Contoh nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Panitia Sembilan misalnya ....

B. Cermin Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila

Apa saja peristiwa yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Jika menyimak berbagai peristiwa yang terjadi dalam proses tersebut dari awal hingga akhir, pengesahan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Beberapa peristiwa yang mencerminkan nilai kebersamaan adalah sebagai berikut.

1. Nilai Kebersamaan dalam Sidang Pertama BPUPKI

Saat sidang pertama BPUPKI baru dimulai, kita tahu, perumusan Pancasila masih berupa usulan, pandangan, atau pendapat individu. Usulan-usulan pendapat tersebut berbeda-beda. Akan tetapi, masing-masing anggota berusaha keras mengemukakan pandangan atau pendapat yang dapat disetujui oleh sidang.

Maka, nilai-nilai kebersamaan proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI pertama ini mencerminkan dalam inisiatif peserta sidang. Mereka berinisiatif mengajukan usulan mengenai rancangan dasar-dasar negara di depan sidang. Mereka berpidato di muka sidang mengemukakan segala pendapat terbaiknya.

2. Nilai Kebersamaan dalam Hasil-hasil Keputusan Sidang Panitia Sembilan

Dalam sidang Panitia Kecil atau yang biasa disebut dengan Panitia Sembilan terdapat dua golongan yang saling berbeda pendapat. Ada golongan yang melandasi dasar negara dengan agama Islam. Ada juga golongan lain yang menghendaki kebangsaan sebagai dasar negara. Tokoh-tokoh dari golongan Islam adalah Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, K.H. Wahid Hasyim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Sementara tokoh-tokoh yang mewakili paham kebangsaan adalah Sukarno, Muhammad Yamin, Moh. Hatta, Ki Ahmad Subardjo, dan Mr. AA. Maramis.

Lantas, apa peristiwa yang mencerminkan nilai kebersamaan dalam kepanitiaan ini? Tidak lain adalah dicapainya jalan tengah antara dua golongan yang saling berbeda pendapat itu. Jalan tengah antara pendapat dua golongan yang dimaksud adalah lahirnya Piagam Jakarta.

Bagi golongan paham kebangsaan, menerima rumusan Pancasila Piagam Jakarta ini memang masih terasa berat. Namun, mereka kuatnya cita-cita bersama-sama untuk segera mewujudkan negara Indonesia merdeka dan terbebas dari penjajahan mereka melaksanakan apa yang sudah menjadi hasil keputusan sidang.

Dengan kata lain, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila di sini memang benar-benar diuji. Mengapa? Sebab jika dalam tahap ini titik temu kesepakatan gagal dicapai, maka cita-cita bersama untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka bisa jadi akan gagal dan berantakan.

3. Nilai Kebersamaan Menjelang Tanggal 18 Agustus 1945

Menjelang hari pengesahan Undang-Undang Dasar Negara (rumusan Pancasila menjadi bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara), nilai kebersamaan mengalami perkembangan baru. Ujian terhadap nilai kebersamaan kali ini, bukan hanya melibatkan golongan Islam dan paham kebangsaan. Akan tetapi melibatkan juga umat Protestan dan Katolik (yang mewakili wilayah Indonesia bagian Timur).

Maka nilai kebersamaan yang tercermin dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara menjelang tanggal 18 Agustus 1945 ini adalah peristiwa perubahan rumusan Piagam Jakarta. Tepatnya adalah pencoretan tujuh kata sila pertama Piagam Jakarta, hingga akhirnya bunyinya menjadi : “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Rangkuman

1. Secara umum perumusan Pancasila mencerminkan nilai kebersamaan, yakni mewujudkan cita-cita untuk hidup bersama dan menentukan nasib sendiri melalui pembentukan Negara Indonesia yang merdeka.
2. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila dari awal (sidang pertama BPUPKI) hingga tahap akhir (sidang PPKI) mengalami perkembangan.
3. Nilai kebersamaan proses perumusan Pancasila pada tahap paling awal terwujud dalam inisiatif semua peserta sidang BPUPKI dalam menyampaikan gagasan-gagasan tentang dasar negara.
4. Nilai kebersamaan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga tampak pada tim kecil yang biasa disebut dengan Panitia Sembilan. Nilai kebersamaan pada Panitia Sembilan tercermin rumusan Pancasila yang terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta yang menjadi jalan tengah perbedaan pendapat antara golongan Islam dan kebangsaan.

5. Nilai kebersamaan proses perumusan Pancasila pada tahap akhir menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus tampak pada pencoretan tujuh kata sila pertama Piagam Jakarta. Pencoretan tujuh kata tersebut karena ada keberatan utusan yang mengatasnamakan wakil golongan umat Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur.
6. Nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila, patut kita jadikan pelajaran dalam sehari-hari.

Kegiatan

Kerjakan di buku tugasmu!
Ayo menyatakan setuju dan tidak setuju!

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Dalam kegiatan musyawarah untuk kepentingan bersama, kita tidak perlu berinisiatif mengemukakan pendapat.		
2.	Nilai kebersamaan para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila rendah.		
3.	Lahirnya Piagam Jakarta mencerminkan kekalahan kelompok kebangsaan.		
4.	Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila dari tahap awal hingga akhir banyak mengalami perkembangan.		
5.	Kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan.		

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!

Kamu sudah mengikuti uraian tentang nilai kebersamaan dalam proses perumusan sebagai dasar negara. Di sana banyak peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.

Nah, untuk membuktikan bahwa kamu telah dapat memetik pelajaran dari perjalanan atau proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, isilah kolom tugas pembiasaan berikut. Konsultasikan hasil kerjamu kepada guru kelas.

Kolom Tugas

No.	Peristiwa	Tindakan	Alasan
1.	Jadwal belajar kelompok rutin waktunya bersamaan dengan menengok temanmu yang sedang sakit.	....	....
2.	Hasil keputusan musyawarah di kelas tidak cocok dengan pendapatmu.	....	....
3.	Ada famili dari jauh datang. Lomba pingpong antar sekolah hari itu dimulai dan kamu masuk tim.	....	....
4.	Ada tugas kelompok yang harus segera dikumpulkan. Di antara kelompokmu ada dua orang yang tidak dapat ikut bekerja kelompok karena sakit.	....	....
5.	Pagi itu kamu giliran piket. Saat berangkat sekolah ada orang tertabrak sepeda dan butuh pertolonganmu.	....	....

Nama Siswa | Tanda Tangan Guru Kelas

.... | ....

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Hasil keputusan musyawarah yang baik akan mencerminkan ....
   a. kemenangan satu pendapat
   b. kemenangan pendapat orang terpandai
   c. kemenangan semua anggota musyawarah
   d. kemenangan pendapat suatu kelompok
2. Nilai kebersamaan yang tercermin dalam proses perumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 melibatkan ....
   a. paham kebangsaan dan agama
   b. Islam dan paham kebangsaan
   c. paham kebangsaan dan Protestan
   d. paham kebangsaan dan Katolik
3. Nilai kebersamaan yang tercermin pada sidang-sidang Panitia Sembilan d alam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ....
   a. adanya banyak perbedaan pendapat
   b. tidak adanya perbedaan pendapat
   c. adanya dua golongan saling mengemukakan pendapat
   d. disepakatinya suatu jalan tengah untuk mengatasi perbedaan pendapat
4. Sebagai siswa yang memiliki sikap bertanggung jawab, terhadap hasil-hasil keputusan musyawarah sebaiknya ....
   a. melaksanakan meskipun tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
   b. tidak perlu melaksanakan
   c. melaksanakan selagi sesuai dengan pendapat yang pernah diusulkan
   d. melaksanakan dengan syarat-syarat

5. Nilai kebersamaan yang paling menonjol di kalangan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ....
   a. saling mengajukan usul tentang dasar-dasar bagi negara yang merdeka
   b. pembentukan Panitia Kecil untuk perumusan Pancasila
   c. menerima perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta
   d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
6. Saling tenggang rasa terhadap perbedaan-perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan cermin dari nilai ....
   a. rendah hati
   b. toleransi
   c. mufakat
   d. bertanggung jawab
7. Rumusan yang berbunyi : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya terdapat dalam ....
   a. Pembukaan UUD
   b. Pidato Sukarno
   c. Pancasila
   d. Piagam Jakarta
8. Tokoh yang menerima utusan yang mengatasnamakan wakil umat Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia bagian Timur ....
   a. Sukarno
   b. Moh. Hatta
   c. Muhammad Yamin
   d. Ki Bagus Hadikusumo
9. *Dokuritsu Junbi Cosakai* merupakan lembaga buatan Dai Nippon. Dalam bahasa kita lembaga tersebut dikenal dengan ....
   a. PPKI
   b. BPUPKI
   c. Panitia Kecil
   d. Panitia Sembilan
10. Terhadap segala hal yang di dalamnya mengandung kepentingan bersama, hendaknya ....
    a. musyawarah
    b. rendah hati
    c. toleransi
    d. kerja keras

11. “... Kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persetujuan dasar negara yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! ... “
    Kutipan pidato tersebut pernah diucapkan oleh ....
    a. Muhammad Yamin
    b. Moh. Hatta
    c. Sukarno
    d. Supomo
12. Tokoh ini termasuk golongan yang menghendaki Islam sebagai dasar pendirian negara ....
    a. Supomo
    b. Ki Bagus Hadikusumo
    c. Muhammad Yamin
    d. Abdul Kahar Muzakir
13. Bunyi teks Pancasila yang sah, otentik dan dapat diterima seperti yang kamu hafal sekarang terdapat dalam ....
    a. Piagam Jakarta
    b. UUD 1945
    c. Pembukaan UUD 1945
    d. Proklamasi
14. Nilai juang dalam proses perumusan Pancasila berikut ini dapat kamu teladani ketika menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat dalam musyawarah ....
    a. kerja keras
    b. toleransi
    c. rendah hati
    d. inisiatif
15. Contoh nilai kebersamaan yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan di sekolah ....
    a. kerja sama dalam ujian
    b. berpegang kepada pendapat sendiri
    c. saling membantu dalam tugas piket
    d. saling membantu berdasar suku/agama

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Pada tanggal 18 Agustus PPKI bersidang untuk menetapkan ....
2. Nilai kebersamaan lahirnya Piagam Jakarta diterapkan sejak ....
3. Sumpah Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal ....
4. Yang menjadi ketua dalam Panitia sembilan adalah ....
5. Singkatan dari PPKI adalah ....

6. Abdul Kahar Muzakir adalah tokoh dari golongan ....
7. *Dokuritsu Junbi Cosakai* merupakan lembaga buatan dari tentara Jepang yaitu ....
8. Untuk memutuskan suatu kepentingan bersama itu, harus diadakan ....
9. Kepanjangan dari BPUPKI adalah ....
10. Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara pada tanggal ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Tunjukkan nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila menjelang tahap pengesahan PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
2. Sebutkan tokoh-tokoh yang termasuk golongan kebangsaan dan Islam dalam proses perumusan Pancasila!
3. Sebutkan tiga tokoh yang pernah menyatakan keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta!
4. Mengapa utusan yang mengatasnamakan wakil umat Protestan dan Katolik keberatan terhadap Piagam Jakarta?
5. Sebutkan beberapa tokoh panitia sembilan yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara (lima saja)!

Bab III

Nilai-nilai Juang Para Tokoh yang Berperan dalam Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

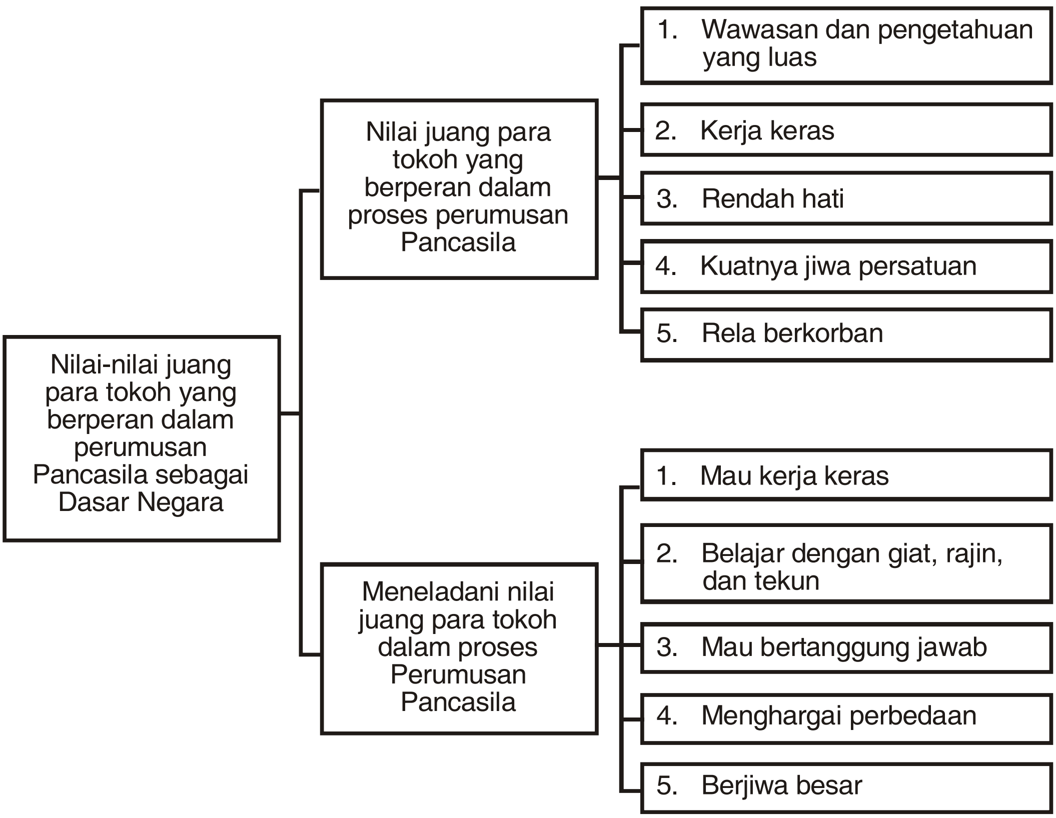


Sumber : www.blog.boleh.com

Gambar 3.1 Keteladanan Tokoh Dwitunggal

Mungkin kamu tidak asing lagi dengan dua tokoh pada gambar di atas. Mereka adalah dua orang proklamator Indonesia. Nama mereka tertera pada bagian bawah teks proklamasi. Karena itu kedua tokoh tersebut sering disebut sebagai dwitunggal. Dwitunggal artinya dua orang tetapi satu. Maksudnya kedua tokoh ini tidak dapat dipisahkan peran perjuangannya bagi pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu semua tahu, nama mereka juga banyak disebut-sebut dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila dan
2. meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai siswa sekolah dasar, bagaimana kamu mencontoh keteladanan pada diri mereka? Cobalah simak biografi singkat tokoh dwitunggal tersebut pada uraian berikut.

Bung Karno



Sumber: www.marheinesmefiles wordpress.com
Gambar 3.2 Bung Karno

Tokoh ini lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Sebenarnya ia termasuk keturunan bangsawan dan punya gelar insinyur (Ir.). Akan tetapi beliau tidak suka menonjolkan kebangsawanannya ataupun gelar insinyurnya. Beliau lebih senang dipanggil Bung Karno, dan panggilan tersebut hingga sekarang masih melekat di hati bangsa Indonesia.

Hal-hal yang perlu diketahui dari tokoh ini bagi siswa sekolah dasar seperti kamu antara lain, beliau sebagai orang terpelajar. Selain itu beliau juga pejuang, dan pecinta tanah air yang tulen dan sejati.

Sebagai seorang terpelajar, hal ini dapat disimak dari perjalanan pendidikan beliau. Perjalanan pendidikan beliau antara lain, ELS (SD zaman Belanda), MULO (tingkat SMP zaman Belanda), HBS (setingkat SMA), dan THS di Bandung (tingkat Perguruan Tinggi dan sekarang menjadi ITB (Institut Teknologi Bandung)). Dari pendidikan terakhir inilah beliau mendapat gelar Ir. (Insinyur). zaman Belanda), Indonesia sebagai bangsa yang dapat menentukan nasib sendiri itulah maka pada masa perjuangannya beliau sering keluar masuk penjara. Bahkan beliau juga pernah dibuang ke Digul (sebuah kawasan di wilayah Papua). Akan tetapi beliau tidak pernah menyerah dalam berjuang. Beliau tetap berjuang dan berjuang demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan proses perumusan Pancasila. Beliau orang pertama yang menemukan istilah Pancasila. Istilah tersebut muncul dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 1 Juni 1945. Kamu semua tahu, tanggal 1 Juni ini, dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila.

Masih kaitannya dengan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, beliau juga sebagai ketua Panitia Sembilan. Tim kecil ini, kamu tahu tugasnya adalah merumuskan dasar negara sesudah berakhirnya sidang pertama BPUPKI. Panitia Kecil ini pula yang akhirnya melahirkan rumusan Pancasila Piagam Jakarta (*Djakarta Charter*).

Ketika tugas-tugas BPUPKI selesai (dan BPUPKI dibubarkan) untuk diganti dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) beliau juga menjadi ketua PPKI. Beliau juga diminta oleh tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu untuk segera mengumandangkan Kemerdekaan Negara Indonesia. Akhirnya, hari Jum'at, bulan Ramadhan, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 beliau bertindak atas nama bangsa Indonesia (bersama Moh. Hatta) memproklamirkan kemerdekaan Negara Indonesia.

Bung Hatta



Sumber: www.gemari.or.id

Gambar 3.3 Bung Hatta

Tokoh ini juga sebagai pejuang serta pecinta tanah air sejati. Lahir di Bukittinggi (Sumatra Barat) pada tanggal 12 Agustus 1902. Selain sebagai pejuang tulen dalam menentang penjajahan, beliau sebagai tokoh terpelajar dan ahli dalam bidang ekonomi. Keahliannya dalam bidang ekonomi, kelak ia dikenal sebagai Bapak Koperasi.

Sebagai seorang terpelajar, hal tersebut bisa disimak dari perjalanan pendidikannya. Antara lain beliau menempuh pendidikan ELS (SD zaman Belanda), MULO (setingkat SMP), *Prins Hendrik Schools* (sekolah dagang zaman Belanda), dan akhirnya melanjutkan pendidikan ke *Handels Hogescool* (sekolah tinggi perdagangan di negeri Belanda).

Waktu bersekolah di negeri Belanda, beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia (*Indische Partiej*) yang mencita-citakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari luar negeri.

Dalam kaitannya dengan proses perumusan Pancasila, beliau menjadi wakil ketua Panitia Sembilan. Beliau juga yang memprakarsai perubahan sila pertama rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta (baca kembali peristiwa sore hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945).

Terakhir, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia beliau diminta oleh tokoh-tokoh pejuang untuk mewakili bangsa Indonesia (bersama Bung Karno) untuk memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Beliau juga tercatat sebagai wakil presiden pertama negara Indonesia.

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo menjawab pertanyaan!

Setelah membaca biografi singkat di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini!

1. Apa arti dwitunggal Sukarno-Hatta?
2. Bagaimana peran Sukarno dan Hatta dalam proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara?
3. Apakah Sukarno dan Hatta seorang terpelajar?
4. Mengapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila?
5. Tunjukkan bahwa Sukarno dan Hatta sebagai pejuang sejati terhadap kemerdekaan Negara Indonesia!

Kata Kunci

- Keteladanan dwi tunggal
- Wawasan
- Pengetahuan
- Persatuan
- Rela berkorban

A. Nilai Juang Para Tokoh yang Berperan dalam Proses Perumusan Pancasila

Membuat rumusan dasar negara tentu saja bukan perkara yang mudah. Ada banyak perbedaan pendapat dan pandangan, sebab masyarakat bangsa Indonesia mempunyai keragaman baik itu suku, agama, budaya, adat istiadat dan lain-lain.

Meskipun demikian, ternyata para tokoh yang berperan di dalamnya dapat melakukannya dengan baik. Dengan mencurahkan segenap kemampuan, waktu, tenaga, juga pikiran, mereka akhirnya dapat mempersembahkan karya terbaiknya buat bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Sebaiknya Kamu Tahu

Tokoh-tokoh yang Berperan dalam Proses Perumusan Pancasila

Siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu? Tidak lain adalah mereka yang bergabung dalam badan yang bernama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

BPUPKI berdiri tanggal 1 Maret 1945. Anggota-anggotanya ada 67 orang (termasuk di dalamnya ada orang-orang Jepang). Anggota-anggota tersebut dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Susunan anggota-anggota BPUPKI adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat
Ketua Muda I	:	Ichibangase (anggota luar biasa, bangsa Jepang)
Ketua Muda II	:	Raden Pandji Suroso (merangkap kepala tata usaha)
Anggota	:	60 orang (tidak termasuk ketua dan ketua muda)

Nama-nama anggota BPUPKI menurut nomor urutan tempat duduknya adalah sebagai berikut:

1. Ir. Sukarno
2. Mr. Muh. Yamin
3. Dr. R. Kusumah Atmadja
4. R. Abdulrahim Pratalykrama
5. R. Aris

6. K. H. Dewantara
7. Ki Bagus Hadikusomo
8. B. P. H. Bintoro
9. A. K. Muzakkir
10. B. P. H. Purbojo
11. R. A. A. Wiranatakusuma
12. Ir. Ashar Sutedjo Munandar
13. Oeij Tiang Tjoei
14. Drs. Moh. Hatta
15. Oei Tjong Hauw
16. H. Agus Salim
17. M. Sutardjo Kartohadikusuma
18. R. M. Margono Djojohadikusumo
19. K. H. Abdul Halim
20. K. H. Masykur
21. R. Sudirman
22. Prof. Dr. P. A. Husen Djayadiningrat
23. Prof. Dr. Soepomo
24. Prof. Ir. R. Rooseno
25. Mr. R. Pandji Singgih
26. Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso
27. R. M. T. A. Surjo
28. R. Ruslan Wongsokusumo
29. Mr. R. Susanto Titoprodjo
30. Ny. R. S. S. Sunarjo Mangunpuspito
31. Dr. R. Buntaran Martoadmodjo
32. Liem Koen Hian
33. Mr. J. Latuharhary
34. Mr. R. Hindromartono
35. R. Sukardjo Wirjopranoto
36. H. Ahmad Sanusi
37. A. M. Dasaat
38. Mr. Tan Eng Hoa
39. Ir. R. M. P. Surachman Tjokroadisurio
40. R. A. A. Sumitro Kolopaking Purbonegoro

41. K. R. M. T. H. Wuryadiningrat
42. Mr. A. Subardjo
43. Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjadjakusuma
44. Abikusno Tjokrosujoso
45. Parada Harahap
46. Mr. R. M. Sartono
47. K. H. M. Mansoer
48. Drs. K. R. M. A. Surodiningrat
49. Mr. R. Suwandi
50. K. H. A. Wachid Hasyim
51. P. F. Dahler
52. Dr. Sukiman
53. Mr. K. R. M. T. Wongsonegoro
54. R. Otto Iskandar Dinata
55. A. Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A. A. Maramis
59. Mr. R. Samsudin
60. Mr. Sastromuljono

Apakah nilai-nilai juang yang patut kita catat dari para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu? Paling tidak nilai-nilai juang tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wawasan dan Pengetahuan yang Luas

Tidak mungkin orang-orang yang bodoh dan berwawasan sempit dapat bekerja merumuskan dasar negara. Cobalah kamu simak, para tokoh yang berperan dalam merumuskan Pancasila, mereka adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan berpengetahuan luas.

Sebagai contoh, Moh. Hatta, Sukarno, Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain. Mereka semua berwawasan dan berpengetahuan luas. Mereka semua juga orang-orang terpelajar serta berpendidikan.

Nah, dengan wawasan dan pengetahuan yang luas tersebut, mereka dapat berlapang dada pada saat perbedaan-perbedaan pendapat atau mengenai rumusan Pancasila terjadi. Dengan wawasan serta pengetahuan yang luas tersebut, mereka juga menyadari bahwa dalam proses perumusan Pancasila harus lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan.

2. Kerja Keras

Sudah dikatakan, bahwa proses perumusan Pancasila merupakan pekerjaan yang sulit dan berat. Semua orang yang berperan di dalamnya harus memeras otak serta mengerahkan segenap kemampuan untuk menggali dasar-dasar negara yang dapat diterima oleh segenap masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam golongan dan suku. Tanpa kerja keras dari para tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila itu, mustahil rumusan dasar negara seperti yang ada sekarang ini terwujud.

3. Rendah Hati

Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila saling berdebat dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang dasar negara. Namun demikian mereka tidak bersikap sombong serta ingin selalu menang sendiri. Ketika di antara pendapat para tokoh itu ada yang lebih sesuai dari segi kepentingan bangsa dan negara, merekapun menerima. Demikian di antara pelajaran penting yang perlu kita teladani.

4. Kuatnya Jiwa Persatuan

Perhatikan kembali saat terjadi perbedaan pendapat antara golongan yang berpaham kebangsaan dengan Islam tentang dasar negara. Ketika itu golongan yang berpaham kebangsaan menghendaki kebangsaan harus menjadi dasar negara. Di pihak lain, golongan Islam juga menghendaki agar ajaran Islam mendasari dalam pendirian negara. Perhatikan juga saat wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia bagian Timur menyatakan keberatan terhadap rumusan sila pertama pada teks Pancasila Piagam Jakarta.

5. Rela Berkorban

Baik sengaja atau tidak sengaja, dalam proses perumusan Pancasila tentu bersinggungan dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Ada kepentingan yang besar, yakni untuk seluruh bangsa. Ada juga kepentingan yang kecil, yakni kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok.

Demi kepentingan yang lebih besar, para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila tidak jarang mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lebih kecil. Inilah salah satu nilai juang para tokoh yang patut kita teladani.

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo mengerjakan tugas kelompok

Banyak peristiwa penting yang dialami para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa-peristiwa tersebut juga mengandung pelajaran yang patut kita jadikan pelajaran. Peristiwa-peristiwa tersebut juga sebagai nilai juang yang patut dicontoh.

Nah dalam tugas kali ini, cobalah kamu uraikan beberapa nilai juang berikut.

Toleransi, menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, anti penjajahan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Kerjakan tugas ini secara kelompok! Susunlah hasil kerja kelompokmu secara tertulis dan kumpulkan gurumu!

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Merumuskan dasar negara adalah tugas berat, karena itu orang bodoh dan ... tidak mungkin dapat melakukannya.
2. Dalam merumuskan dasar negara para tokoh mengutamakan ....
3. Tokoh-tokoh perumus Pancasila tergabung dalam badan bernama ....
4. Para tokoh yang berperan dalam perumus tidak menunjukkan sikap mau menang sendiri, karena mereka memiliki sifat ....
5. Meskipun sulit dan berat, para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila dapat menyelesaikan pekerjaannya, sebab mereka memiliki sikap ....

B. Meneladani Nilai Juang Para Tokoh dalam Proses Perumusan Pancasila

Perhatikan kembali bagaimana liku-liku proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Perhatikan juga para tokoh yang berperan di dalamnya. Berbagai peristiwa yang mencerminkan sikap-sikap misalnya, kerja keras, rendah hati, mengutamakan kepentingan bangsa serta negara, dan lain-lain banyak terjadi.

Lantas, nilai-nilai apakah yang patut kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini dari para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila? Barangkali meliputi hal-hal seperti berikut.

1. Mau Bekerja Keras

Setiap orang memiliki cita-cita serta keinginan-keinginan. Untuk mewujudkan cita-cita serta keinginan tersebut seseorang harus mau bekerja keras. Apakah kamu sudah membiasakan kerja keras dalam mewujudkan cita-cita serta berbagai keinginanmu?

2. Belajar dengan Giat, Rajin, dan Tekun

Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah orang-orang yang memiliki wawasan serta pengetahuan luas. Dengan wawasan serta pengetahuan yang luas mereka pun sukses mempersembahkan suatu karya yang tak ternilai harganya untuk bangsa dan negara.

Apa keteladanan yang perlu kamu ambil dari para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Tidak lain adalah dengan belajar yang giat, rajin, serta tekun. Dengan belajar giat, rajin, serta tekun wawasan dan pengetahuanmu akan bertambah luas.

3. Mau Bertanggung Jawab

Dalam setiap sidang proses perumusan Pancasila tidak semua pendapat para tokoh itu diterima. Namun demikian para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila tersebut tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan sidang. Inilah contoh sikap tanggung jawab yang perlu kita teladani.

4. Menghargai Perbedaan

Dari awal sampai akhir persidangan proses perumusan Pancasila, senantiasa terdapat perbedaan pendapat dan pandangan. Seringkali perbedaan-perbedaan tersebut bahkan memunculkan perdebatan sengit. Akan tetapi semua perbedaan-perbedaan tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan baik.

Mengapa segala perbedaan yang muncul tersebut dapat terselesaikan dengan baik? Tidak lain karena para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila itu senantiasa bersikap menghargai perbedaan-perbedaan. Inilah di antara sikap yang patut kita teladani.

5. Berjiwa Besar

Selain ada pendapat yang disetujui, dalam musyawarah proses perumusan Pancasila tentu ada juga pendapat yang tidak disetujui. Namun demikian mereka yang pendapatnya tidak disetujui tidak merasa kalah atau tidak dihargai. Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila memang memiliki sikap berjiwa besar yang patut menjadi teladan dalam kehidupanmu sehari-hari.

Rangkuman

1. Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan serta berwawasan luas.
2. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi bersamaan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa-peristiwa tersebut perlu menunjukkan nilai-nilai juang penting yang patut kita teladani.
3. Berbagai sikap para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, juga perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.
4. Sikap-sikap para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila banyak menunjukkan nilai-nilai juang yang perlu diteladani.
5. Beberapa contoh nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila, misalnya kerja keras, berjiwa besar, rendah hati, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan lain-lain.

Kegiatan

Bagaimana Pendapatmu?

1. Anton adalah siswa terpandai di kelas enam. Dalam hal prestasi di kelas ia selalu lebih unggul dibanding teman-temannya. Karena itu sering ia meremehkan teman-temannya. Setiap kali teman-temannya mengajak belajar kelompok, ia tidak mau. Ia merasa rugi belajar secara kelompok dengan teman-temannya itu.
   Bagaimana pendapatmu tentang sikap Anton?
2. Samuel, Hasan, Nur Baiti, dan Isna teman sekelas. Mereka berbeda keyakinan satu sama lain. Meskipun demikian mereka juga teman belajar satu kelompok. Seringkali mereka bekerja sama dan saling membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Perbedaan keyakinan di antara mereka tidak menghalangi pertemanan dan kerja sama
   Setujukah kamu dengan sikap Samuel, Hasan, Nur Baiti, dan Isna?

3. Adi termasuk anak miskin dibanding dengan teman-temannya. Ia juga tidak mempunyai cita-cita melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Ia merasa orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk bersekolah lebih tinggi. Namun demikian Adi selalu rajin dan giat belajar. Ia juga rajin dan gemar membaca. Ia berpendapat, dengan rajin membaca pengetahuannya menjadi luas. Akan tetapi, teman-teman Adi sering mencemooh. Menurut teman-teman Adi, pengetahuan dari membaca tidak ada gunanya jika tidak dibarengi sekolah yang tinggi.
   Setujukah kamu dengan pendapat Adi?
   Setuju pulakah kamu dengan sikap teman-teman Adi?
   Mengapa?
4. Tariq, Yusuf, Astuti, dan Rina petugas piket pada pagi itu. Semua tiba di sekolah lebih pagi dari biasanya, kecuali Yusuf. Yusuf tidak dapat berangkat lebih pagi, karena menjaga ibunya yang sedang sakit. Tugas piket pun selesai dan Yusuf tidak dapat menyertai teman-temannya melaksanakan piket. Teman-teman Yusuf pun marah-marah karena Yusuf tidak melaksanakan piket bersama-sama. Mereka tidak menerima alasan Yusuf.
   Setujukah kamu dengan teman-teman Yusuf?

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!

Baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah, banyak nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila yang perlu kamu teladani. Contohnya sikap rendah hati, toleransi, bertanggung jawab, mau bekerja keras, dan lain sebagainya.

Sudahkah kamu membiasakan dengan sikap-sikap keteladanan para tokoh itu? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, cobalah kamu mengisi kolom berikut!

No.	Nilai Juang	Peristiwa
1.	Bertanggung jawab	- Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan
2.	Kerja keras	- ....
3.	Menghargai perbedaan	- ....
4.	Memperluas dan pengetahuan	- ....
5.	Rendah hati	- ....
6.	Rela berkorban	- ....
7.	Toleransi	- ....

Uji Kompetensi

Kerjakan pada buku tugas!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Berikut ini termasuk nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila adalah ....
   a. rendah diri
   b. rendah hati
   c. ingin menang sendiri
   d. merendahkan pendapat orang lain
2. Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara merupakan tugas yang berat. Namun demikian hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan tersebut dapat dikatakan telah menunjukkan sikap ....
   a. rendah hati
   b. menghargai orang lain
   c. kerja keras
   d. toleransi
3. Hasil keputusan musyawarah yang baik akan mencerminkan ....
   a. kemenangan satu pendapat
   b. kemenangan pendapat orang terpandai
   c. kemenangan semua anggota musyawarah
   d. kemenangan pendapat suatu kelompok
4. Dua golongan atau kubu yang saling berdebat seru dalam Panitia Sembilan ....
   a. paham kebangsaan dan agama
   b. Islam dan paham kebangsaan
   c. paham kebangsaan dan Protestan
   d. paham kebangsaan dan Katolik
5. Nilai juang penting dari para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk dilaksanakan seorang pelajar ....
   a. banyak menonton acara televisi
   b. suka menonton film-film luar negeri
   c. giat dan rajin membaca
   d. suka mengikuti berita
6. Sebagai siswa yang memiliki sikap bertanggung jawab, terhadap hasil-hasil keputusan musyawarah seharusnya ....
   a. melaksanakan meskipun tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
   b. tidak perlu melaksanakan
   c. melaksanakan selagi sesuai dengan pendapat yang pernah diusulkan
   d. melaksanakan dengan syarat-syarat

7. Contoh yang menunjukkan kuatnya jiwa persatuan para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila adalah ....
   a. saling mengajukan usul tentang dasar-dasar bagi negara yang merdeka
   b. pembentukan Panitia Kecil untuk perumusan Pancasila
   c. menerima perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta
   d. pengesahan rumusan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
8. Saling tenggang rasa terhadap perbedaan-perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan cermin dari nilai ....
   a. rendah hati
   b. toleransi
   c. mufakat
   d. bertanggung jawab
9. Rumusan yang berbunyi : *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya* terdapat dalam ....
   a. Pembukaan UUD
   b. Pidato Sukarno
   c. Pancasila
   d. Piagam Jakarta
10. Tokoh yang menerima utusan yang mengatasnamakan wakil umat Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia bagian Timur ....
    a. Sukarno
    b. Moh. Hatta
    c. Muhammad Yamin
    d. Ki Bagus Hadikusumo
11. Teladan penting dari para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk mewujudkan cita-cita ....
    a. musyawarah
    b. rendah hati
    c. toleransi
    d. kerja keras
12. *"... kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persetujuan dasar negara yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! ..."*
    Kutipan pidato tersebut pernah diucapkan oleh ....
    a. Muhammad Yamin
    b. Moh. Hatta
    c. Sukarno
    d. Supomo
13. Tokoh ini termasuk kubu yang menghendaki Islam sebagai dasar pendirian negara ....
    a. Supomo
    b. Ki Bagus Hadikusumo
    c. Muhammad Yamin
    d. Abdul Kahar Muzakir
14. Bunyi teks Pancasila yang syah, otentik dan dapat diterima seperti yang kamu hafal sekarang terdapat dalam ....
    a. Piagam Jakarta
    b. UUD 1945
    c. Pembukaan UUD 1945
    d. Proklamasi

15. Nilai juang dalam proses perumusan Pancasila berikut ini dapat kamu teladani ketika menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat dalam musyawarah ....
    a. kerja keras
    b. toleransi
    c. rendah hati
    d. inisiatif

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Sikapmu dalam musyawarah apabila pendapatmu ditolak adalah ....
2. Nilai rendah hati artinya ....
3. Dalam merumuskan dasar negara para tokoh mengutamakan ....
4. Tokoh-tokoh perumus Pancasila tergabung dalam badan bernama ....
5. Merumuskan dasar negara sulit dan berat, karena itu orang bodoh dan ... tidak mungkin dapat melakukan.
6. Para tokoh yang berperan dalam perumus tidak menunjukkan sikap maju menang sendiri karena mereka memiliki sifat ....
7. Meskipun sulit dan berat, para tokoh yang berperan dalam proses perumus Pancasila dapat menyelesaikan pekerjaannya, sebab mereka memiliki sikap ....
8. Bapak proklamator kita adalah ....
9. Pancasila merupakan hasil perumusan ....
10. BPUPKI berdiri pada tanggal ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang kamu ketahui tentang nilai rela berkorban dari peristiwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara?
2. Apa yang kamu ketahui tentang nilai mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan? Berikan contoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara!
3. Berikan contoh nilai kerja keras dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar!
4. Apa yang dimaksud dengan berjiwa besar pada para tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila?
5. Apa yang kamu ketahui tentang sikap bertanggung jawab?

Bab IV Pemilu dan Pilkada

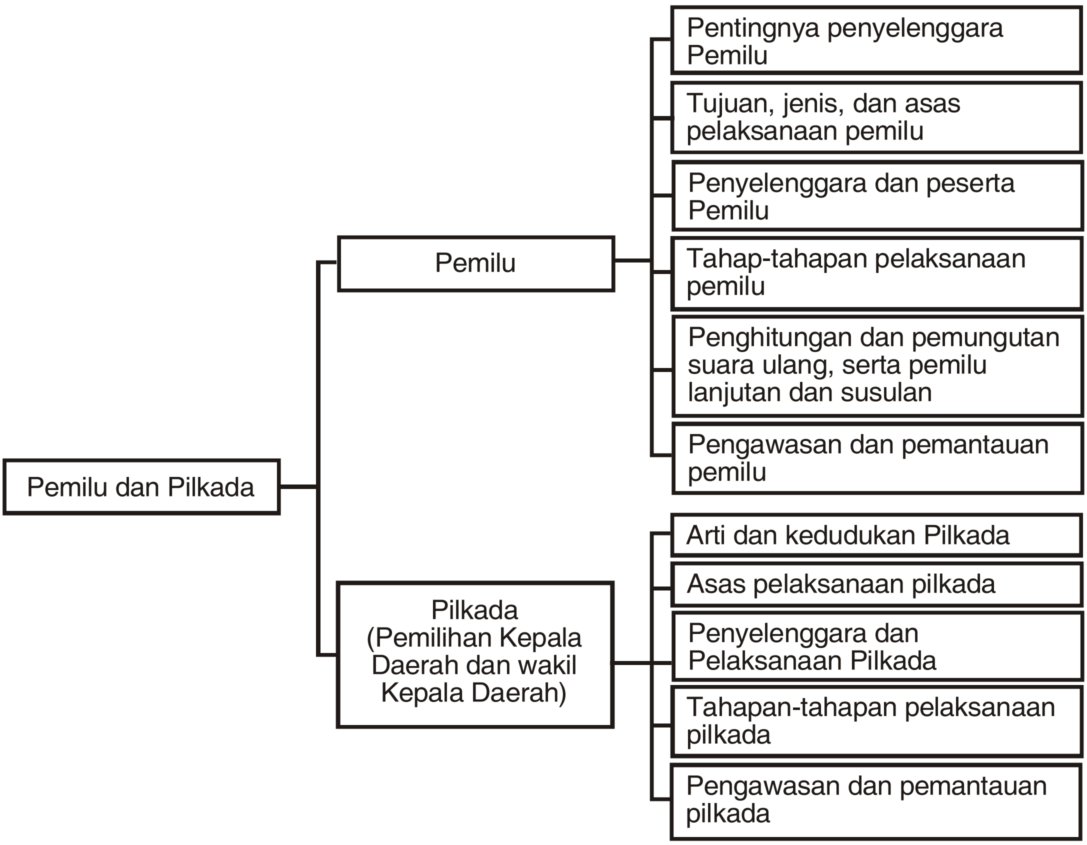


Sumber: www.indonesia.org.bn

Gambar 4.1 Pemilihan umum

Perhatikan gambar di atas! Barangkali kamu sudah tidak asing dengan kegiatan tersebut. Dulu kegiatan seperti itu, hanya berlangsung sekali dalam lima tahun. Saat ini setelah Undang-undang Dasar 1945 diamandemen. Kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung sekali dalam lima tahun.

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia dan
2. menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada.

Kata Kunci

- Pemilu
- Pilkada
- Jenis pemilu
- Peserta pemilu
- Pelaksanaan pemilu
- Perhitungan suara

A. Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilu (Pemilihan Umum) menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Setiap negara-negara yang menganut sistem demokrasi senantiasa akan menyelenggarakan Pemilu (demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat, dan *kratei* yang artinya kekuasaan). Pemilu dalam hal ini merupakan salah satu bagian dari sistem pemerintahan demokrasi.

1. Pentingnya Penyelenggaraan Pemilu

Mengapa Pemilu penting? Tidak lain karena Pemilu sebagai salah satu sarana peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki kedudukan yang penting, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan hak pilih suaranya untuk siapa yang akan memerintah.

Di setiap negara, tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara bersangkutan. Namun demikian prinsip dari Pemilu tersebut kurang lebih sama, yakni pelaksanaan dari sistem demokrasi. Di negara Indonesia Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ketentuan-ketentuannya diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen, pasal 22 E, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu.

2. Tujuan, Jenis, dan Asas Pelaksanaan Pemilu

a. Tujuan Pemilu

Tujuan Pemilu adalah untuk memilih para wakil yang duduk dalam pemerintahan atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pemilu juga bertujuan memilih Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dengan penyelenggaraan Pemilu menandakan, bahwa sistem pemerintahan kita menganut sistem demokrasi.

b. Jenis-jenis Pemilu

Sebagaimana ketentuan UUD 1945 hasil amendemen, ada dua jenis Pemilu. Dua jenis yang dimaksud meliputi :

1) Pemilu Legislatif, yakni untuk memilih para wakil rakyat (DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota).
2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih presiden dan wakil presiden.

c. Asas Pelaksanaan Pemilu

Dalam asas pelaksanaannya, Pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penjelasan dari asas pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Langsung* artinya para warga negara yang telah memiliki hak pilih harus memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2) *Umum* artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai, berhak mengikuti Pemilu. Selain itu, umum juga memiliki pengertian memberi jaminan (kesempatan) secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, maupun status sosial.
3) *Bebas* berarti setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan.
4) *Rahasia* artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya, tidak ada pihak lain yang mengetahui.
5) *Jujur* berarti semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu (aparat, pemerintah, pasangan calon (presiden dan wakil presiden) partai politik, tim kampanye, para pengawas, pemantau, dan lain-lain) harus bertindak jujur sesuai peraturan.
6) *Adil* artinya dalam penyelenggaraannya Pemilu harus terhindar dari berbagai bentuk kecurangan.

3. Penyelenggara dan Peserta Pemilu

Dalam melaksanakan Pemilu tentu saja ada pihak penyelenggara dan ada pula pesertanya. Siapa penyelenggara dan peserta Pemilu itu?

a. Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen pasal 22 E, penyelenggara Pemilu adalah sebuah organisasi mandiri yang bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Susunan keorganisasian KPU tersebut adalah sebagai berikut :

1. KPU Pusat, beranggota 11 orang.
2. KPU Provinsi, beranggota 5 orang.
3. KPU Kabupaten/Kota, beranggota 5 orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota membentuk:

a. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)
b. PPS (Panitia Pemungutan Suara)
c. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

Sebaiknya Kamu Tahu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU

1. **Tugas dan wewenang KPU adalah :**
   a. merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
   b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
   c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
   d. menetapkan peserta Pemilu;
   e. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
   f. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
   g. menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
   h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

2. **Kewajiban KPU**
   a. memperlakukan Pemilu secara adil dan serta guna menyukseskan Pemilu;
   b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
   e. melaporkan penyelenggaraan, Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPR;
   f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; dan
   g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

b. Peserta Pemilu

Peserta pemilu ada dua macam, yakni partai politik dan perseorangan. Peserta partai politik dalam Pemilu adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu peserta perseorangan dalam Pemilu adalah untuk memilih DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Kegiatan

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo menunjukkan contoh

Dalam kaitannya dengan peserta Pemilu, di sekitar tempat tinggalmu mungkin banyak jenis partai politik. Nah, cobalah kamu menunjukkan beberapa contoh partai politik peserta Pemilu (minimal 7 partai politik).

Sebaiknya Kamu Tahu

Syarat-Syarat Peserta Pemilu Menurut UU No. 23 Th. 2003 tentang Pemilu

1. **Partai Politik**

   Untuk dapat menjadi peserta Pemilu partai politik harus memenuhi syarat :

   a. diakui keberadaannya sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik,
   b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi,
   c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
   d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/2000 (seperduaribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik,

e. pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap,
f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

2. **Perseorangan (untuk menjadi anggota DPD)**

Untuk menjadi calon anggota DPD, peserta Pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang pemilih,
b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih,
c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih,
d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 4.000 (empat ribu) orang pemilih,
e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima ribu) orang pemilih, dengan catatan :
    1. tersebar sekurang-kurangnya di 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,
    2. dukungan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah,
    3. seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD.

4. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Pemilu



Sumber: www.indonesia.org.bn

Gambar 4.2 Pelaksanaan pemilu

Ada beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan Pemilu. Tahapan-tahapan yang dimaksud dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi : a) pendaftaran pemilih, b) kampanye Pemilu, c) pemungutan suara Pemilu, d) penghitungan suara, e) penetapan dan pengumuman hasil Pemilu.

a. Pendaftaran Pemilih

Untuk dapat ikut memberikan suara, para calon pemilih Pemilu harus terdaftar. Waktu pendaftaran paling lambat, enam bulan sebelum pelaksanaan Pemilu.

b. Kampanye

Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu, kampanye dilakukan selama 3 minggu dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kampanye merupakan ajakan dari para peserta Pemilu. Kampanye dilakukan untuk meyakinkan para (calon) pemilih serta untuk menjelaskan kepada para (calon) pemilih tentang program, visi, serta misi.

c. Pemungutan Suara

Pemungutan suara merupakan inti dari penyelenggaraan Pemilu. Dalam kegiatan ini para pemilih memberikan suaranya melalui kartu suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sudah disediakan.

d. Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara selesai, proses berikutnya adalah penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan oleh tiap TPS secara terbuka dihadapan saksi dan masyarakat.

e. *Penetapan dan Pemungutan Hasil Pemilu*

Penetapan atau pengumuman hasil Pemilu dilakukan secara nasional oleh KPU. Batas waktu dari penetapan atau pengumuman tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah pemungutan suara.

Untuk lebih jelasnya tentang proses pelaksanaan Pemilu, perhatikan diagram berikut!

Tahapan-tahapan dalam Pemilu

- **Pendaftaran Pemilih** : paling lambat 6 bulan sebelum hari pelaksanaan Pemilu. Bagi warga yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah mempunyai hak pilih.



Sumber: www.indonesia.org.bn

Gambar 4.3 Pendaftaran pemilih

- **Kampanye Pemilu** : selama 3 minggu, dan berakhir 3 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Dalam kampanye masing-masing peserta pemilu meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.



Sumber: www.indonesia.org.bn

Gambar 4.4 Kampanye pemilu

- **Pemungutan Suara** : setiap warga negara yang memiliki hak pilih berhak memberikan suara dalam pemilu. Pemungutan suara dilakukan di TPS (Tempat Pemungutan Sara).



Sumber: www.indonesia.org.bn

Gambar 4.5 Pemungutan suara

- **Penghitungan Suara** : penghitungan suara dilakukan di TPS, dan hasilnya dikirim ke kantor KPU Pusat. Pelaksana pemungutan suara di TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).



Sumber: www.indonesia.org.bn

Gambar 4.6 Penghitungan suara

- **Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu** : selambatnya 30 hari setelah pemungutan suara.

5. Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, serta Pemilu Lanjutan, dan Susulan

Selain bersifat **luber,** dikatakan bahwa asas pelaksanaan Pemilu adalah jujur dan adil. Oleh karena itu ketika di suatu daerah misalnya, terjadi sesuatu peristiwa yang mengganggu kelancaran Pemilu, maka penghitungan dan pemungutan suara ulang bisa dilakukan. Bahkan bisa juga dilakukan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.

a. Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang

Penghitungan suara dari suatu TPS dapat diulang jika menurut penelitian dan pemeriksaan, terjadi penyimpangan dalam penghitungan suara. Sebagai contoh penghitungan dilakukan di tempat tertutup, tidak ada pengawas, saksi, atau warga masyarakat.

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika di suatu tempat terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dipakai, atau pemungutan tidak dapat dilakukan.

b. Pemilu Lanjutan dan Susulan

Jika dalam suatu daerah terjadi peristiwa yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka Pemilu susulan dilakukan. Pemilu lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

Sementara itu Pemilu susulan dilakukan manakala di suatu daerah (pemilihan) terjadi peristiwa yang menyebabkan semua tahapan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

6. Pengawasan dan Pemantauan Pemilu

Agar benar-benar jujur dan adil, maka dalam penyelenggaraan Pemilu juga diikuti kegiatan pengawasan dan pemantauan. Masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pengawasan Pemilu dan Badan Pemantau Pemilu.

a. Panitia Pengawas Pemilu

Panitia pengawas ini dibentuk oleh KPU. Tugasnya menerima dan meneruskan berbagai aduan tentang pelanggaran pelaksanaan Pemilu. Jumlah panitia pengawas Pemilu adalah :

- Panitia pengawas pusat : 9 orang
- Panitia pengawas provinsi : 7 orang
- Panitia pengawas kabupaten/kota : 7 orang
- Panita pengawas Pemilu kecamatan : 5 orang

b. Pemantau Pelaksanaan Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu ada kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh "Pemantau Pelaksanaan Pemilu". Keanggotaan Pemantau ini berasal dari masyarakat, atau bahkan dari perwakilan pemerintahan dari luar negeri.

Kegiatan

Ayo melakukan wawancara

Orang tuamu mungkin sudah beberapa kali mengikuti Pemilu. Nah, untuk kegiatan kali ini cobalah kamu bertanya kepada orang tuamu sendiri tentang hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yang sudah kamu pelajari. Tanyakan juga tentang beberapa perbedaan dengan Pemilu pada masa sebelum tahun 2004. Tulis hasil wawancaramu menjadi laporan tertulis dan konsultasikan dengan gurumu. Selamat bertugas!

Ayo menyatakan setuju dan tidak setuju

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Pemilu dilaksanakan oleh negara yang sistem pemerintahannya demokrasi.		
2.	Ada Pemilu untuk memilih wakil-wakil legislatif, ada juga Pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden.		
3.	Semua warga negara Indonesia dapat memberikan suaranya dalam proses pelaksanaan Pemilu.		
4.	Pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilu dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu.		
5.	Peserta Pemilu hanya partai politik.		
6.	Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Pemilu mencerminkan pemberian ... dari rakyat.
2. Dalam pelaksanaannya Pemilu berasas ....
3. Badan Pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan adalah ....
4. Setiap pemilih memberikan suaranya di ....
5. Nama Badan Penyelenggara Pemilu adalah ....
6. Para pemilih yang akan memberikan suara pada hari pemungutan suara harus sudah ....
7. Lama waktu kampanye Pemilu adalah ....
8. Nama badan yang mengawasi jalannya Pemilu ....
9. Penghitungan ulang suara di suatu TPS dilakukan bila ....
10. Yang menerima dan menyampaikan pengaduan tentang pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu ....

B. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Wilayah Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi. Masing-masing provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Masing-masing provinsi dan kabupaten/kota memiliki sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan pada daerah-daerah provinsi, juga kabupaten/kota ini disebut Pemerintah daerah. Bersamaan dengan itu, gubernur (Kepala pemerintahan provinsi), bupati/walikota (kepala pemerintahan kabupaten/kota) merupakan kepala pemerintahan daerah.

1. Arti dan Kedudukan Pilkada

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah.

Dulu, sebelum UUD 1945 diamandemen, sistem penyelenggaran pemerintahan daerah banyak ditentukan dari pemerintahan pusat. Sekarang, sesudah UUD 1945 diamandemen setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur wilayah pemerintahannya.

2. Asas Pelaksanaan Pilkada

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,** dan **adil (luber** dan **jurdil)**.

3. Penyelenggara dan Pelaksana Pilkada

a. Penyelenggara

Yang menjadi penyelenggara Pilkada adalah KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). Selanjutnya, karena pemerintahan daerah memiliki dua pengertian, yaitu pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka penjelasan mengenai KPUD sebagai penyelenggara Pilkada adalah sebagai berikut.

1) KPUD Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
2) KPUD Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota.

KPUD ini bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota/wakil walikota KPUD bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

b. *Pelaksana*

Pelaksana Pilkada terdiri atas :

1) PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)
   - Kedudukan KPK di kecamatan
   - Anggotanya terdiri atas 5 orang dari tokoh masyarakat
2) PPS (Panitia Pemungutan Suara)
   - Berkedudukan di desa/kelurahan
   - Beranggota 3 orang
   - Bertugas mendaftar pemilih, atau mengangkat pencatat dan pendaftar pemilih
3) KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
   - Beranggota 7 orang
   - Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dari TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Sebaiknya Kamu Tahu

Tugas/wewenang dan kewajiban KPUD dalam Pilkada

Sebagai penyelenggara Pilkada, KPUD mempunyai tugas dan wewenang:

1. merencanakan penyelenggaraan pemilihan,
2. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan,
3. mengatur, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan,
4. menetapkan tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan,
5. meneliti persyaratan partai dan gabungan partai yang mengajukan calon,
6. meneliti persyaratan calon kepala/wakil kepala daerah yang diusulkan,
7. menetapkan pasangan calon yang lebih memenuhi persyaratan,
8. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye,
9. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye,
10. menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan,
11. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan,
12. membentuk PPKS, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya,
13. menetapkan kantor akuntan publik untuk meneliti dana kampanye dan mengumumkan hasilnya.

Selanjutnya, sebagai penyelenggara Pilkada, KPUD berkewajiban:

1. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara,
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan,
3. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan,
4. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD,
5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran,
6. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

4. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Pilkada

Bagaimana proses pemilihan kepala daerah? Berdasarkan pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, tahapan-tahapan Pilkada ada dua. Dua tahap yang dimaksud meliputi :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam Pilkada meliputi :

1) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan.
   - Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah.
   - Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir.
3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada.
   - Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KPUD paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD.
   - Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KPUD kepada DPRD dan Kepala Daerah
4) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Pilkada meliputi : 1) penetapan daftar pemilih, 2) pendaftaran dan penetapan pasangan calon, 3) kampanye 4) pemungutan suara, 5) penghitungan suara, 6) penetapan calon kepala/wakil kepala daerah terpilih, termasuk pengesahan dan pelantikan.

1) *Penetapan Daftar Pemilih*

Proses penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi :

a. *Penyusunan daftar pemilih sementara*
   - Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu terakhir di daerah disertai daftar pemilih tambahan.
   - Bila ada usulan-usulan daftar pemilih sementara masih bisa diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas, dan lain-lain).

b. *Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap*
   - Daftar pemilih sementara akan disusul menjadi daftar pemilih tetap.
   - Daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
   - Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau tempat lain yang strategis.

c. *Pembagian kartu pemilih*
   - Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap.
   - Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/TW.
     - Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara.
     - Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah lagi.

2) *Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon*

Yang mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon ketua/wakil ketua Kepala Daerah adalah partai politik, atau gabungan partai politik.

3) *Kampanye Pilkada*

Kampanye dilakukan Pilkada selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara.

4) *Pemungutan Suara*

Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala/Wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

5) *Penghitungan Suara*

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir.

6) *Penetapan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah*

Pasangan calon kepala/wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan kepala/wakil kepala daerah terpilih.

5. Pengawasan dan Pemantauan Pilkada

a. Pengawasan

Pengawasan pemilihan dalam Pilkada dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang bertanggung jawab dan dibentuk oleh DPRD. Pembentukan panitia ini dilakukan sebelum pendaftaran pemilih dan berakhir 30 hari setelah pelantikan kepala/ wakil kepala daerah.

Jumlah panitia Pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masing-masing 5 orang. Pengawas-pengawas tersebut terdiri atas unsur Kejaksaan, Kepolisian, Perguruan Tinggi, Pers, dan tokoh masyarakat, yang diminta oleh DPRD (DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati). Sedang jumlah pengawas di tingkat kecamatan 3 orang atas usulan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota.

Jika kebetulan pemilihan gubernur/wakil gubernur bersamaan dengan pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota, maka panitia pengawas di tingkat kabupaten dan kecamatan. Di samping sebagai pengawas pemilihan bupati/wakil atau walikota/wakil walikota, juga menjadi pengawas pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Sebaiknya Kamu Tahu

- **Tugas dan Wewanang Panitia Pengawas Pemilihan :**
  1. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan,
  2. menerima laporan terjadinya pelanggaran-pelanggaran,
  3. menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan,
  4. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada yang berwenang, dan
  5. mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawas.
- **Kewajiban Panitia Pengawas :**
  1. memperlakukan pasangan-pasangan calon dengan adil dan setara,
  2. melakukan pengawasan pemilihan secara aktif,
  3. meneruskan temuan dan laporan pelanggaran kepada yang berwenang, dan
  4. menyampaikan laporan tugas kepada DPRD pada akhir tugas.

b. ***Pemantau***

Pemantauan Pilkada dilakukan Pemantau Pemilihan yang anggotanya dari lembaga nonpemerintah dan badan hukum dalam negeri. Pemantau Pemilihan ini diketahui dan menyampaikan hasil kerjanya kepada KPUD (selambatnya 7 hari setelah pelantikan Kepala/Wakil Kepala Daerah).

Rangkuman

1. Pemilu merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan.
2. Di Indonesia Pemilu dilakukan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan, dan juga untuk memilih presiden dan wakil presiden.
3. Peserta Pemilu terdiri atas dua macam, yakni : partai politik dan perseorangan. Peserta Pemilu partai politik adalah untuk memilih DPR dan DPRD. Peserta Pemilu perorangan untuk memilih DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
4. Tahapan-tahapan Pemilu antara lain meliputi:
   - Pendaftaran pemilih
   - Kampanye
   - Pemungutan suara
   - Penghitungan suara dan
   - Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu
5. Pengawasan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh Panitia Pengawasan dengan anggota-anggotanya dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat.
6. Pemantau Pemilu dilakukan oleh Pemantau Pemilihan yang anggota-anggotanya dari lembaga non pemerintah, juga perwakilan dari pemerintahan dari luar negeri.
7. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala/wakil kepala pemerintahan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilihan kepala/wakil kepala daerah adalah pemilihan secara langsung.
8. Pelaksanaan Pilkada, juga Pemilu berasaskan **Luber** dan **Jurdil** (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil).
9. Pengawasan Pilkada dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan dengan tanggung jawab di bawah KPUD.
10. Pemantauan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan yang dibentuk oleh KPUD.

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!
Ayo menyatakan setuju dan tidak setuju!

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Karena belum memiliki hak pilih, kamu tidak perlu mengetahui proses Pilkada.		
2.	Pilkada bukan cermin kedaulatan rakyat.		
3.	Pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada lebih baik dipukul saja.		
4.	Penyelenggaraan Pilkada hanya untuk memilih bupati/wakil bupati saja.		
5.	Kecurangan dalam penghitungan suara penyelenggaraan Pilkada diadukan kepada KPU.		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!
Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Pilkada kependekan dari ....
2. Penyelenggara Pilkada Provinsi adalah ....
3. Asas pelaksanaan dalam Pilkada adalah ....
4. Susunan daftar pemilih sementara dipasang di ....
5. Pelaksanaan kampanye Pilkada selama ....
6. Panitia pengawas Pilkada bertanggung jawab kepada ....
7. Selambat-lambatnya pelaksanaan Pilkada ... sebelum akhir masa jabatan Kepala Daerah.
8. Anggota pemantau berasal dari ....
9. Pasangan calon kepala/wakil kepala daerah dalam Pilkada dipilih secara ....
10. Para pemilih dalam Pilkada memberikan suara di ....

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Saat memberikan suara, seorang pemilihan dalam Pemilu tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Hal tersebut merupakan pengertian dari pelaksanaan asas ....
   a. Langsung
   b. Umum
   c. Bebas
   d. Rahasia
2. Negara yang menyatakan dirinya menganut sistem pemerintahan demokrasi, biasanya akan menyelenggarakan Pemilu, sebab ....
   a. Pemilu memilih wakil-wakil rakyat
   b. Pemilu diikuti seluruh rakyat
   c. Pemilu pelaksanaan dari kedaulatan rakyat
   d. yang berkuasa dalam Pemilu adalah rakyat
3. Badan yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia ....
   a. DPR
   b. MPR
   c. DPRD
   d. KPU
4. Untuk memilih wakil-wakil di DPR atau DPRD seorang pemilih dalam Pemilu akan memilih Pemilu melalui ....
   a. gambar partai politik
   b. gambar perseorangan langsung
   c. nomor peserta calon DPR
   d. nomor urut calon DPR
5. Waktu yang tersedia untuk kegiatan kampanye dalam Pemilu ....
   a. 3 bulan dan berakhir 3 hari sebelum pelaksanaan Pemilu
   b. 3 minggu dan berakhir 2 hari sebelum hari pemungutan suara
   c. 3 minggu dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara
   d. 3 bulan dan berakhir 3 minggu sebelum hari pemungutan suara
6. Badan ini dalam Pemilu bertugas meneruskan laporan tentang pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. Badan tersebut adalah ....
   a. Pengawas Pemilu
   b. Pemantau Pemilu
   c. KPU
   d. PPK

7. Dalam suatu daerah terjadi kekacauan, sehingga beberapa tahapan pelaksanaan Pemilu ada yang gagal dilaksanakan. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, daerah tersebut ....
   a. mengadakan pemilihan ulang
   b. mengadakan pemilihan sosial
   c. Pemilu tidak perlu dilaksanakan
   d. mengadakan Pemilu khusus
8. Jumlah Pengawas Pemilu di tingkat pusat ....
   a. 9 orang
   b. 7 orang
   c. 5 orang
   d. 3 orang
9. Badan yang menyelenggarakan Pilkada gubernur ....
   a. DPD
   b. DPRD
   c. KPUD
   d. Panitia Khusus
10. Penanggung jawab kegiatan kampanye Pilkada ....
    a. DPRD
    b. DPD
    c. pasangan calon
    d. KPUD
11. Penghitungan suara dari TPS dalam Pilkada sah, jika ....
    a. dilakukan terbuka disaksikan masyarakat
    b. dilakukan berulang-ulang
    c. dilakukan dengan hati-hati
    d. dilakukan dengan teliti
12. Dalam Pilkada, kegiatan berikut ini termasuk tahapan persiapan ....
    a. pendaftaran pemilih
    b. kampanye
    c. pembentukan panitia pengawas
    d. pendaftaran calon kepala daerah
13. Termasuk anggota pemantau pemilihan dalam Pilkada ....
    a. Kejaksaan
    b. Kepolisian
    c. organisasi non pemerintah
    d. DPRD
14. Pelaksanaan Pilkada, selambat-lambatnya ....
    a. 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah
    b. 15 hari sebelum barakhirnya masa jabatan kepala daerah
    c. 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah
    d. 25 hari sebelum barakhirnya masa jabatan kepala daerah
15. Berikut adalah petugas yang mendaftar para pemilih dalam Pilkada ....
    a. KPUD
    b. PPK
    c. PPS
    d. KPPS

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Penerapan dari sistem demokrasi Pancasila, yaitu ....
2. Asas pelaksanaan pemilu adalah ....
3. Pelaksanaan pemilu ditetapkan oleh Undang-Undang nomor ....
4. Pemilu yang bertujuan memilih anggota dewan sebagai wakil rakyat disebut ....
5. Kerahasiaan dalam pemilu selalu dijamin, hak itu merupakan asas ....
6. Daerah yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan pemerintah daerahnya sendiri disebut ....
7. Pengawas pemilu di tingkat pusat disebut ....
8. Panitia pemilu di tingkat kecamatan berjumlah ....
9. Syarat pemilih harus berusia minimal ....
10. Salah satu unsur pengawas berasal dari ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan pengertian Pilkada!
2. Apa yang dimaksud dengan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dalam proses Pilkada?
3. Siapa penyelenggara Pilkada?
4. Siapa yang mengajukan pasangan calon kepala/wakil kepala pemerintahan dalam Pilkada?
5. Jelaskan beberapa hal yang merupakan tahap persiapan dalam Pilkada!

Bab V
Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen



Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 5.1 Kegiatan DPR

Kamu barangkali sering melihat kegiatan sebagaimana gambar di atas. Mungkin kamu melihatnya melalui televisi, pada gambar-gambar di koran atau majalah. Siapakah mereka? Apa saja kegiatan yang sedang mereka lakukan?

Peta Konsep

- Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen
  - Pengertian dan jenis-jenis lembaga negara
    - Pengertian lembaga negara
    - Jenis-jenis lembaga negara
  - Lembaga-lembaga menurut UUD 1945 hasil amandemen
    - MPR
    - DPR
    - Presiden dan Wakil Presiden
    - Kementerian-kementerian Negara
    - DPD
    - BPK
    - Mahkamah Agung (MA)
    - Mahkamah Konstitusi (MK)
    - Komisi Yudisial (KY)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia dan
2. mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 sesuai hasil amandemen.

Kata Kunci

- Amandemen
- Lembaga negara
- Wewenang
- Kabinet

A. Pengertian dan Jenis-jenis Lembaga Negara

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat)* dengan sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan (*machstaat*) di bawah satu tangan seorang penguasa. Karena itu dalam sistem pemerintahan, segala macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum (undang-undang). Kekuasaan negara juga dijalankan oleh lembaga-lembaga dengan tata aturan tertentu.

1. Pengertian Lembaga Negara

Secara sederhana lembaga negara adalah badan-badan yang membentuk sistem dan menjalankan pemerintahan negara. Kita tahu, dalam suatu negara modern terdapat pembuat peraturan-peraturan (undang-undang). Dalam negara modern juga ada kepala negara yang menjalankan pemerintahan. Tentu dalam negara modern ada pula yang mengadili ketika terjadi berbagai macam bentuk pelanggaran negara. Nah, yang membuat peraturan-peraturan yang menjalankan pemerintahan, dan yang mengadili pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya dijalankan lembaga-lembaga negara.

2. Jenis-jenis Lembaga Negara

Apa saja jenis-jenis lembaga negara itu? Dalam negara yang bersistem demokrasi paling tidak ada tiga macam lembaga kekuasaan. Masing-masing adalah kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (yang menjalankan undang-undang/pemerintahan), dan kekuasaan yudikatif (yang mengadili atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran undang-undang).

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, MPR, juga DPD. Sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dibantu seorang Wakil Presiden dan para menteri kabinet. Terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA (Mahkamah Agung), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (akan dijelaskan pada uraian selanjutnya).

Kegiatan

Kerjakan di buku tugasmu!
Ayo memberi tanda (✓) cek pada kolom "Benar" dan "Salah"

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Kepala pemerintahan negara Indonesia perdana menteri.		
2.	Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi.		
3.	Lembaga negara merupakan badan-badan yang membentuk penyelenggaraan sistem pemerintahan negara.		
4.	Kepala Pemerintahan Negara Indonesia dipilih rakyat langsung.		
5.	Pemegang kekuasaan tertinggi Negara Indonesia adalah Presiden.		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!
Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Lembaga negara artinya ....
2. Sistem pemerintahan Indonesia ....
3. Kekuasaan legislatif adalah ....
4. Negara Indonesia adalah negara ....
5. Kekuasaan eksekutif artinya ....
6. Segala macam kekuasaan dalam negara Indonesia diatur dengan ....
7. Yang memegang kekuasaan legislatif adalah ....
8. Istilah lain kekuasaan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran undang-undang adalah ....
9. Yang menjalankan kekuasaan eksekutif adalah ....
10. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan ....

B. Lembaga-lembaga Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

Sejak memasuki era reformasi, negara Indonesia memang banyak mengalami perkembangan-perkembangan baru. Salah satu dari perubahan tersebut adalah amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen artinya perubahan. Hingga sekarang UUD 1945 sudah empat kali mengalami amandemen.

Siapa yang mengamandemen UUD 1945 itu? Tidak lain adalah sidang MPR. Dengan amandemen terhadap UUD 1945 itu, lembaga-lembaga negara juga mengalami beberapa perkembangan. Sebagai contoh, ada nama-nama lembaga negara yang baru.

Apa saja lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen? Adalah perubahan-perubahan itu terjadi? Mari kita lihat uraiannya.

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)



Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 5.2 Gedung MPR

MPR adalah majelis (tertinggi) yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena merupakan sebuah majelis, maka kekuasaan MPR, kewenangan-kewenangan MPR baru muncul ketika semua anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam majelis). Sidang MPR ini paling sedikit sekali dalam lima tahun.

Siapa saja anggota MPR? Menurut UUD 1945 hasil amandemen, anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih rakyat melalui Pemilu. Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari 1/2 anggota DPR. Ketentuan tentang keanggotaan MPR ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Apa saja wewenang MPR? Menurut UUD 1945 hasil amandemen wewenang MPR adalah sebagai berikut.

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. Melantik presiden dan/wakil presiden.
c. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

   Masa jabatan anggota MPR dalam satu periode adalah lima tahun.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam Bab VII pasal 19 UU 1945 hasil amandemen. Keanggotaan DPR seperti sudah disinggung di depan, berasal dari partai politik yang dipilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.

Selain DPR, ada pula DPRD. Adakah perbedaannya? Ada, yakni DPR berkedudukan di ibu kota. Anggota DPR secara otomatis juga menjadi anggota MPR. Sementara itu DPRD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

a. Tugas/Wewenang dan Hak-hak DPR

Secara umum tugas/wewenang DPR memegang kekuasaan legislatif, artinya sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 A UUD 1945). Lebih jelasnya tentang tugas/wewenang DPR terdapat dalam 3 fungsi penting sebagai berikut.

1) *Fungsi legislatif*, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden.
2) *Fungsi anggaran*, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.
3) *Fungsi pengawasan*, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.

Selain tugas/kewenangan tadi, anggota-anggota DPR juga memiliki hak-hak penting (Pasal 20A UUD 1945). Hak-hak yang dimaksud adalah sebagaimana berikut.

1) Hak Interpelasi
   Yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
2) Hak Angket
   Yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/presiden.
3) Hak Inisiatif
   Yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/presiden.

4) Hak Amandemen
   Yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan Undang-Undang).
5) Hak Budget
   Yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
6) Hak Petisi
   Yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.

b. Persidangan DPR

Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR paling sedikit adalah sekali dalam satu tahun. Tentu saja hal itu terjadi jika tidak adahal-hal penting yang memaksa, atau keadaan pemerintahan berjalan normal. Jika ada hal-hal yang memaksa, misalnya presiden melanggar undang-undang dan mengkhianati negara, maka DPR dapat mengadakan sidang sewaktu-waktu.

3. Presiden dan Wakil Presiden



Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 5.3 Presiden

Menurut Bab III pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali pada pembahasan tentang Pemilu).

a. Presiden

Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja (pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen).

Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni 1) sebagai kepala negara dan 2) sebagai kepala pemerintahan.

1) *Presiden sebagai Kepala Negara*

Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.

a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).
b) Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).
c) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).
d) Mengangkat duta dan konsul.
e) Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
f) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

2) *Presiden sebagai Kepala Pemerintahan*

Sebagai kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.

a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
b) Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
c) Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
d) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Sebaiknya Kamu Tahu

Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden

Menurut pasal 7A, Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat berupa :

- Pengkhianatan terhadap negara
- Melakukan korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat yang lain
- Melakukan perbuatan tercela
- Terbukti tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden/Wakil Presiden

Sebelum diajukan ke MPR, usulan DPR tentang pemberhentian Presiden/ Wakil Presiden harus lebih dulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk diperiksa, diadili serta diputuskannya.

b. Wakil Presiden

Karena dalam praktiknya dipilih melalui Pemilu dalam satu paket dengan Presiden, maka kedudukan Wakil Presiden tentunya bukan lembaga yang berdiri sendiri. Seperti sudah disinggung, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Namun demikian kedudukan Wakil Presiden adalah strategis. Mengapa? Tidak lain karena dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat menggantikan kedudukan Presiden. Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan : ”apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”

Kegiatan

Ayo melakukan diskusi

Apabila melihat tugas/wewenang kekuasaan Presiden dan DPR, sedikit atau banyak ternyata saling kait mengait ketika membuat undang-undang. Contohnya, undang-undang yang diajukan Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Sementara undang-undang yang dibuat oleh DPR nantinya juga harus mendapat persetujuan Presiden.

Apakah presiden juga bisa disebut sebagai pemegang kekuasaan legislatif? Diskusikan di depan kelas!

4. Kementerian Negara

Menteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu Presiden (Bab V pasal 17 UUD 1945). Para menteri itu duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden. Kita tahu, seorang Presiden tidak mungkin dapat mengatasi segala bidang yang dibutuhkan dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu dalam kerjanya ia dibantu oleh para menteri-menteri itu.

Mereka para menteri itu ada yang memimpin sebuah departemen ada juga yang tidak memimpin departemen. Menteri dalam negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, misalnya, adalah contoh-contoh dari menteri-menteri yang memimpin sebuah departemen. Sementara menteri-menteri seperti kepariwisataan, lingkungan hidup, kesekretariatan negara/kabinet, misalnya merupakan contoh dari menteri-menteri yang tidak memimpin departemen.

Jumlah menteri-menteri yang duduk dalam kabinet tentu saja merupakan bagian dari kewenangan serta hak prerogatif (hak khusus) Presiden. Semua disesuaikan dengan tingkat tuntutan-tuntutan perkembangan yang dihadapi. Berapakah jumlah menteri-menteri yang duduk dalam kabinet sekarang?

5. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum, yakni dalam Bab VII pasal 22 C dan pasal 22 D.

Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali Bab Pemilu). Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
b. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

6. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri. Artinya dalam menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengaruh pemerintah. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan dari DPD. Hasil kerja dari BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, juga DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Badan ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Lembaga ini juga dikenal sebagai lembaga eksaminatif.

7. MA (Mahkamah Agung)



Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 5.4. Gedung MA

MA (Mahkamah Agung) merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman (Bab IX pasal 24 ayat 2). Keberadaan lembaga ini sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan.

Mengapa MA disebut sebagai lembaga tertinggi? Tidak lain karena merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir. Jika misalnya seseorang berpekara di peradilan pertama (Pengadilan Negeri) kurang puas terhadap keputusan yang diperoleh, maka ia akan naik banding ke peradilan di atasnya lagi (Pengadilan Banding). Jika masih kurang, maka ia dapat mengajukan lagi ke peradilan MA ini.

MA diketuai oleh seorang Hakim Agung dibantu oleh hakim-hakim agung. Menurut UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri negara yang diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR tersebut berasal dari usulan Komisi Yudisial. (akan dibahas dalam uraian berikutnya).

8. MK (Mahkamah Konstitusi)

MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA (Bab IX pasal 24 ayat 2). Lembaga negara ini termasuk baru. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk :

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
b. memutus sengketa kewenangan,
c. memutus perselisihan hasil Pemilu, dan
d. memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden terhadap UUD.

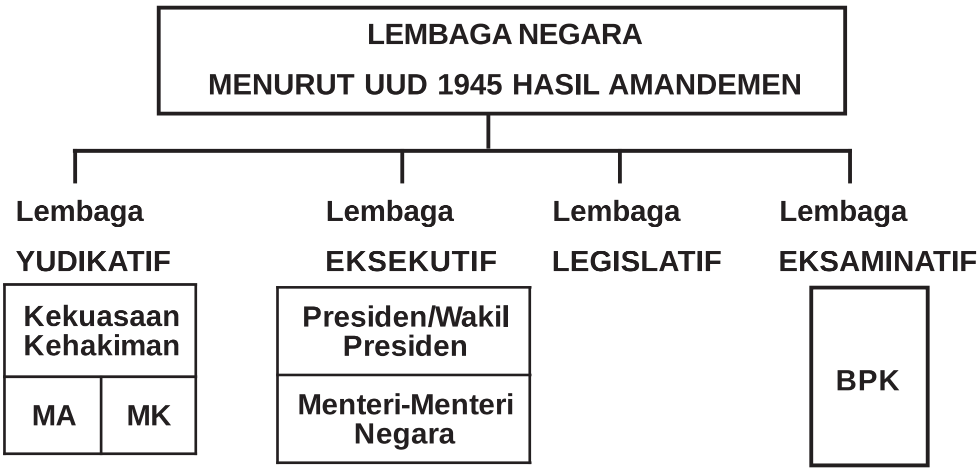
MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas : 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.

9. KY (Komisi Yudisial)

Seperti MK, KY (Komisi Yudisial) juga merupakan lembaga negara yang termasuk baru. Sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2004, lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim. Selain itu lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan. Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, kedudukan KY ini diatur dalam pasal 24 B. Lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Adanya komisi ini, diharapkan penyelenggaraan peradilan terhindar dari praktik-praktik kotor.

Skema lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen:



Rangkuman

1. Lembaga negara merupakan badan-badan yang membentuk sistem kekuasaan negara.
2. Dalam UUD 1945 hasil amandemen terdapat beberapa lembaga negara yang termasuk baru bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Dari segi kewenangan kedudukan lembaga-lembaga negara paling tidak terdiri dari tiga macam, yaitu lembaga negara legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap undang-undang).
4. MPR merupakan penjelmaan dari kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, sebab anggota-anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR, dan DPD yang dipilih oleh rakyat secara langsung.
5. MPR, DPR, dan DPD termasuk lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif.
6. Presiden/Wakil Presiden memegang kekuasaan eksekutif, dan dalam sistem pemerintahan RI mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam masa jabatannya, Presiden/Wakil dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan kepada negara pelanggaran berat atas usulan DPR kepada MPR.
7. MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial) merupakan pemegang kekuasaan yudikatif, MA dan MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.
8. Anggota Mahkamah Agung maksimal 60 Hakim Agung, sedangkan anggota Mahkamah Konstitusi ada 9 orang, masing-masing : 3 orang diajukan DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden, serta 3 orang lagi diajukan oleh MA.

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!
Ayo menyatakan setuju dan tidak setuju.
Berilah tanda (✓) cek pada kolom "setuju" dan "tidak setuju"

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Tidak ada lembaga negara baru dalam UUD 1945 hasil amandemen.		
2.	Kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden/Wakil Presiden.		
3.	DPD ditunjuk oleh Presiden.		
4.	DPR sedikitnya bersidang satu kali dalam satu tahun.		
5.	Presiden kadang berfungsi sebagai badan legislatif.		
6.	Dengan adanya Mahkamah Konstitusi sistem peradilan menjadi makin bersih.		
7.	Mahkamah Agung diketahui seorang Hakim Agung.		
8.	DPD berkedudukan di provinsi.		
9.	Ada menteri-menteri yang memimpin suatu departemen.		
10.	Tugas BPK adalah mengelola keuangan negara.		

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Dengan segala aturan mengenai kekuasaan, negara Indonesia termasuk negara ....
   a. kekuasaan
   b. hukum
   c. kerajaan
   d. kekaisaran
2. Nama lain dari lembaga negara yang menjalankan undang-undang/ pemerintahan ....
   a. legislatif
   b. eksekutif
   c. yudikatif
   d. eksaminatif
3. Hak untuk meminta keterangan pada DPR terhadap presiden ....
   a. amandemen
   b. interpelasi
   c. angket
   d. budget
4. Lembaga negara ini berkedudukan sebagai kepala negara dan pemerintahan ....
   a. DPR
   b. MA
   c. Presiden
   d. BPK
5. Lembaga negara ini sebagai penjelmaan dari kedaulatan seluruh rakyat Indonesia ....
   a. DPR
   b. MA
   c. Presiden
   d. MPR
6. Presiden memiliki hal istimewa, misalnya dalam menentukan ....
   a. amandemen
   b. interpelasi
   c. prerogatif
   d. angket
7. Lembaga ini memegang dan melaksanakan kekuasaan kehakiman ....
   a. DPR
   b. MA
   c. Presiden
   d. BPK
8. Termasuk lembaga negara baru yang sebelumnya belum pernah ada dalam konstitusi ....
   a. MPR, DPR, BPK
   b. MK, MPR, DPD
   c. MA, MK, KY
   d. DPD, MK, KY
9. Lembaga negara berikut dipilih langsung perorangan oleh rakyat melalui Pemilu, dan berkedudukan di setiap provinsi ....
   a. MA
   b. DPR
   c. DPD
   d. Presiden
10. Lembaga ini sebagai pembantu Presiden, dapat meneruskan masa jabatan Presiden sampai habis masa jabatannya ....
    a. menteri negara
    b. wakil presiden
    c. MA
    d. KY

11. Dalam masa jabatannya Presiden dapat diberhentikan, apabila ....
    a. tertuduh mengkhianati negara dan UUD
    b. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai Presiden
    c. dianggap melanggar sumpah
    d. sakit keras
12. Lembaga ini mempunyai wewenang memutus tentang perselisihan hasil pemilu ....
    a. DPR
    b. MPR
    c. MA
    d. KY
13. Lembaga ini memiliki kekuasaan membuat undang-undang ....
    a. DPR
    b. MPR
    c. MA
    d. KY
14. Lembaga ini kedudukannya mandiri, dan bisa dinamakan lembaga eksaminatif ....
    a. DPR
    b. MPR
    c. BPK
    d. DPD
15. Lembaga yang anggota-anggotanya menjadi MPR secara otomatis ....
    a. DPRD
    b. DPD
    c. BPK
    d. MA

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Lembaga yang memiliki kekuasaan membuat Undang-Undang adalah ....
2. Negara Indonesia adalah negara ....
3. Sistem pemerintahan Indonesia adalah ....
4. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan ....
5. Yang memegang kekuasaan yudikatif adalah ....
6. Kepala pemerintahan negara Indonesia dipimpin oleh seorang ....
7. Hak untuk meminta keterangan pada DPR terhadap Presiden disebut hak ....
8. Presiden Indonesia mempunyai jabatan selama ... tahun.
9. Lembaga negara ini sebagai penjelmaan dari kedaulatan seluruh rakyat Indonesia adalah ....
10. Kekuasaan legislatif dipegang oleh ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan tiga macam hak yang dimiliki DPR!
2. Bagaimana proses pemilihan DPR?
3. Kapan Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan?
4. Apa tugas dan wewenang Komisi Yudisial?
5. Apa yang kamu ketahui tentang Mahkamah Konstitusi?

Bab VI
Pemerintah Pusat dan Daerah



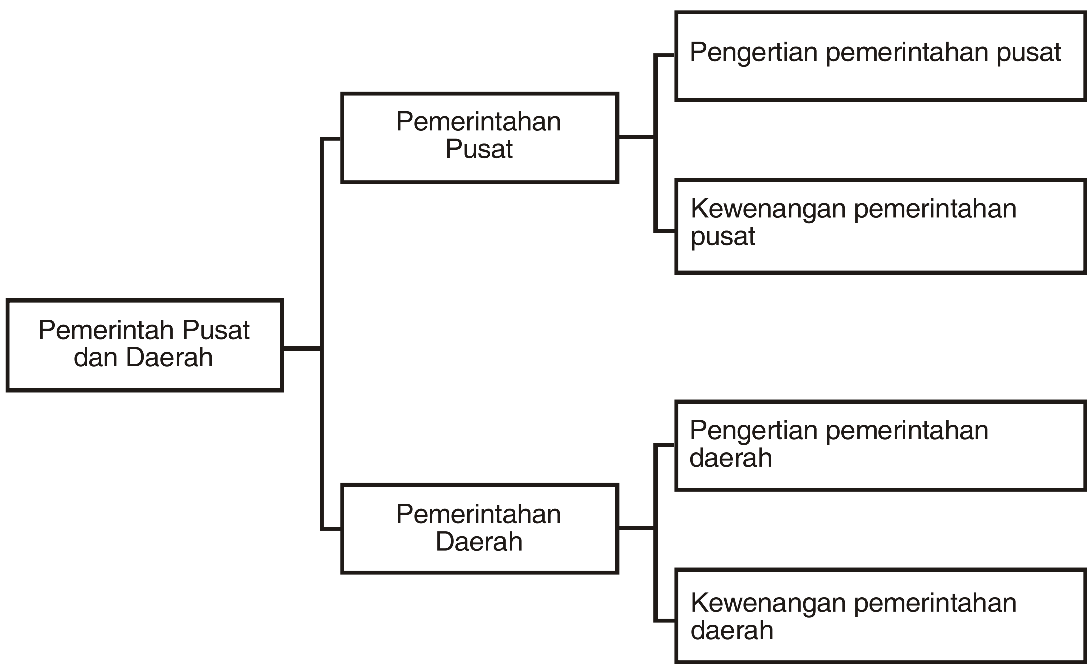
Sumber: www.okuse.net

Gambar 6.1 Kantor Bupati

Di provinsi mana kamu tinggal? Siapa nama gubernurnya? Apa nama kabupaten/kota tempat tinggalmu? Siapa pula nama bupati/walikotamu?

Di mana pun provinsi atau kabupaten/kota kamu bertempat tinggal itu tidak menjadi masalah. Sebab apapun nama provinsimu, atau kabupaten/kotamu semua merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia dan
2. mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah.

Kata Kunci

- Pemerintahan pusat
- Pemerintahan daerah.

A. Pemerintahan Pusat

Siapa nama Presiden dan Wakil Presiden kita sekarang? Berapa jumlah menteri-menteri negara pembantu Presiden saat ini? Di mana keberadaan Presiden/Wakil juga menteri negara tersebut?

1. Pengertian Pemerintahan Pusat



Sumber: www.okuse.net

Gambar 6.2 Istana negara

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

2. Kewenangan Pemerintah Pusat

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan juga beraneka ragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Apalagi, UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah meliputi sebagai berikut.

a. Urusan Politik Luar Negeri

Sebagai contoh misalnya soal mengangkat diplomatik atau duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri, dan lain-lain.

b. Urusan Pertahanan

Contohnya soal pembentukan angkatan bersenjata, menyatakan daerah/negara dalam keadaan bahaya, pengembangan sistem pertahanan dan persenjataan, dan lain-lain.

c. Urusan Keamanan

Sebagai contoh menyangkut pembentukan kepolisian negara, penetapan peraturan keamanan nasional, mendidik pelanggar hukum negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, dan lain-lain.

d. Urusan Yustisi

Yakni yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti, pendirian peradilan, pengangkatan hakim-hakim peradilan, mendirikan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain.

e. Urusan Agama

Sebagai contoh pemberian pengakuan terhadap suatu agama, menetapkan hari libur agama secara nasional, menyelenggarakan kehidupan keagamaan, dan lain-lain.

f. Urusan Moneter

Yakni urusan keuangan dan fiskal.

Kegiatan

Kerjakan di buku tugas!
Ayo menyatakan setuju dan tidak setuju.
Berilah tanda (✓) cek pada kolom ”setuju” dan ”tidak setuju”

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak setuju
1.	Otonomi berarti kekuasaan untuk mengatur urusan daerah sendiri.		
2.	Segala urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan pusat.		
3.	Mengadakan perjanjian dengan negara lain bukan kewenangan pemerintahan pusat.		
4.	Pemerintahan pusat terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden saja.		
5.	Karena asas otonomi, organisasi yang membahayakan keamanan negara di suatu daerah, juga menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah.		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan pada buku tugas!
Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ada pemerintahan ... dan ....
2. Presiden dibantu oleh seorang ....
3. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden juga dibantu oleh ... negara.
4. Urusan politik luar negeri menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan contohnya ....
5. Setiap provinsi terbagi menjadi daerah ....
6. Pemerintahan pusat berarti pemerintahan secara ....
7. Contoh urusan pertahanan seperti ... menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
8. Pemerintahan pusat berkedudukan di ....
9. Dalam Undang-undang Nomor ... tercantum urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
10. Urusan Agama yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat contohnya ....

B. Pemerintahan Daerah

”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Demikian salah satu bunyi UUD 1945 hasil amandemen pada bab VI pasal 18 ayat 1.

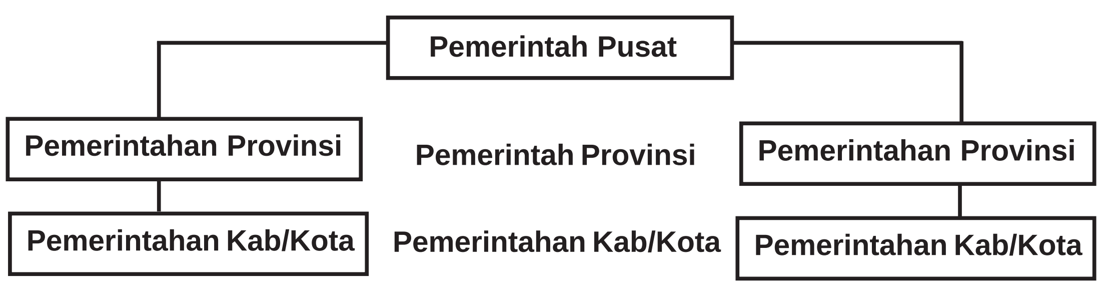
Lantas, apa yang dimaksud pemerintahan daerah itu?

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 dikatakan, ”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

”Selanjutnya tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa, ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota ...”

Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah daerah beserta DPR Daerah. Maka, pemerintahan daerah provinsi adalah Gubernur beserta DPRD Provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota beserta DPRD Kabupaten/Kota. Perhatikan bagan di bawah ini!



2. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Secara umum, kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004, ada kewenangan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan.

Kewenangan bersifat wajib maksudnya adalah yang mencangkup semua urusan pemerintahan dalam ukuran daerah. Sementara kewenangan yang bersifat pilihan adalah meliputi segala urusan pemerintahan yang secara nyata ada serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing.

Rangkuman

1. Wilayah Negara kesatuan RI terbagi menjadi daerah-daerah provinsi.
2. Tiap daerah provinsi terbagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota.
3. Pemerintahan pusat adalah perangkat Negara Kesatuan RI, yakni Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara.
4. Pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota.
5. Setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan-kewenangan yang bersifat wajib dan pilihan.

Sebaiknya Kamu Tahu

Kewenangan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Wajib

Kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, baik itu pemerintahan Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut.

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

9. Pemberian fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertahanan.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan berbagai pelayanan dasar yang lain.
16. Pelayanan berbagai urusan yang diamanatkan perundang-undangan.

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo mencatat hasil pengamatan sederhana!

Kamu bertempat tinggal di provinsi, kabupaten, atau kota mana? Amatilah baik-baik hal maupun peristiwa di sekitarmu. Perhatikan mana yang menurutmu merupakan kewenangan pemerintahan pusat dan daerahmu sendiri! Catatlah hasil pengamatan sederhana itu, dalam tabel berikut!

No.	Contoh	Kewenangan Pusat	Kewenangan Daerah
1.	Seragam sekolah	Pusat	Daerah
2.	Libur hari besar nasional	....	....
....		....	....
....			

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh ....
   a. gubernur
   b. bupati
   c. walikota
   d. DPRD
2. Termasuk bagian dari pemerintah pusat ....
   a. DPRD
   b. DPD
   c. menteri negara
   d. MPR
3. Berikut ini merupakan bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ....
   a. peraturan lalu lintas
   b. penyelenggaraan Puskesmas
   c. mendirikan gedung Pengadilan Negeri
   d. membuat pos kepolisian
4. Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh ....
   a. Bupati
   b. Walikota
   c. DPRD
   d. DPD
5. Penyelenggaraan administrasi tiap penduduk dengan kartu tanda penduduk (KTP), termasuk kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat ....
   a. wajib
   b. pilihan
   c. sukarela
   d. tidak memaksa
6. Setiap pemerintahan daerah memiliki ....
   a. DPD
   b. DPRD
   c. Gubernur
   d. Bupati
7. Perangkat pemerintahan daerah dipilih dengan ....
   a. Pemilu
   b. Pilkada
   c. langsung oleh rakyat daerah
   d. sistem perwakilan
8. Daerah kota dipimpin oleh seorang ....
   a. bupati
   b. gubernur
   c. walikota
   d. DPD
9. Karena Kabupaten A letaknya di pesisir pantai, maka kabupaten banyak mendirikan sekolah yang berhubungan dengan usaha-usaha perikanan laut. Kabupaten A dalam hal ini telah mengembangkan kewenangan daerah yang bersifat ....
   a. wajib
   b. pilihan
   c. anjuran
   d. perintah

10. Berikut ini termasuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu ....
    a. politik luar negeri
    b. kerjasama antardaerah
    c. perbaikan jalan desa
    d. pembuatan saluran irigasi daerah
11. Pemerintahan pusat terdiri atas ....
    a. Presiden dan wakil Presiden
    b. Presiden dan DPR
    c. DPR dan MPR
    d. MPR dan BPK
12. Badan yang menyelenggarakan Pemilu adalah ....
    a. DPR
    b. BPR
    c. KPU
    d. MPR
13. Lembaga yang sebagai pemegang kekuasaan yudikatif adalah ....
    a. MA
    b. DPR
    c. MPR
    d. DPD
14. Anggota Mahkamah Konstitusi terdiri atas ... orang.
    a. 6
    b. 7
    c. 8
    d. 9
15. Lembaga negara yang bertugas mengawasi para hakim adalah ....
    a. MA
    b. DPR
    c. MK
    d. KY

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh ....
2. Pemerintah pusat berkedudukan di ....
3. Dalam Negara Kesatuan RI ada pemerintahan ... dan ....
4. Pemerintahan pusat terdiri atas ... dan ....
5. Kekuasaan untuk mengatur urusan daerah sendiri disebut ....
6. Pemerintahan daerah kabupaten dipimpin oleh seorang ....
7. Setiap pemerintahan daerah memiliki ....
8. Daerah kota dipimpin oleh seorang ....
9. Pemerintahan provinsi dipimpin oleh ....
10. Wilayah negara RI terbagi menjadi ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang kamu ketahui tentang pemerintahan pusat?
2. Sebutkan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib pemerintahan daerah (minimal 5)!
3. Sebutkan salah satu bunyi pasal dalam UUD 1945 yang mengandung pengertian penyelenggaraan pemerintahan daerah (satu ayat saja)!
4. Apa saja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (sebutkan minimal 3)!
5. Apa yang kamu ketahui tentang kewenangan pilihan pemerintahan daerah?

Uji Kompetensi Semester Gasal

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Jumlah anggota BPUPKI seluruhnya kurang lebih ....
   a. 60 orang
   b. 64 orang
   c. 67 orang
   d. 70 orang

2. Tokoh yang menyampaikan pokok-pokok pikiran dasar negara serta menyebutkan lima dasar negara sebagai Pancasila adalah ....
   a. Sukarno
   b. Muh. Yamin
   c. Moh. Hatta
   d. Supomo

3. Pada tahap ini proses perumusan Pancasila masih berupa usulan-usulan mengenai dasar negara tanggal ....
   a. 28 Mei - 1 Juni 1945
   b. 22 Juni 1945
   c. 10 - 11 Juli 1945
   d. 18 Agustus 1945

4. Dalam lembaga ini dasar-dasar negara Pancasila mulai dibicarakan. Lembaga yang dimaksud adalah ....
   a. BPUPKI
   b. PPKI
   c. DPR
   d. MPR

5. Tugas Panitia Kecil dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah ....
   a. menyusun kembali tentang usulan-usulan dasar negara
   b. membuat aturan main proses penyusunan Pancasila
   c. merumuskan kembali pidato Sukarno
   d. meneliti usulan-usulan dasar negara

6. Yang termasuk anggota Panitia Sembilan adalah ....
   a. Muhammad Yamin
   b. Kasman Singodimejo
   c. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat
   d. R. Pandji Suroso
7. Tanggal lahirnya istilah Pancasila ....
   a. 29 Mei 1945
   b. 1 Juni 1945
   c. 22 Juni 1945
   d. 10 Juli 1945
8. Tidak ada anggota yang merasa kalah dalam musyawarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, meskipun pendapat-pendapat di antara mereka tidak disetujui. Hal tersebut merupakan nilai ....
   a. rendah hati
   b. mufakat
   c. berjiwa besar
   d. kerja keras
9. Rumusan dasar negara yang sempat menjadi perdebatan panjang dan sengit hingga akhir penetapan tanggal 18 Agustus 1945 ....
   a. sila pertama
   b. sila kedua
   c. sila ketiga
   d. sila keempat dan kelima
10. Terhadap kepentingan yang lebih besar, seharusnya kita menunjukkan sikap ....
    a. mempertahankan pendapat sendiri
    b. menghargai pendapat
    c. rela berkorban
    d. merasa paling benar pendapatnya
11. Tokoh berikut ini pernah menyatakan keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta ....
    a. Sukarno
    b. Muhammad Yamin
    c. Ki Bagushadikusumo
    d. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat

12. *Dokuritsu Junbi Cosakai* merupakan lembaga buatan Dai Nippon. Dalam bahasa kita lembaga tersebut dikenal dengan ....
    a. PPKI
    b. BPUPKI
    c. Panitia Kecil
    d. Panitia Sembilan
13. Kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara RI berada di tangan ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. rakyat
14. Badan yang menyelenggarakan Pemilu secara nasional adalah ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. KPU
    d. DPD
15. Berikut ini yang termasuk perangkat pemerintahan pusat adalah ....
    a. DPR, MPR, dan DPD
    b. Presiden dan menteri negara
    c. Presiden dan MA
    d. Badan Pemeriksa Keuangan
16. Anggota lembaga negara ini secara otomatis menjadi anggota MPR adalah ....
    a. DPD
    b. BPK
    c. MA
    d. KPU
17. Berikut ini termasuk kewenangan wajib pemerintah daerah adalah ....
    a. mengelola pendidikan
    b. membuat program sesuai potensi daerah setempat
    c. mengadakan perjanjian dengan pihak luar negeri
    d. membuat peraturan lalu lintas
18. Lembaga negara berikut ini sebagai pemegang kekuasaan yudikatif adalah ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. MA

19. Lembaga negara ini bersidang paling sedikit sekali dalam lima tahun, dan merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. BPD

20. Wilayah Indonesia terbagi atas daerah-daerah ... dan selanjutnya terbagi menjadi daerah kabupaten/kota.
    a. otonomi
    b. provinsi
    c. pusat
    d. pemerintahan

21. Yang mempunyai wewenang memberikan tanda jasa, gelar, serta lain-lain tanda kehormatan adalah ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. Presiden RI

22. Ada peserta pemilu yang bersifat perorangan, ada pula peserta yang berupa partai politik. Peserta pemilu yang berupa partai politik untuk memilih ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. Presiden
    d. DPD

23. Lembaga ini memiliki kewenangan menguji secara materi atas suatu Undang-Undangan terhadap UUD adalah ....
    a. Presiden
    b. MA
    c. MK
    d. DPD

24. Lembaga yang menjadi wakil daerah dalam MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah ....
    a. DPRD
    b. DPR
    c. Utusan Daerah
    d. DPD

25. Anggota MK (Mahkamah Konstitusi) terdiri atas ... orang.
    a. 6
    b. 7
    c. 8
    d. 9

26. Anggota DPD setiap daerah jumlahnya sama, yaitu ... orang.
    a. 4
    b. 5
    c. 6
    d. 7

27. Lembaga negara yang bertugas mengawasi para hakim adalah ....
    a. MA
    b. MK
    c. KY
    d. DPR

28. Untuk menunjukkan nilai kerja keras sebagai seorang pelajar adalah ....
    a. bercita-cita setinggi mungkin
    b. mematuhi nasihat guru
    c. belajar dengan giat dan rajin
    d. menjadi siswa berprestasi

29. Sikap bertanggung jawab pada diri seorang siswa di sekolah dapat diwujudkan melalui ....
    a. selalu belajar dengan tekun
    b. taat kepada semua tata tertib
    c. belajar rajin ketika menghadapi ulangan
    d. membantu teman mengerjakan PR

30. Seluruh hasil-hasil sidang BPUPKI disahkan pada tanggal ....
    a. 15 Agustus 1945
    b. 16 Agustus 1945
    c. 17 Agustus 1945
    d. 18 Agustus 1945

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pekerjaan yang sulit dan berat, namun akhirnya terwujud juga karena ....
2. Pilkada dan Pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan ....
3. Lembaga negara artinya ....
4. Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila tetap melaksanakan keputusan hasil musyawarah meskipun tidak sesuai kepentingan-kepentingannya karena mereka memiliki sikap ....
5. Pemegang kekuasaan Yudikatif dalam sistem pemerintahan NKRI adalah ....

6. Banyak debat yang seru dan sengit dalam proses perumusan Pancasila. Akan tetapi para tokoh tidak menunjukkan sikap ingin menang sendiri, sebab mereka memiliki sikap ....
7. Pemilu di tanah air Indonesia diadakan setiap ... sekali.
8. Dalam proses perumusan Pancasila para tokoh yang berperan di dalamnya lebih mengutamakan kepentingan ....
9. Pemerintahan daerah adalah perangkat ... dan DPRD.
10. Wakil umat Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia keberatan dengan rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Karena itu, demi keutuhan bangsa dan negara, sila tersebut kemudian diubah rumusannya seperti bunyi yang sekarang. Ini adalah contoh nilai .... para tokoh dalam proses perumusan Pancasila.

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang kamu ketahui tentang nilai berjiwa besar?
2. Jelaskan dua golongan yang saling berbeda pendapat dalam proses perumusan Pancasila pada sidang-sidang Panitia Sembilan!
3. Apa yang kamu ketahui tentang kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan?
4. Apa yang kamu ketahui Komisi Yudisial?
5. Apakah selama masa jabatannya Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan?

Bab VII
Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

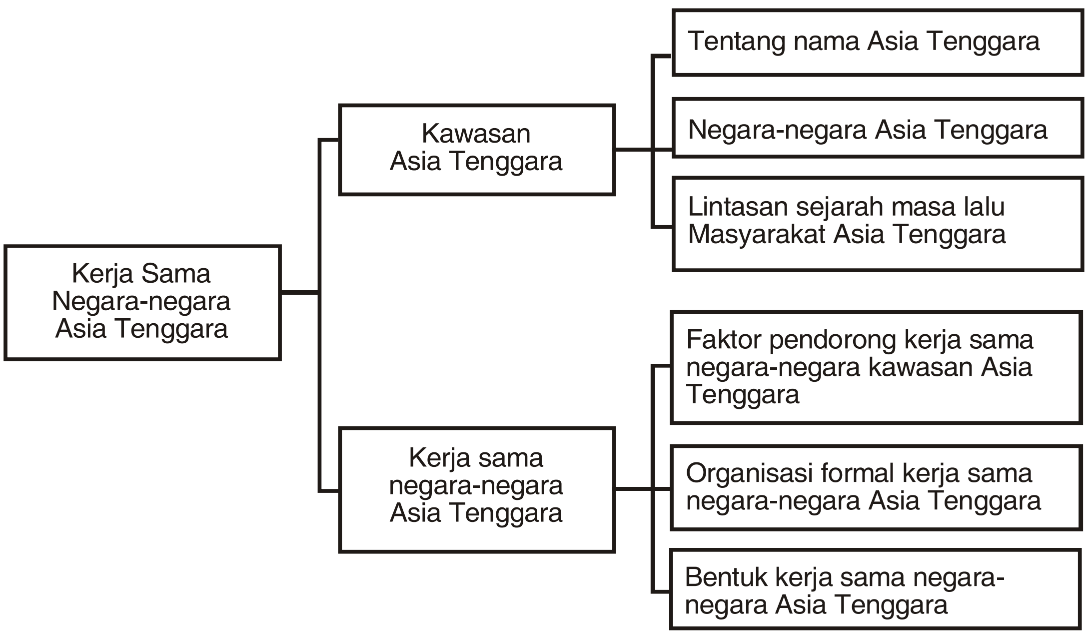


Sumber: www.intranet.usc.edu.au

***Gambar 7.1** Kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara*

Pernahkah kamu mendengar istilah kerja sama negara-negara ASEAN? Pernahkah kamu mengikuti siaran langsung tentang pesta olahraga negara-negara ASEAN? Apa yang kamu ketahui tentang ASEAN?

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

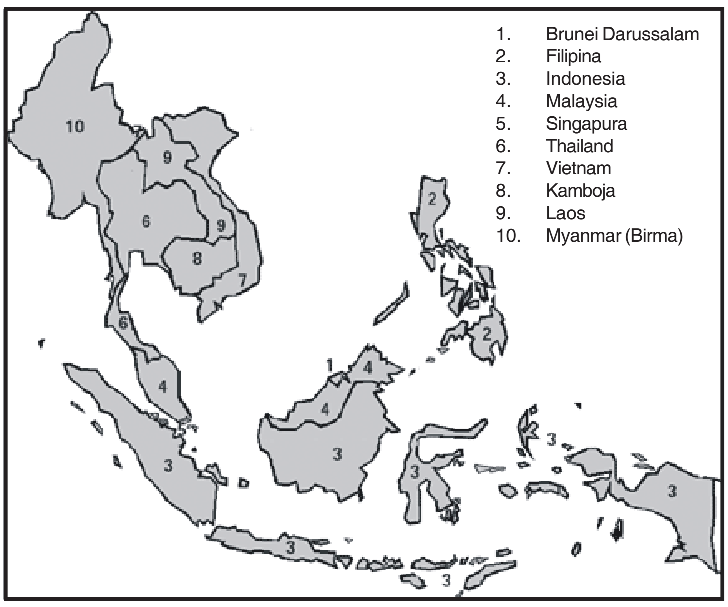
Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. menjelaskan kawasan Asia Tenggara;
2. menyebutkan negara-negara kawasan Asia Tenggara;
3. menggambarkan kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara; dan
4. memberikan contoh bentuk-bentuk kerja sama negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci

- India jauh
- Sejarah
- Geografis
- Organisasi
- Regional
- Kooperatif
- Kerja sama

A. Kawasan Asia Tenggara



Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)

Gambar 7.2 Peta Asia Tenggara

1. Tentang Nama Asia Tenggara

Nama Asia Tenggara pertama kali muncul kurang lebih pada abad ke-20. Sebelumnya Asia Tenggara dikenal dengan nama **India Jauh** (jika dibandingkan dengan anak benua India). Kawasan ini meliputi semenanjung Indocina, Melayu, serta beberapa kepulauan di sekitarnya.

Secara astronomis letak kawasan Asia Tenggara berada di antara 29° LU - 11° LS dan 93° BT – 141° BT. Sedangkan secara geografis letak kawasan Asia Tenggara adalah: Sebelah utara berbatasan dengan Cina. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Sebelah barat dan selatan masing-masing berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Dewasa ini kawasan Asia Tenggara terdiri atas sebelas negara. Negara-negara yang termasuk dalam kawasan tersebut ada yang berbentuk kepulauan dan daratan. Negara-negara yang termasuk kepulauan adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, juga yang terbaru Timor Leste (dulu menjadi bagian dari wilayah Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur). Sementara negara-negara yang termasuk daratan adalah Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar (Burma).

Karena kondisi geografis yang berdekatan dengan India dan China, kawasan ini banyak terpengaruh oleh kebudayaan dua negara tersebut. Dalam perjalanan lebih lanjut di kawasan ini juga berkembang unsur-unsur budaya Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang muslim dari Gujarat (sekarang Pakistan). Posisi Selat Malaka yang merupakan urat nadi jalur perdagangan sejak berabad-abad lalu dan masih bertahan hingga sekarang, tampaknya menjadi faktor pentingnya.

2. Negara-negara Asia Tenggara

Seperti sudah disinggung, kawasan Asia Tenggara terdiri atas beberapa negara, baik itu negara kepulauan maupun daratan. Untuk lebih jelasnya, uraian tentang negara-negara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indonesia



Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)

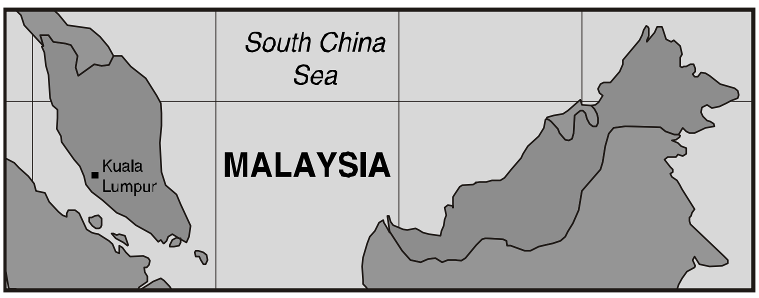
Gambar 7.3 Peta Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya paling luas (± 5.193.252 km^2). Penduduk negara Indonesia jumlahnya juga paling banyak (± 203.456.055 jiwa). Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau (± 13.000 pulau) besar dan kecil, terbentang dari Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam) hingga Merauke (Papua). Keadaan alamnya subur serta berlimpahan aneka kekayaan alam perairan, daratan, juga bermacam-macam jenis bahan tambang/galian.

Karena kekayaan alam yang melimpah ruah itulah orang-orang Eropa (Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol) datang silih berganti di bumi Nusantara (cikal bakal Indonesia). Kolonial Belanda menjajah Nusantara ± selama 350 tahun dan Jepang 2,5 tahun.

Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pengakuan atas kemerdekaan tersebut dari Belanda diperoleh tanggal 17 September 1949. Bentuk negara Indonesia adalah Republik, dan beribu kota Jakarta.

b. Malaysia



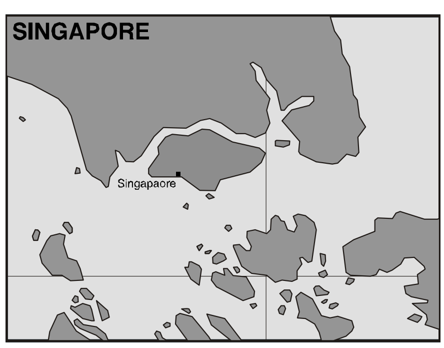
Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)

Gambar 7.4 Peta Malaysia

Malaysia merupakan negara tetangga terdekat Indonesia. Negara ini biasa disebut dengan *Negeri Jiran.* Kita semua tahu, sebagian wilayah negara ini berada di bagian paling utara Pulau Kalimantan (Sabah dan Serawak). Sementara yang sebagian lagi dari Pulau Kalimantan itu merupakan wilayah RI.

Dulu Malaysia dijajah oleh bangsa Inggris, dan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Ibu kota negeri ini adalah Kuala Lumpur. Mayoritas penduduk Malaysia adalah bangsa Melayu, karena itu banyak memiliki persamaan akar kebudayaan dengan negara kita (Ingat, akar dari bahasa nasional kita juga bahasa Melayu!). Hasil utama negeri itu timah, minyak bumi, karet, juga kelapa sawit.

c. Singapura



Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)

Gambar 7.5 Peta Singapura

Di kawasan Asia Tenggara Singapura tergolong negara kecil. Akan tetapi negeri tersebut menjadi pusat perdagangan internasional. Penghasilan utama negara ini juga bukan berasal dari hasil bumi (melainkan industri obat-obatan, barang-barang elektronik/ jasa dan transportasi). Tidak heran jika Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara.

Dalam catatan sejarah, dulu sebelum menjadi pusat perdagangan, Singapura bernama Tumasik atau Temasek (sebuah perkampungan yang pada abad ke-13 menjadi wilayah kerajaan Sriwijaya, dan pada abad ke-14 dihancurkan Majapahit). Pada awal abad ke-19 Singapura berada di bawah Kesultanan Johor. Pada tahun 1819 Sir Stamford Raffles datang ke Singapura untuk membangun basis perdagangan bagi *English East India*.

Bulan September 1963 Singapura merdeka di bawah federasi negara Malaysia. Selanjutnya karena perbedaan politik, terhitung sejak 9 Agustus 1965 Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Negara ini beribu kota Singapura.

d. Thailand

Konon, Thailand berarti tanah bangsa yang merdeka. Mungkin benar, sebab Thailand merupakan satu-satunya bangsa di kawasan Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh bangsa asing.



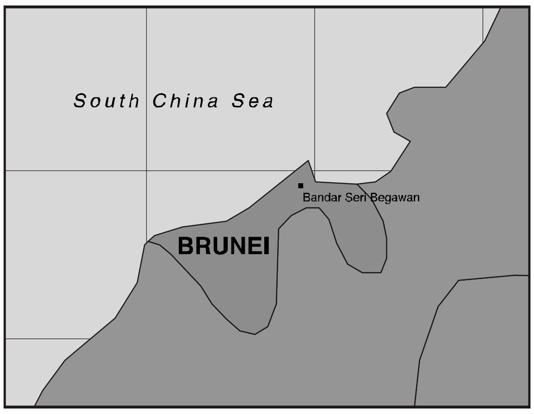
Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)
Gambar 7.6 Peta Thailand

Bentuk pemerintahan negara Thailand adalah kerajaan konstitusional. Kepala negaranya seorang raja, sedang kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri. Thailand terkenal dengan sebutan Negeri Gajah putih, Negeri Seribu Pagoda, dan Negeri Jubah Kuning.

Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Penghasilan utama negeri ini di bidang pertambangan adalah timah, mangaan, dan tembaga. Sedang penghasilan utama di bidang pertanian adalah beras, jagung, karet, dan kelapa.

Di kawasan Asia Tenggara, Thailand merupakan penghasil beras terbesar. Karena itu negeri ini mendapat sebutan lumbung padi di Asia. Selain itu, industri penting di negeri Thailand adalah gula. Tidak heran jika Indonesia juga sering mengimpor gula dan beras dari negeri ini.

e. Brunei Darussalam



Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)
Gambar 7.7 Peta Brunei Darussalam

Letak negara Brunei di bagian utara Pulau Kalimantan. Bentuk negara Brunei adalah kesultanan (monarki) dan dipimpin oleh seorang Sultan. Negeri ini dulunya merupakan jajahan Inggris. Akan tetapi terhitung sejak tanggal 1 Januari 1984 Brunei menjadi negara merdeka dengan Ibu kota Bandar Seri Begawan. Penghasilan utama negeri kesultanan ini adalah minyak bumi dan gas alam.

f. Filipina



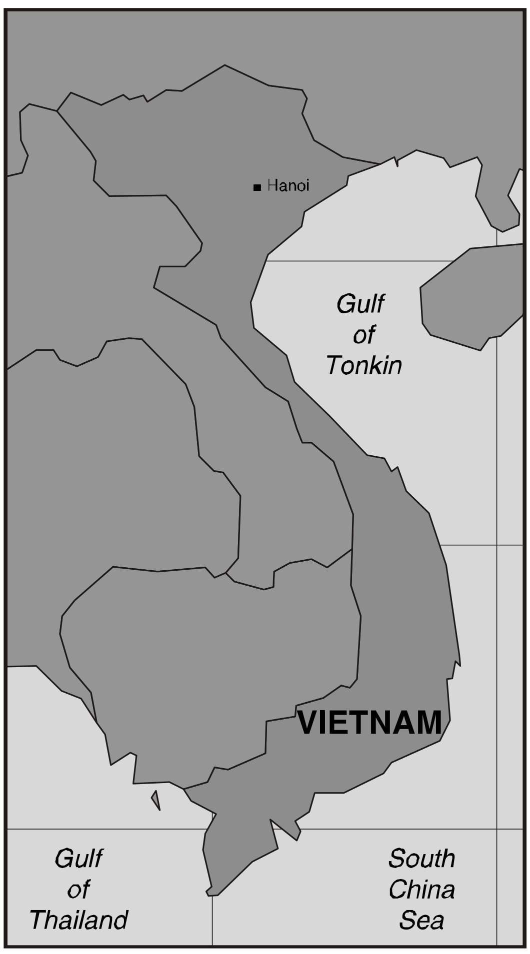
Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)
Gambar 7.8 Peta Filipina

Filipina termasuk negara kepulauan dengan luas wilayah ± 400.440 km^2. Hasil utama negeri ini di antaranya adalah emas dan tembaga (bidang tambang). Sedang di bidang pertanian, Filipina adalah penghasil kopra dan nanas. Di kota Los Bannos terdapat lembaga penelitian padi internasional yang bernama IRRI (*International Rice Reserch Institute*).

Dulu, Filipina merupakan jajahan bangsa Spanyol dan Amerika Serikat. Sejak 12 Juni 1898 Filipina resmi menjadi negara merdeka. Namun kemerdekaan ini berumur pendek. Waktu itu negara yang menjajah Filipina (Spanyol) menjual kepada Amerika Serikat.

Filipina memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya pada tanggal 4 Juli 1946. Bentuk negara Filipina adalah republik dan Manila adalah ibukotanya. Dalam negerinya, Filipina mempunyai masalah yakni Bangsa Moro di Pulau Mindanao yang ingin memerdekakan diri.

g. Vietnam

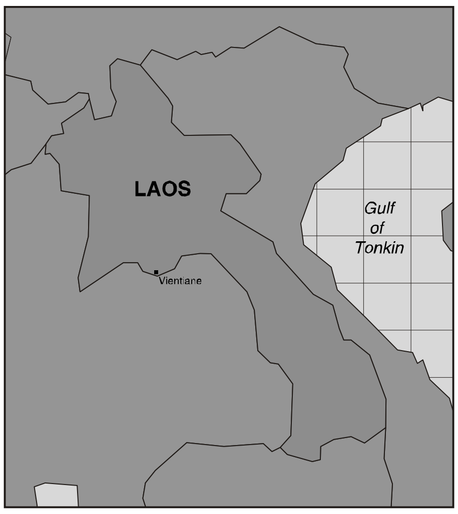


Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)
Gambar 7.9 Peta Vietnam

Negara Vietnam terletak di kawasan Indocina. Vietnam adalah negara bekas jajahan Prancis. Terhitung sejak 2 September 1945, negeri ini menjadi bangsa yang merdeka. Akan tetapi dalam kemerdekaan tersebut Vietnam terpecah menjadi dua bagian (Vietnam Utara dan Vietnam Selatan). Penyebab perpecahan tersebut adalah perbedaan ideologi. Karena perbedaan ideologi itulah, akhirnya terjadi perpecahan dan perang saudara.

Sejak tahun 1975 Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu kembali menjadi satu negara Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Hasil utama negeri ini adalah padi, kayu, kelapa, dan teh (bidang pertanian). Sementara di bidang tambang hasil utamanya adalah emas, bijih besi, dan timah. Kota terbesar negeri ini adalah Saigon (sekarang Ho Chi Minh), sedangkan sungai yang terkenal adalah Mekong.

h. Laos

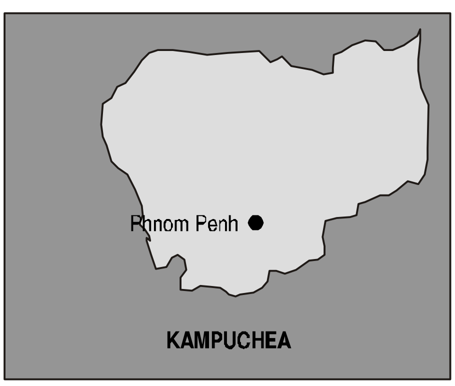


Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)
Gambar 7.10 Peta Laos

Negara ini berada dalam kawasan Indocina. Terletak di antara sungai Mekong dan pegunungan Annam. Laos merupakan bekas jajahan Prancis. Terhitung sejak 19 Juli 1949 Laos menjadi negara yang merdeka dengan ibukota Viantiane.

Luas wilayah negara Laos ± 326.804 km^2, dan sebagian wilayahnya masih berupa hutan rimba serta perbukitan dan gunung. Maka keadaan pembangunan ekonomi negeri ini termasuk negara yang tertinggal di kawasan Asia Tenggara.

i. Kamboja

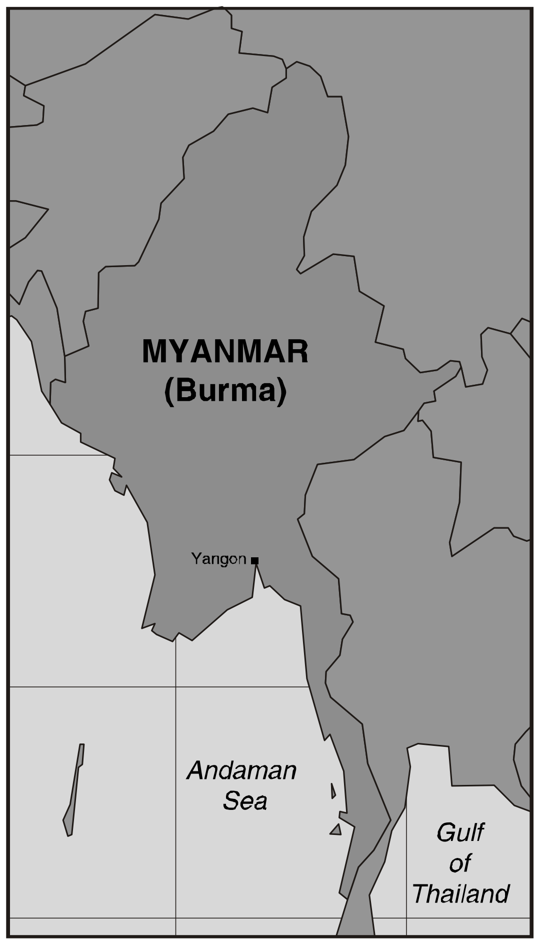


Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)
Gambar 7.11 Peta Kamboja

Bentuk pemerintahan negeri ini adalah kerajaan (monarki). Kepala pemerintahan-nya seorang perdana menteri. Kamboja terletak di bagian selatan semenanjung Indocina dengan luas wilayah ± 181.035 km^2.

Kamboja merupakan negara bekas jajahan Prancis. Terhitung sejak 7 April 1949 Kamboja menjadi negara yang merdeka. Ibukota negara ini adalah Phnomp Penh. Hasil utama negeri ini adalah padi, karet, dan kapas. Di negeri ini ada peninggalan penting kebudayaan kuno, yakni candi Angkor Wat dan Angkor Tom.

j. Myanmar (Burma)



Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)

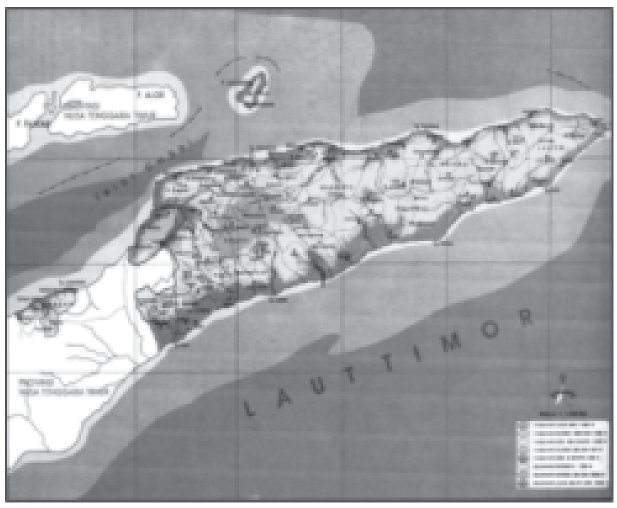
Gambar 7.12 Peta Myanmar

Myanmar (dulu bernama Burma) merupakan negara bekas jajahan Prancis. Letak negeri ini di bagian barat laut Semenanjung Indo Cina. Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik dan ibukotanya Yangoon, dengan luas wilayah 678.576 km^2.

Saat ini Myanmar masih dikuasai oleh junta militer. Ibu kotanya yang sekarang pindah di Niyap Nyidaw. Di Myanmar juga terdapat seorang perempuan yang terkenal sebagai tokoh demokrasi (menentang pemerintah junta militer), yakni Aung San Suu Kyi.

k. *Timor Leste*

Dulu Timor Leste adalah bagian dari wilayah RI, yakni provinsi Timor Timur. Melalui Jajak pendapat yang diadakan pada tahun 1998, akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari pemerintahan RI dan menjadi negara merdeka dan berdiri sendiri. Timor Leste beribukota di Dilli.



Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia (Repro Penerbit)

Gambar 7.13 Peta Timor Leste

3. Lintasan Sejarah Masa Lalu Masyarakat Asia Tenggara

Jalinan hubungan, serta pergaulan antarmasyarakat Asia Tenggara sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Kerajaan besar Sriwijaya dan Majapahit misalnya, mempunyai hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di kawasan Asia Tenggara. Dalam sejarah, Sriwijaya pernah menjadi pusat perdagangan dan agama Buddha di Asia Tenggara. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan sesudahnya (kerajaan-kerajaan Islam) seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, dan lain-lain, juga menjadi pusat-pusat kegiatan hubungan kerja sama di kawasan ini.

Kebudayaan masyarakat kawasan Asia Tenggara diwarnai oleh masuknya unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha, Cina, juga Islam. Unsur-unsur kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Unsur-unsur kebudayaan Cina dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina. Terakhir, unsur-unsur kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat dan Arab (Hadramaut).

Berbagai jalinan hubungan kerja sama antar bangsa Asia Tenggara tadi (termasuk juga dengan bangsa-bangsa Asia yang lain) didasarkan atas beberapa prinsip. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah saling menghormati dan memberi kemanfaatan/ keuntungan (mutualisme), mengupayakan kemakmuran, ketenteraman, serta kedamaian.

Jalinan hubungan antarbangsa Asia Tenggara dengan beberapa prinsip tadi berjalan cukup lama. Akan tetapi setelah kedatangan bangsa-bangsa kolonial Barat hubungan-hubungan tadi menjadi berantakan. Bukan itu saja, silang sengketa juga sempat terjadi pada saat awal berdirinya negara-negara baru (yang merdeka), terutama menyangkut kekuasaan wilayah masing-masing negara.

Sebaiknya Kamu Tahu

Hubungan Antarmasyarakat Asia Tenggara Sampai Masa Kolonialisme

Apabila dirinci, hubungan-hubungan antarmasyarakat di kawasan Asia Tenggara hingga datangnya kolonialisme (Barat) dapat diperiodisasikan sebagai berikut:

1. **Zaman Prehistoris**

   Jalinan hubungan antarbangsa Asia Tenggara zaman prehistoris terjadi ± tahun 500 SM. Jalinan hubungan tersebut tumbuh oleh sebab ditemukannya teknologi pembuatan alat-alat dari perunggu di Vietnam Utara. Teknologi perunggu itu dikenal dengan Kebudayaan Dongson. Ditemukannya tong perunggu di China misalnya, membuktikan pengaruh Kebudayaan Dongson menyebar ke negara-negara di sekitarnya, yakni kawasan Asia Tenggara.

2. **Zaman Kerajaan Hindu dan Buddha**

   Hubungan antarmasyarakat Asia Tenggara juga terjadi pada saat bangsa India mulai berlayar. Bangsa India berlayar ke kawasan Asia Tenggara untuk berdagang rempah-rempah, emas, dan cendana. Hubungan dagang ini juga diikuti masuknya budaya India seperti bahasa Sanskerta, agama, seni, dan arsitektur. Ketika itu budaya India masuk dan berkembang di Kamboja, Campa, Semenanjung Malaka, Indonesia, Myanmar, dan Thailand.

   Kerajaan-kerajaan hasil dari masuknya budaya India yang berdiri di Asia Tenggara bahkan mewariskan kebudayaannya pada generasi sekarang. Kejayaan kerajaan masa itu bisa ditilik dari peninggalan Candi Borobudur dan Prambanan (Indonesia), Angkor Wat (Kamboja), Lopburi dan Ayuthia (Thailand), dan Pagan (Myanmar). Beberapa warisan budaya itu memiliki kemiripan dari ukiran relief candi yang bersumber pada ajaran Hindu dan Buddha.

   Bukan itu saja. Hubungan antarmasyarakat di Asia Tenggara juga terjalin dalam bidang religi. Candi Borobudur dulu pernah menjadi pusat sekolah agama Buddha yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Para pelajar datang dari berbagai negara untuk memperdalam ilmu religi. Contoh nyatanya adalah kehadiran Atisa (nama lengkapnya Atisa Dipamkara Shrijnana yang lahir di India) untuk belajar agama Buddha di Borobudur.

Atisa mempelajari Bodhicitta di Indonesia selama 12 tahun, di bawah bimbingan Dharmarakshita yang dikenal oleh orang Tibet dengan nama Serlingpa. Ilmu yang diperoleh oleh Atisa kemudian dibawa ke Tibet. Ajaran Atisa, konon berkembang dan menjadi besar hingga kini. Guru besar agama Buddha itu ternyata pernah belajar di Sumatra selama dua tahun dan kemudian datang ke Borobudur karena di sanalah pusat untuk belajar agama Buddha.

3. **Zaman Kerajaan Islam**

Saat Islam mengembangkan pengaruhnya, antarmasyarakat Asia Tenggara juga saling menjalin hubungan dan kerja sama dengan baik. Ada kerajaan Islam di Malaka (Malaysia), Pahang, Patani (Thailand), Sulu (Filipina), masyarakat Phanrang (Vietnam), Demak Banten, Gowa, dan Aceh (Indonesia). Mereka menjalin hubungan dan bekerja sama terutama untuk menghadapi bangsa-bangsa Barat yang mulai berdatangan dan menjadi kendala hubungan perdagangan. Kita tahu orang-orang Barat tersebut menghendaki monopoli perdagangan. Demikian sekilas hubungan antarmasyarakat Asia Tenggara dalam sejarah masa lalu sampai datangnya orang-orang Barat.

(*Sumber*: Agung Setyahadi (2006) dan Azyumardi Azra (1989)).

Kegiatan

Kerjakan di buku tugasmu!
Ayo menyatakan Setuju dan Tidak Setuju
Berilah tanda (✓) cek pada kolom ”setuju” dan ”tidak setuju”

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Mayoritas negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki persamaan nasib, yakni sebagai bangsa-bangsa yang pernah dijajah.		
2.	Di kawasan Asia Tenggara Indonesia menjadi negara paling maju.		
3.	Malaysia merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang wilayahnya amat berdekatan dengan negara RI.		
4.	Singapura pernah menjadi wilayah bagian negara RI.		
5.	Brunei Darussalam merupakan salah satu negara monarki di kawasan negara-negara Asia Tenggara.		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!
Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Di bagian timur kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan ....
2. Negara terbaru di kawasan Asia Tenggara yang dulunya bagian dari wilayah RI adalah ....
3. Negara paling luas wilayahnya di kawasan Asia Tenggara adalah ....
4. Di bagian utara kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan ....
5. Negara kawasan Asia Tenggara yang mendapat sebutan Negeri Jiran adalah ....
6. Dulu kawasan Asia Tenggara bernama ....
7. Kebudayaan di negara-negara kawasan Asia Tenggara banyak dipengaruhi oleh kebudayaan ....
8. Negara kawasan Asia Tenggara yang termaju adalah ....
9. Negeri Gajah Putih adalah sebutan bagi negara ....
10. Negara baru di kawasan Asia Tenggara yang dulunya bagian wilayah RI adalah ....

B. Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Kerja sama berarti saling berhubungan, saling membuat jalinan dan saling dukung mendukung untuk kepentingan bersama serta saling menguntungkan. Kerja sama dalam perdagangan, pendidikan, keamanan bersama, kebudayaan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan untuk kepentingan bersama dan saling menguntungkan.

Kerja sama antarnegara-negara kawasan Asia Tenggara sudah lama dilakukan, baik itu secara formal maupun non formal.

1. Faktor-faktor Pendorong Kerja Sama Negara-negara Kawasan Asia Tenggara

Sebuah negara tidak mungkin hidup menyendiri. Setiap negara butuh hubungan dan kerja sama dengan negara lain dalam berbagai hal. Apalagi jika negara-negara tersebut saling berdekatan wilayahnya seperti di kawasan Asia Tenggara ini. Sebagai contoh, kerja sama bidang perdagangan (untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi), kerja sama bidang keamanan dan ketertiban, dukungan politik internasional, dan masih banyak lagi.

Mengapa kerja sama antarnegara-negara kawasan Asia Tenggara penting? Berdasar pengalaman masa lalu hingga saat ini, paling tidak terdapat beberapa faktor penting. Beberapa faktor penting yang dimaksud paling tidak meliputi:

a. *Faktor Kesamaan Nasib dan Sejarah*

Semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara sama-sama mengalami penjajahan oleh bangsa lain (kecuali Thailand). Selain itu bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sudah lama menjalin hubungan baik. Ingat, dulu pernah berkembang dua kerajaan besar yang menyatukan bangsa-bangsa di kawasan ini yakni Kerajaan Sriwijaya (abad ke-5) yang berpusat di Palembang dan Kerajaan Majapahit (± abad ke-7) yang berpusat di pulau Jawa. Bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara dewasa ini mayoritas juga sebagai negara berkembang (kecuali Singapura).

b. *Faktor Kedekatan Geografis*

Bagaimanapun, wilayah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, saling berdekatan satu sama lain (perhatikan kembali peta negara-negara di kawasan Asia Tenggara!). Karena itu demi terjaganya stabilitas pada masing-masing negara di kawasan ini butuh jalinan kerja sama yang baik dan terus-menerus.

c. *Faktor Strategisnya Letak Kawasan*

Sejak dulu, kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu-lintas internasional yang ramai. Barangkali hal tersebut wajar, sebab letak kawasan ini memang strategis. Namun demikian letak yang strategis ternyata mempunyai sisi positif dan negatif.

Sisi positifnya mempercepat perkembangan di segala bidang kehidupan. Sementara itu, sisi negatifnya terjadi berbagai jenis perselisihan atau sengketa regional akibat perbedaan-perbedaan kepentingan masing-masing negara. Contoh konkritnya, Indonesia dan Malaysia pernah mengalami ketegangan politik. Contoh lain, antara Malaysia dan Filipina, juga Singapura, pernah dilanda perselisihan (sengketa soal wilayah Sabah dan Serawak, di bagian utara Pulau Kalimantan).

Sisi negatif yang lain? Letak kawasan yang strategis adalah negara-negara kawasan Asia Tenggara rawan menjadi ajang persaingan kepentingan-kepentingan yang datang dari luar. Selain itu, kawasan Asia yang strategis tersebut juga menjadi rawan akan munculnya berbagai bentuk kemerosotan moral serta budaya.

Sebaiknya Kamu Tahu

Bentuk Kerja Sama Antarnegara

Dewasa ini, kerja sama antarnegara dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Masing-masing dari bentuk kerja sama tersebut adalah:

1. **Kerja sama bilateral**, yakni kerja sama yang melibatkan dua negara. Contoh kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
2. **Kerja sama multilateral**, yakni kerja sama yang melibatkan beberapa/banyak negara. Contoh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
3. **Kerja sama regional**, yakni kerja sama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN/*Association of South East Asian Nations* (Kerja sama antar bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara), Liga Arab (kerja sama antar bangsa-bangsa arab).

2. Organisasi Formal Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Menyadari berada dalam satu kawasan, bagaimanapun kerja sama antarnegara-negara Asia Tenggara sangatlah penting. Akan tetapi, (sebelum tahun 1960-an) wadah atau organisasi formal dari kerja sama tersebut belum terbentuk.

Lantas bagaimana sejarah perjalanan pembentukan organisasi formal kerja sama negara-negara Asia Tenggara? Mari kita simak uraian berikut:

a. ASA (Asosiasi Asia Tenggara)

ASA merupakan organisasi formal kerja sama Asia Tenggara yang pertama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 Juli 1961, dengan negara-negara anggota Malaysia, Filipina, dan Thailand. Yang mengilhami pembentukan organisasi ini adalah konferensi bersejarah negara-negara Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.

b. *ASEAN (Association of South East Asian Nations)*

Sumber: www.suswatch.org
Gambar 7.14 Lambang ASEAN

Menyadari keterbatasan jumlah anggota, Thanat Khoman (menteri luar negeri Thailand) menggagas suatu kelompok yang lebih besar dari ASA. Thanat mengemukakan gagasan tersebut dalam sebuah diskusi terbatas dengan beberapa menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara pada pertengahan tahun 1966. Selanjutnya pada bulan Mei tahun 1967 Thanat secara formal mengajukan gagasannya (dalam deklarasi secara tertulis) kepada Tun Abdul Razak (Perdana Menteri Malaysia), dan sebelumnya Adam Malik (Menteri Luar Negeri RI waktu itu) sudah mempelajarinya.

Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara bertemu di Bangkok untuk menandatangani "Deklarasi Bangkok" dan setuju mendirikan organisasi regional baru yang selanjutnya dikenal dengan ASEAN (kepanjangan dari *Association of South East Asian Nations)*. Lima orang menteri luar negeri penandatangan deklarasi sekaligus p but adalah:



1) Adam Malik: Menteri Luar Negeri Indor
2) Tun Abdul Razak: Perdana Menteri Ma
3) S. Rajaratnam: Menteri Luar Negeri Sir
4) Thanat Khoman: Menteri Luar Negeri T
5) Narsisco Ramos: Menteri Luar Negeri

Dengan demikian, kini ASEAN memperluas nisasi kerja sama sebelumnya, yakni ASA.

Dewasa ini, jumlah anggota ASEAN menja

- Brunei Darussalam masuk menjadi anggota ASEAN tanggal 7 Januari 1984.
- Vietnam masuk ASEAN tanggal 28 Juli 1995.
- Myanmar dan Laos diterima sebagai anggota ASEAN tanggal 3 Juli 1997.
- Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tahun 1999.

Sebaiknya Kamu Tahu

Tujuan, Asas, dan Program ASEAN

Sebagai sebuah organisasi kerja sama antarnegara (dalam satu kawasan) ASEAN memiliki tujuan, asas, serta program. Uraian tentang tujuan, asas, serta program yang dimaksud adalah:

1. **Tujuan dari pembentukan ASEAN**

   Tujuan dari pembentukan ASEAN sebagaimana dalam Deklarasi Bangkok ada tujuh butir.

   Tujuh butir yang dimaksud dapat digarisbawahi sebagai berikut:

   a. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan melalui usaha bersama dan dengan semangat kebersamaan;
   b. meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
   c. meningkatkan kerja sama dalam masalah yang menyangkut kepentingan bersama bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
   d. saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;
   e. peningkatan pertanian, industri, dan memperluas bidang perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup;
   f. memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan
   g. memelihara kerja sama yang erat serta bermanfaat, baik terhadap organisasi internasional maupun regional lainnya.

2. **Asas ASEAN**

   Asas dari (pembentukan) ASEAN meliputi 6 hal, yakni:

   a. saling menghormati kedaulatan kemerdekaan, persamaan derajat dan identitas nasional semua bangsa;
   b. hak hidup bebas setiap negara, bangsa, tidak ada campur tangan pihak luar, subversi atau paksaan;

c. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain;
d. penyelesaian sengketa dengan cara damai;
e. tidak melakukan ancaman atau kekerasan terhadap negara anggota lain; dan
f. mengadakan kerja sama yang efektif di antara negara anggota.

3. Program ASEAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan ASEAN, maka dilaksanakan beberapa program. Program-program tersebut antara lain terdiri atas:

a. KTT (Konferensi Tingkat Tinggi), yakni pertemuan para kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN.
b. Sidang Tahunan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN.
c. Sidang Tahunan para menteri ekonomi dan non ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

3. Bentuk Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Setelah pembentukan ASEAN, bagaimana wujud nyata dari pelaksanaan kerja sama negara-negara Asia Tenggara? Bentuk-bentuk kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara tersebut antara lain:

a. Bidang Ekonomi

Kerja sama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor impor barang-barang mentah serta jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, juga pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi.

Tentang proyek industri bersama juga telah diselenggarakan, antara lain:

1) Pendirian pabrik pupuk Urea di Indonesia (di Provinsi NAD).
2) Pendirian pabrik pupuk Urea di Malaysia.
3) Pendirian pabrik tembaga di Filipina.

4) Pendirian pabrik diesel Marine di Singapura (dibatalkan, sebab menjadi proyek nasional Singapura sendiri).
5) Proyek abu soda di Thailand.
6) Proyek Vaksin di Singapura.

b. Bidang Politik dan Keamanan

Awalnya, kerja sama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) adalah di bidang ekonomi. Akan tetapi karena tuntutan perkembangan situasi kawasan, akhirnya juga melibatkan kerja sama politik dan keamanan.

Kerja sama bidang politik dan keamanan ASEAN dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, tanggal 27 November 1971. Ketika itu perang Vietnam sedang berkecamuk sengit. Selain itu negara-negara adikuasa (Amerika, RRC, dan Uni Soviet) ikut bermain di balik pertikaian tersebut.

Dalam pertemuan di Kuala Lumpur itu ditandatangani Deklarasi Kuala Lumpur. Deklarasi tersebut berisi kesepakatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, atau biasa dikenal dengan ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*).

Kerja sama bidang politik dan keamanan ASEAN lebih ditegaskan lagi dalam KTT pertama di Bali tanggal 23-25 Februari 1976. Dalam KTT tersebut menghasilkan *Declaration of ASEAN Concord* yang salah satu isinya antara lain berupa penegasan tentang keterikatan para negara anggota ASEAN untuk membina perdamaian, di samping kemajuan dan kesejahteraan.

Contoh hasil kerja sama negara-negara Asia Tenggara antara lain di bidang politik dan keamanan antara lain meliputi:

1) Penyelenggaraan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan wilayah Asia Tenggara.
2) Pelepasan tuntutan kepemilikan atas wilayah Sabah oleh Filipina kepada Malaysia (sebaliknya, Malaysia tidak boleh membantu para gerilyawan Moro).
3) Mengadakan perjanjian ekstradisi (penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal) antarnegara anggota ASEAN.
4) Penandatanganan kesepakatan tentang Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir.

c. Bidang Sosial Budaya

Kerja sama negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD (*Committee on Social Development*). Kerja sama sosial budaya antarnegara Asia Tenggara di antaranya meliputi:

1) Program peningkatan kesehatan (makanan dan obat-obatan).
2) Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN.
3) Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata *ASEAN Tourism Agreement* (ATA).
4) Penyelenggaraan pesta olahraga dua tahun sekali Sea-Games.

Rangkuman

1. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di benua Asia yang meliputi negara-negara kepulauan serta daratan di sekitar Semenanjung Melayu dan Indocina.
2. Kerja sama antarnegara Asia Tenggara mempunyai arti penting, sebab secara geografis negara-negara tersebut saling berdekatan dan bertetangga.
3. ASEAN merupakan salah satu bentuk organisasi kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara.
4. ASEAN merupakan organisasi kerja sama yang bersifat kooperatif, bukan integratif.
5. Adanya kerja sama antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara, diharapkan terjadi perkembangan-perkembangan baru yang saling menguntungkan.
6. Kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu ditingkatkan secara terus menerus, sehingga manfaat-manfaat yang dirasakan jadi lebih banyak dan luas.

Kegiatan

Dari waktu ke waktu kerja sama antarnegara di Asia Tenggara makin banyak dan luas. Dalam kegiatan ini cobalah kamu membuat kliping peristiwa yang menunjukkan kerja sama bangsa-bangsa Asia Tenggara. Buatlah komentarmu secara singkat atas peristiwa tersebut sebagai tugas. Kumpulkan hasil kerjamu untuk dikumpulkan serta diberi nilai. Selamat melaksanakan tugas!

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Negara di kawasan Asia Tenggara yang belum pernah mengalami penjajahan adalah ....
2. ASEAN merupakan kependekan dari ....
3. Perdana Menteri Indonesia yang turut dalam pembentukan organisasi ASEAN adalah ....
4. Maksud faktor kesamaan sejarah atau nasib yang melatarbelakangi kerja sama negara-negara kawasan Asia Tenggara adalah ....
5. Kerja sama antarnegara kawasan Asia Tenggara penting, karena ....
6. Sea-Games diselenggarakan setiap ....
7. Kerja sama bilateral artinya ....
8. Deklarasi yang menjadi cikal bakal pembentukan ASEAN bernama ....
9. Pertukaran pelajar antarnegara Asia Tenggara merupakan contoh kerja sama di bidang ....
10. Negara di kawasan Asia Tenggara yang belum tergabung dalam organisasi ASEAN adalah ....

Tugas

1. Sudahkah kamu mengetahui negara-negara di kawasan Asia Tenggara?
2. Sudahkah kamu mengenali hal-hal penting yang mendasari perlunya kerja sama antarnegara-negara kawasan Asia Tenggara?
3. Sudahkah kamu mengenali berbagai bentuk dan jenis kerja sama antarnegara Asia Tenggara?
4. Sudahkah kamu mengenali hasil-hasil nyata kerja sama negara-negara Asia Tenggara?

Jika belum, mulai sekarang kenalilah agar kamu menjadi warga yang menyadari sepenuhnya akan arti pentingnya kerja sama antarnegara. Kerja sama tersebut tentunya amat berguna baik bagi negara itu sendiri maupun para warganya.

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Negara Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami masa penjajahan adalah ....
   a. Malaysia
   b. Thailand
   c. Vietnam
   d. Kamboja
2. Wilayah Asia Tenggara sebelah timur berbatasan dengan ....
   a. Negara RRC
   b. Negara Papua Nugini
   c. Laut Cina Selatan
   d. Samudra Atlantik
3. Berikut yang menunjukkan contoh kerja sama bilateral adalah ....
   a. Indonesia menjadi anggota ASEAN
   b. Indonesia mengirim TKI ke Malaysia
   c. Beberapa negara Asia Tenggara menyumbang korban gempa
   d. PBB mengirim pasukan perdamaian ke negara yang sedang konflik

4. Di antara alasan penting kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara adalah ....
   a. untuk kedamaian kawasan
   b. negara Asia Tenggara banyak
   c. antarnegara Asia Tenggara konflik
   d. perbedaan kebudayaan
5. ASEAN merupakan organisasi ....
   a. kerja sama bilateral
   b. kerja sama multilateral
   c. kerja sama regional
   d. kerja sama politik
6. Berikut yang termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah ....
   a. Indonesia, Korea Selatan, dan India
   b. Thailand, Singapura, dan Laos
   c. Filipina, RRC, dan Singapura
   d. Brunei Darussalam, Jepang, dan Malaysia
7. Negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk terbesar adalah ....
   a. India
   b. RRC
   c. Indonesia
   d. Filipina
8. Sikap yang harus dikedepankan dalam bekerja sama dengan negara lain ....
   a. saling mengutamakan kepentingan sendiri
   b. saling menghormati
   c. saling ikut mencampuri
   d. saling mengikuti keinginan negara lain
9. Negara kawasan Asia Tenggara yang merupakan bekas jajahan Inggris ....
   a. Malaysia
   b. Filipina
   c. Indonesia
   d. Laos
10. Negara kawasan Asia Tenggara yang mendapat sebutan ”Negeri Gajah Putih” adalah ....
    a. Malaysia
    b. Thailand
    c. Indonesia
    d. Laos
11. Berikut ini adalah termasuk peran Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara ....
    a. pelopor pendiri ASEAN
    b. menjadi pemimpin ASEAN
    c. menjadi anggota istimewa ASEAN
    d. menjadi negara beraneka kebudayaan

12. Saat pertama didirikan, jumlah negara anggota ASEAN berjumlah ....
    a. tiga
    b. empat
    c. lima
    d. enam
13. Kamu ditunjuk sebagai wakil pelajar Indonesia dalam forum ASEAN, maka sikapmu ....
    a. menerima supaya dianggap hebat
    b. menerima demi Indonesia
    c. menolak, karena belum lancar berbahasa Inggris
    d. menolak, karena sekolah bisa terganggu
14. Contoh hasil kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan adalah ....
    a. Deklarasi ZOPFAN
    b. Deklarasi Bangkok
    c. KTT ASEAN
    d. Deklarasi ASEAN
15. Faktor yang mempermudah kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia adalah ....
    a. kesamaan sumber daya alam
    b. kesamaan bahasa
    c. kesamaan kepribadian bangsa
    d. kesamaan sebagai anggota ASEAN

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Di bagian Timur kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan ....
2. Negara paling luas wilayahnya di kawasan Asia Tenggara adalah ....
3. Dulu kawasan Asia Tenggara bernama ....
4. Negeri Gajah Putih adalah sebutan bagi negara ....
5. Sea - Games diselenggarakan setiap ....
6. Kerja sama bilateral artinya ....
7. ASEAN kepanjangan dari ....

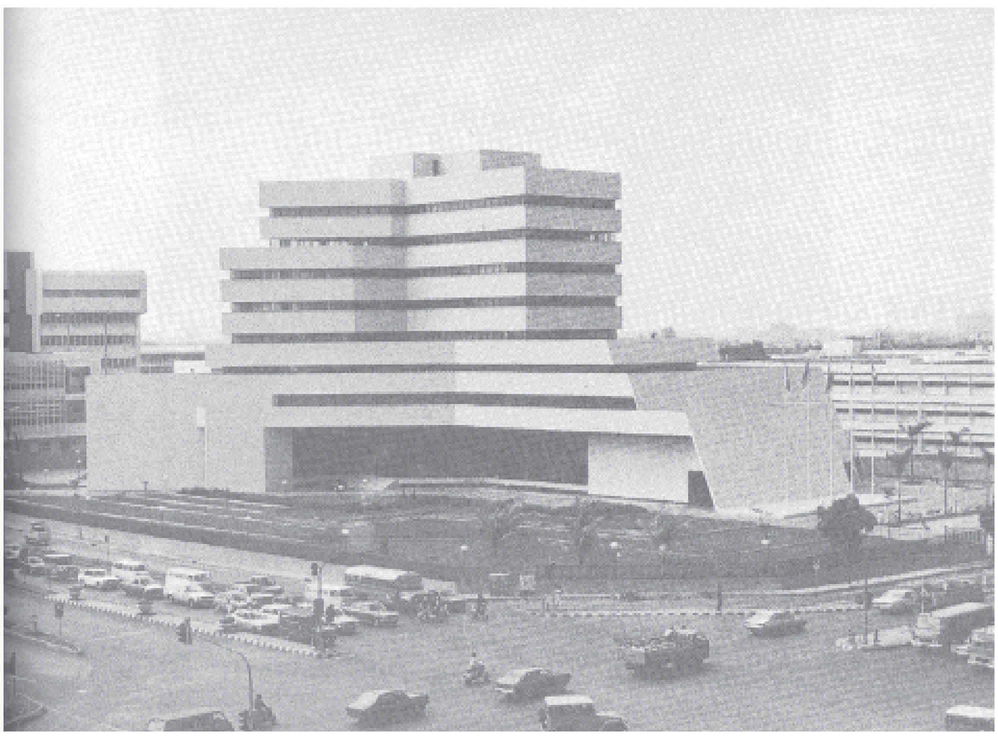
8. Negara di Asia Tenggara yang belum pernah dijajah adalah ....
9. Deklarasi yang menjadi cikal bakal pembentukan ASEAN bernama ....
10. Negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung dalam organisasi ASEAN adalah ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Bagaimana sejarah masa lalu hubungan masyarakat Asia Tenggara sebelum datangnya kaum kolonial? Jelaskan!
2. Mengapa kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara begitu penting?
3. Sebutkan negara-negara pertama pembentuk organisasi ASEAN!
4. Berikan beberapa contoh kerja sama ekonomi antar negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi!
5. Mana saja yang termasuk negara-negara daratan di kawasan Asia Tenggara?

Bab VIII

Peran Indonesia di Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara



Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 8.1 Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta

Perhatikan gambar di atas!

Bangunan gedung yang tampak megah itu berada di Jakarta. Gedung tersebut merupakan sekretariat ASEAN. Karena merupakan sekretariat, berarti dari gedung itulah sepak terjang dan gerak langkah seluruh kegiatan negara-negara Asia Tenggara dengan organisasi ASEANnya dimonitor dan dikoordinasikan sekaligus.

Peta Konsep

- Peran Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara
  - Peran Indonesia di Asia Tenggara dalam keanggotaan ASEAN
    - Sebagai salah satu perintis Organisasi ASEAN
    - Penyumbang penting gagasan stabilitas Asia Tenggara
    - Sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama
    - Ikut aktif menjalin hubungan ASEAN dengan negara-negara maju
    - Turut aktif dalam penyelesaian Kamboja dan pengungsi IndoCina
  - Peran Indonesia di Asia Tenggara di luar keanggotaan ASEAN
    - Sebagai anggota aktif SEAMEO
    - Sebagai pasukan perdamaian PBB di Vietnam
    - Sebagai pemrakarsa penyelesaian konflik Kamboja
    - Sebagai pasukan perdamaian PBB di Kamboja
    - Sebagai penengah penyelesaian masalah Moro di Filipina

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan
2. menjelaskan peran Indonesia di luar organisasi ASEAN untuk negara-negara Kawasan Asia Tenggara.

Sekretariat ASEAN dibentuk pada tahun 1973, pada saat pertemuan para menteri luar negeri yang diadakan di Pataya, Thailand. Alasan utama pembentukan sekretariat tersebut adalah kegiatan ASEAN yang makin banyak ragamnya. Pada saat itu, sidang di Pataya menyetujui pembentukan panitia khusus (yang membahas soal sekretariat ASEAN). Akan tetapi hasil sidang panitia khusus tersebut tidak disetujui karena dianggap terlalu rumit.

Berikutnya dibentuk panitia lagi. Anggota panitia ini terdiri atas pejabat-pejabat tinggi ASEAN. Hasil rumusan panitia ini kemudian diperbaiki serta disempurnakan dalam sidang para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 1975.

Sesudah itu, hasil rumusan sidang Kuala Lumpur dibawa ke sidang KTT ASEAN pertama di Bali (1976) untuk disahkan. Hasil dari sidang dalam KTT Bali tersebut di antaranya adalah *Agreement on the Estabilishment of the ASEAN Secretariat*. Inti dari keputusan sidang tersebut di antaranya soal penetapan kedudukan sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia. Secara resmi sekretariat tersebut berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976.

Demikianlah salah satu contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Tentu saja peran tersebut punya kaitan dengan organisasi kerja sama Asia Tenggara sendiri, yakni ASEAN. Lantas, bagaimana peran-peran Indonesia yang lain?

(Sumber: Mengenal lebih jauh ASEAN dan Anggota-Anggotanya, 1989)

Kata Kunci

- Peran
- Masyarakat
- Internasional
- Konflik
- ASEAN

A. Peran Indonesia di Asia Tenggara dalam Keanggotaan ASEAN

Kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara dewasa ini sudah menemukan bentuknya yang formal sekaligus permanen, yakni ASEAN. Organisasi kerja sama regional ini sejak awal memang dibentuk atas dasar kesatuan cita-cita: meningkatkan kesejahteraan segenap masyarakat Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara anggota yang sekaligus banyak berkecimpung dalam berbagai kegiatan. Apa saja peran Indonesia dalam organisasi ASEAN?

1. Sebagai Salah Satu Perintis Organisasi ASEAN

Kerja sama antarnegara butuh suatu landasan yang kuat. Tanpa adanya suatu landasan kuat, kerja sama yang dilakukan tidak akan berumur lama atau bahkan tidak mungkin terwujud. Biasanya, landasan kerja sama tersebut berupa piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing negara yang bersangkutan.

Dalam sejarah perjalanannya organisasi kerja sama di kawasan negara-negara kawasan Asia Tenggara, piagam kesepakatan tadi sempat muncul beberapa nama. Ada nama ASA (*Asosiasi Asia Tenggara* dengan negara-negara anggota Malaysia, Filipina, dan Thailand). Ada juga nama MAPHILINDO (*Malaysia, Philipina,* dan *Indonesia*) yang merupakan usulan Sukarno, ASPAC (*Asia Pacific Council*), SEAARC (*South East Asian Association for Regional Cooperation*), dan terakhir ASEAN (*Association of South East Asian Nations*).

Adam Malik (Menteri Luar Negeri RI) dalam pertemuannya dengan Tengku Abdul Rahman (menteri luar negeri Malaysia) di Bangkok tanggal 23 Mei 1967, dengan tegas menyatakan ”tidak ada tempat bagi ASA dan ASPAC untuk Indonesia.” Akhir perjalanan dari pentingnya landasan kerja sama tersebut, lima menteri luar negeri (Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Indonesia) menandatangani piagam kesepakatan kerja sama negara-negara Asia Tenggara, yakni ”Deklarasi Bangkok”. Deklarasi inilah yang menjadi dasar pendirian organisasi kerja sama regional Asia Tenggara dan hingga sekarang dikenal sebagai ASEAN.

2. Penyumbang Penting Gagasan Stabilitas Asia Tenggara

Pada awalnya organisasi ASEAN mengutamakan kerja sama ekonomi. Akan tetapi organisasi kerja sama regional ini dalam perjalanan selanjutnya tidak dapat lepas dari (pengaruh) situasi kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Ada masalah internal ada juga masalah eksternal di kawasan Asia Tenggara.

Masalah internal kawasan Asia Tenggara yang dimaksud adalah konflik (perang saudara) yang terjadi di daratan Indocina misalnya (Vietnam, Laos, dan Kamboja). Ada juga sengketa-sengketa wilayah antarnegara misalnya seperti yang pernah dialami oleh Malaysia dan Filipina.

Selain itu, saat ASEAN terbentuk dua negara super power (Amerika Serikat dan Uni Soviet) sedang gencar–gencarnya beradu kekuatan serta pengaruh melalui apa yang biasa disebut sebagai "perang dingin". Salah satu bagian dari bentuk perang dingin tersebut adalah campur tangan dua negara super power dalam kancah perang saudara yang terjadi di kawasan Indocina.

Bagaimana tanggapan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN terhadap situasi itu? Malaysia mengajukan usul agar semua kekuatan asing di masing-masing negara ASEAN dikeluarkan. Selain itu, negara-negara Adikuasa kelak harus diminta untuk menyetujui sifat netralitas kawasan Asia Tenggara. Negara-negara *super power* juga diminta untuk menahan diri dan tidak membawa konflik di negara manapun dalam kawasan Asia Tenggara. Terakhir, negara-negara super power diminta untuk memikirkan sarana pengawasan demi menjamin kenetralan kawasan Asia Tenggara.

Masih dalam pembicaraan tentang menanggapi situasi Eksternal, Indonesia dalam hal ini berbeda pandangan dengan Malaysia. Bagi Indonesia, tidak ada landasan kuat untuk mempercayai tuntutan-tuntutan seperti yang diusulkan Malaysia. Mengapa? Tidak lain, karena negara-negara super power itu sendiri memang mengabaikan berbagai kekuatan tradisional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, dua negara super power juga dapat meninggalkan negara-negara Asia Tenggara, lalu memecahkan masalahnya dengan cara-cara mereka sendiri.

Karena itu Indonesia berpandangan, bahwa dalam menanggapi situasi kawasan Asia Tenggara adalah menekankan perlunya sikap "kelenturan nasional". Bagi Indonesia, sikap kelenturan nasional tersebut secara bertahap dapat mengantarkan kepada "kelenturan regional" yang lebih luas.

Akhir tahun 1975 pandangan tentang kelenturan nasional dan kelenturan regional tersebut diterima dengan baik oleh negara-negara anggota ASEAN. Dan pandangan ini kelak punya arti penting dalam keputusan-keputusan penting pada KTT ASEAN pertama di Bali.

3. Sebagai Penyelenggara KTT ASEAN Pertama

KTT ASEAN pertama berlangsung di Bali tanggal 23-25 Februari 1976. Dalam KTT tersebut dihasilkan dua keputusan penting berkaitan dengan situasi kawasan Asia Tenggara. Masing-masing 1) *Declaration of ASEAN Concord* dan 2) TAC (*Treary of Amity and Cooperationin Southeast Asia*) atau perjanjian persahabatan dan kerja sama.

Dalam deklarasi *Concord* dijelaskan soal tujuan dan prinsip-prinsip stabilitas kawasan, termasuk berbagai bidang program kerja samanya. Melalui deklarasi tersebut, semua negara ASEAN bertekad melenyapkan segala jenis "penyakit" stabilitas. Stabilitas (tiap negara) dalam deklarasi tersebut dianggap merupakan sumbangan penting perdamaian internasional serta penyelesaian secara damai berbagai perselisihan antarnegara ASEAN.

Sementara itu dalam TAC atau perjanjian persahabatan dan kerja sama berisi prinsip-prinsip dan tata tertib negara ASEAN. Salah satu prinsip tersebut antara lain menyatakan bahwa setiap perselisihan antarnegara ASEAN diselesaikan secara damai. Pendek kata, hasil penting dari KTT ASEAN pertama di Bali ini merupakan penegasan kerja sama politik demi terciptanya stabilitas kawasan Asia Tenggara.

4. Ikut Aktif Menjalin Hubungan ASEAN dengan Negara-negara Maju

Salah satu wujud dari cita-cita meningkatkan kesejahteraan segenap masyarakat Asia Tenggara adalah penyelenggaraan berbagai hubungan. ASEAN dalam hal ini menjalin hubungan dengan negara-negara maju maupun organisasi internasional yang lain, terutama di bidang ekonomi.

Sebagai contoh adalah peran Indonesia dalam hubungan dengan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) saat Prof. Sumitro Djojohadikusumo menjadi ketua *Standing Committee of a Special Coordinating Committee* (SCSCC). Juga, peran Indonesia saat menjadi koordinator hubungan ASEAN-Kanada. Termasuk juga perannya menjadi koordinator KTT ASEAN-Cina pada tahun 2006.

5. Turut Aktif dalam Penyelesaian Kamboja dan Pengungsi Indocina

Kawasan Indocina masih terus bergolak. Sebelum tahun 1976 terjadi perang saudara di Vietnam. Sesudah tahun 1976 (Vietnam Utara dan Vietnam selatan sudah bersatu), tentara Vietnam malah menduduki Kamboja (17 Januari 1979). Akibatnya kehidupan masyarakat kawasan Indocina tidak tenang dan sebagian di antara banyak yang pergi mengungsi.

Bagaimana sikap negara-negara ASEAN terhadap pendudukan Kamboja tersebut? Tanggal 12 Januari 1979, para menteri luar negeri ASEAN dalam suatu pertemuan di Bangkok mengeluarkan pernyataan bersama. Isi pernyataan tersebut adalah menyesalkan terjadinya peristiwa pendudukan kekuatan bersenjata asing ke Kamboja.

Indonesia dalam hal ini menyediakan Pulau Galang untuk pemrosesan para pengungsi. Tindakan tersebut dilakukan berdasar atas kesepakatan para menteri ASEAN (yang bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi/UNHCR).

Kegiatan

Ayo Membuat Kliping Peristiwa

Peran negara Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN tentu saja banyak. Kita tahu sejak awal pembentukan ASEAN hingga kini Indonesia selalu aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut.

Nah, dalam kegiatan ini cobalah kamu mencari sebuah peristiwa yang menunjukkan peran Indonesia di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Peristiwa yang kamu tunjukkan tersebut tentunya harus punya kaitan dengan organisasi ASEAN. Jangan lupa berilah sedikit komentarmu. Kumpulkan hasil kerjamu kepada guru untuk diberi nilai.

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Sekretariat bersama ASEAN berkedudukan di ... dan berfungsi sejak ....
2. Organisasi kerja sama negara-negara Asia Tenggara sebelum ASEAN adalah ....
3. Gagasan penting tentang stabilitas Asia Tenggara yang diusulkan Indonesia adalah ....
4. Peran negara Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara dapat melalui keanggotaan ASEAN dan dapat pula ....
5. Hasil penting dari KTT ASEAN pertama adalah ....
6. Nama pulau di wilayah Indonesia yang disediakan untuk membantu pengurusan pengungsi Indocina saat pendudukan Kamboja adalah ....
7. Organisasi kerja sama Asia Tenggara yang pertama diusulkan Sukarno bernama ....
8. Nama deklarasi yang mendasari pembentukan organisasi ASEAN adalah ....
9. Dua negara super power yang turut campur tangan dalam pergolakan di kawasan Asia Tenggara adalah ....
10. Menteri Luar Negeri RI yang turut aktif dalam pembentukan ASEAN adalah ....

B. Peran Indonesia di Asia Tenggara di Luar Keanggotaan ASEAN

Indonesia memiliki ikatan regional sebagai anggota organisasi ASEAN di Asia Tenggara). Indonesia juga sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Karena itu peran Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara kadang-kadang tidak di bawah bendera organisasi ASEAN.

Lantas, apa saja peran Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara yang bukan di bawah organisasi ASEAN? Paling tidak meliputi hal-hal berikut.

1. Sebagai Anggota Aktif SEAMEO *(South East Asian Minister of Education Organization)*

Sumber: www.useae2006.org

Gambar 8.2 Logo SEAMEO

SEAMEO (*South East Asian Minister of Education Organization*) adalah organisasi menteri-menteri pendidikan Asia Tenggara. Organisasi ini dirintis sebelum ASEAN terbentuk. Tujuan dari lembaga ini adalah peningkatan kerja sama regional kawasan Asia Tenggara dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan.

Pada tahun 1974 organisasi ini beranggotakan menteri-menteri pendidikan dari dalam negara Asia Tenggara. Masing-masing dari negara tersebut adalah Indonesia, Kamboja (dulu masih Republik Khmer), Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Republik Vietnam (Vietnam Selatan). Selain itu dalam organisasi ini ada tiga negara anggota peserta yang bukan berasal dari Asia Tenggara. Masing-masing adalah Prancis, Australia, dan Selandia Baru. Sekretariat organisasi ini berkedudukan di Bangkok.

Setelah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dikuasai Vietnam Utara (dan bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam), demikian juga Laos dan Kamboja, ketiga negara tersebut tidak lagi aktif dalam kegiatan-kegiatan SEAMEO. Kegiatan-kegiatan lembaga ini diselenggarakan melalui program-program yang berpusat pada *Regional Centres*, yakni meliputi:

a. *Regional Centre for Tropical Biology* (BIOTROP), berkedudukan di Bogor, Indonesia.
b. *Regional Centre for Education, Science and Mathematics* (RECSAM), berkedudukan di Penang, Malaysia.
c. *Regional English Language Centre* (RLC), di Singapura.
d. *Regional Centre for Graduate Study and Reserch in Agri* (SEARCA), di Los Banos, Filipina.
e. *Regional Centre for Educational Innovation and Technology* (INNOTECH), di Bangkok (semula di Saigon, Vietnam).

2. Sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Vietnam

Ketika itu kecamuk perang saudara di Vietnam sudah berlangsung ± 30 tahun. Berdasar atas keputusan Persetujuan di Paris, tahun 1973 dibentuklah komisi pengontrol perdamaian di bawah PBB yang bernama ICCS (*International Commission of Control and Supervision*). Anggota komisi tersebut terdiri atas empat negara: Hongaria, Indonesia, Kanada, dan Polandia.

Tugas komisi tadi adalah mengawasi pelanggaran perdamaian yang dilakukan oleh dua pihak. Peran Indonesia dalam tugas ini adalah sebagai Pengirim pasukan perdamaian. Pasukan Indonesia pada waktu itu adalah Pasukan Garuda IV, V, VI, dan VII.

Pasukan Garuda IV di bawah pimpinan H.R. Dharsono dan ketua kontingennya Brigadir Jenderal Wiyogo. Bertugas dari bulan Januari hingga Juli 1973. Selanjutnya berturut-turut Pasukan Garuda V, VI, dan VII menggantikan pasukan-pasukan sebelumnya hingga tahun 1975, ketika seluruh Vietnam sudah dikuasai oleh Vietnam Utara (Vietkong).

3. Sebagai Pemrakarsa Penyelesaian Konflik di Kamboja

Konflik di Kamboja bersumber dari pendudukan tentara Vietnam di Kamboja sejak tahun 1979. Tahun 1987 Menteri luar Negeri Indonesia (Mochtar Kusumaatmadja) dan Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam (Nguyen Co Thach) menandatangani sebuah persetujuan. Isi persetujuan tersebut adalah soal pertemuan informal antar pihak yang bertikai di Kamboja.

Pertemuan informal tersebut terlaksana, dan selanjutnya dikenal dengan JIM (*Jakarta Informal Meeting*). JIM I dilakukan di Bogor, tanggal 25-28 Juli 1988, dan JIM II juga di Bogor, tanggal 11 Februari 1989.

Masih soal penyelesaian konflik di Kamboja, Indonesia juga terpilih sebagai wakil dalam pertemuan Paris untuk Kamboja bulan Oktober tahun 1991. Hasil penting dari pertemuan Paris tersebut adalah sebuah perjanjian damai untuk Kamboja.

4. Sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Kamboja

Satu tahun setelah perjanjian damai dicapai, Indonesia terpilih kembali sebagai pasukan perdamaian atas nama PBB di Kamboja. Peristiwa tersebut terjadi tahun 1992. Pasukan perdamaian itu dikenal dengan Pasukan Garuda XII. Selain sebagai pengawas perdamaian, tugas Pasukan Garuda ini adalah mengawasi berlangsungnya pemilihan Umum di Kamboja.

5. Sebagai Penengah Penyelesaian Masalah Moro di Filipina

Moro merupakan sebuah masyarakat suku yang menempati Pulau Mindanao, wilayah bagian selatan negara Filipina. Sudah lama suku Moro ingin memisahkan diri dari negara Filipina. Gerakan suku Moro untuk memisahkan diri dari Filipina itu bernama MNLF (*Moro National Libertion Front*). Gerakan suku Moro tersebut menyebabkan pertikaian yang tak kunjung selesai.

Tahun 1993 Organisasi Konferensi Islam (OKI) menunjuk Indonesia sebagai ketua komite untuk menyelesaikan masalah Moro. Perundingan antara pemerintah Filipina dan MNLF tersebut antara tahun 1993-1996 dan berlangsung lima kali. Masing-masing di Cipanas (satu kali), dan di Jakarta (empat kali).

Pada perundingan di Jakarta yang keempat, tanggal 30 Agustus 1996 Perjanjian Damai ditandatangani. Dari pemerintah Filipina diwakili oleh T. Yan, dari MNLF diwakili Misuari, dan dari Indonesia Ali Alatas (Menteri Luar negeri). Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani kembali di Manila 2 September 1996.

Rangkuman

1. Selain sebagai anggota masyarakat kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga bagian dari masyarakat Internasional.
2. Peran Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara kadang melalui keanggotaan ASEAN, tetapi kadang-kadang juga di luar keanggotaan ASEAN.
3. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penyumbang penting gagasan tentang pelaksanaan program stabilitas kawasan Asia Tenggara.
4. Indonesia banyak berkecimpung dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, serta netral.
5. Indonesia sering tampil menjadi penengah konflik, serta menjadi pasukan perdamaian atas nama PBB di kawasan Asia Tenggara.

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!
Ayo menyatakan Setuju dan Tidak Setuju
Berilah tanda tanda cek (✓) pada kolom ”setuju” dan ”tidak setuju”

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Indonesia hanya sebagai bagian dari masyarakat regional Asia Tenggara.		
2.	SEAMEAO merupakan organisasi kerja sama bidang politik dan keamanan di Asia Tenggara.		
3.	Peran Indonesia di negara-negara Asia Tenggara hanya melalui organisasi ASEAN.		
4.	Negara Indonesia tidak mempedulikan berbagai sengketa yang terjadi di Asia Tenggara.		
5.	Dalam setiap konflik yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia selalu memihak pada salah satu kubu yang bertikai		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!
Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. SEAMEO merupakan organisasi kerja sama ... di Asia Tenggara.
2. Atas nama PBB Indonesia mengirim pasukan perdamaian di Vietnam tahun ....
3. Sumber konflik yang terjadi di Kamboja adalah ....
4. JIM kependekan dari ....
5. Pemimpin Pasukan Garuda di Vietnam adalah ....
6. Nama Menteri Luar Negeri RI pemrakarsa pertemuan informal para pihak yang bersengketa di Kamboja adalah ....
7. Pada tahun 1993 Indonesia menjadi penengah tentang masalah ... di Filipina.
8. Indonesia dipilih PBB kembali menjadi pasukan perdamaian di Kamboja pada tahun 1992, sehingga dikirim Pasukan Garuda yang ke ....

9. Indonesia adalah salah satu anggota ICS yang merupakan komisi di bawah PBB untuk menggalang perdamaian di ....
10. Kepala kontingen pasukan perdamaian di Vietnam adalah ....

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Masalah Moro, merupakan salah satu konflik di negeri ....
   a. Malaysia
   b. Thailand
   c. Filipina
   d. Vietnam
2. Faktor yang mempermudah kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia adalah ....
   a. kesamaan sumber daya alam
   b. kesamaan bahasa
   c. kesamaan kepribadian bangsa
   d. kesamaan sebagai anggota ASEAN
3. Sekretariat bersama ASEAN berkedudukan di ....
   a. Bangkok
   b. Kuala Lumpur
   c. Bandar Seri Begawan
   d. Jakarta
4. Berikut yang merupakan tujuan dari kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan adalah ....
   a. menciptakan stabilitas kawasan
   b. peningkatan pembangunan ekonomi
   c. penggalangan kekuatan militer
   d. mencari pemimpin ASEAN

5. ASEAN bekerja sama dengan Cina, khususnya dalam bidang ....
   a. politik
   b. sosial budaya
   c. ekonomi
   d. keamanan
6. *Jakarta Informal Meeting* merupakan salah satu kesepakatan KTT ASEAN untuk membantu penyelesaian konflik di negara ....
   a. Kamboja
   b. Laos
   c. Vietnam
   d. Filipina
7. Negara-negara kawasan Asia Pasifik mengadakan pertemuan di kawasan Puncak, Bogor. Bila negara-negara tadi mengadakan kesepakatan kerja sama baru, maka jenis kerja sama tersebut termasuk ....
   a. multilateral
   b. bilateral
   c. regional
   d. interkontinental
8. Contoh kerja sama di lingkungan kecil seperti RW misalnya ....
   a. menjenguk teman
   b. ronda/siskamling
   c. melaksanakan kesepakatan
   d. bertamu
9. Kawasan negara-negara Asia Tenggara dinyatakan sebagai wilayah damai, bebas, dan netral, sebab ....
   a. kaya sumberdaya alam dan penduduknya besar
   b. menjadi jalur lalu-lintas internasional
   c. menjadi arena perebutan pengaruh negara-negara adikuasa
   d. ada campur tangan negara-negara adikuasa dalam konflik kawasan
10. Indonesia sebagai negara penyelenggara KTT ASEAN pertama. Waktu itu berlangsung tahun 1976 di ....
    a. Jakarta
    b. Bogor
    c. Denpasar, Bali
    d. Pontianak
11. Berikut ini menunjukkan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN di lingkungan negara-negara Asia Tenggara adalah ....
    a. Sebagai anggota SEAMEAO
    b. Mengirim Pasukan Garuda ke Vietnam
    c. Menjadi negara tempat sekretariat tetap ASEAN
    d. sebagai pusat kegiatan BIOTROP

12. Gagasan tentang bentuk stabilitas kawasan Asia Tenggara yang pernah diusulkan Indonesia adalah ....
    a. politik bebas aktif
    b. ZOPFAN
    c. kelenturan nasional dan regional
    d. politik bebas dan netral
13. Pada tahun 1975 Pasukan Garuda VII ditarik dari Vietnam, sebab ....
    a. tugas dari PBB selesai
    b. Perang Vietnam membara
    c. Pasukan Garuda kalah
    d. atas perintah negara adikuasa
14. Berikut yang merupakan cikal bakal organisasi kerja sama negara-negara Asia Tenggara adalah ....
    a. SEAMEAO
    b. ASPAC
    c. ASA
    d. SEAARC
15. Kerja sama negara-negara ASEAN di bidang politik resmi dimulai sejak ....
    a. Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971
    b. KTT ASEAN pertama di Bali
    c. KTT ASEAN kedua di Kuala Lumpur
    d. KTT ASEAN ketiga di Filipina

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Organisasi kerja sama negara-negara Asia Tenggara sebelum ASEAN adalah ....
2. Gagasan penting tentang stabilitas Asia Tenggara yang diusulkan Indonesia adalah ....
3. Hasil penting dari KTT ASEAN pertama adalah ....
4. Menteri Luar Negeri RI yang turut aktif dalam pembentukan ASEAN adalah ....
5. Nama deklarasi yang mendasari pembentukan ASEAN adalah ....
6. JIM kependudukan dari ....
7. Atas nama PBB Indonesia mengirim Pasukan Perdamaian di Vietnam tahun ....

8. Sumber Konflik yang terjadi di Kamboja adalah ....
9. Pemimpin Pasukan Garuda di Vietnam adalah ....
10. Pada tahun 1993 Indonesia menjadi penengah tentang masalah ... di Filipina.

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang kamu ketahui tentang kawasan SEAMEAO?
2. Apa tujuan utama kerja sama politik negara-negara ASEAN?
3. Bagaimana peran Indonesia dalam menentukan nama ASEAN?
4. Bagaimana peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Kamboja?
5. Mana saja yang termasuk negara-negara anggota Komisi Pengawasan Perdamaian untuk Vietnam dan bagaimana peran Indonesia?

Bab IX

Politik Luar Negeri Indonesia



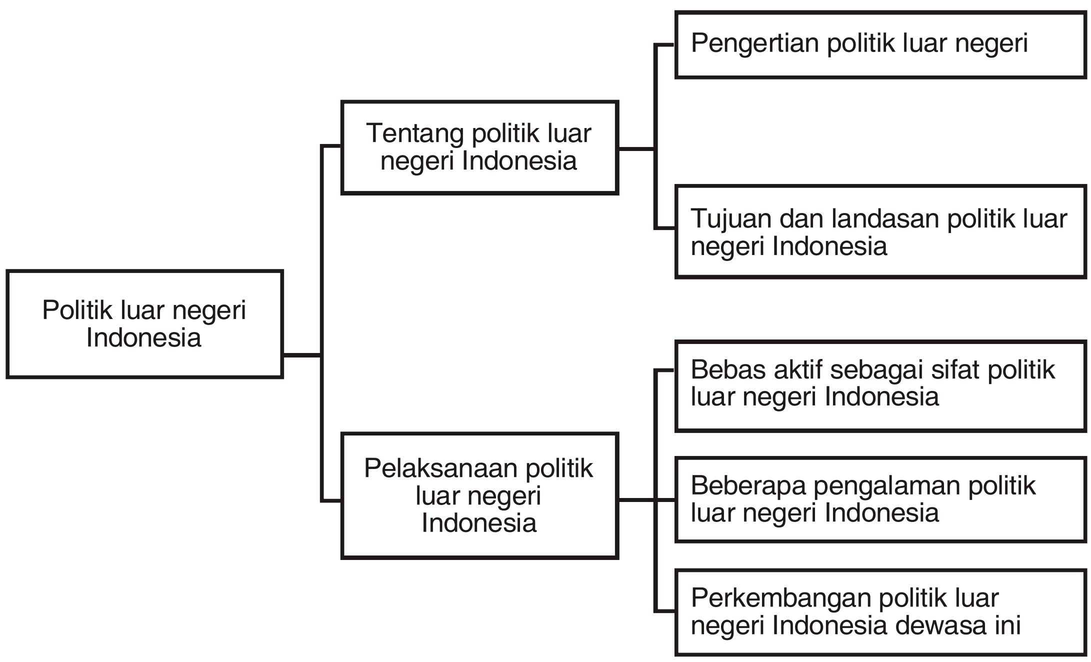
Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 9.1 Kerja sama antar negara

Perhatikan gambar di atas!

Gambar tersebut menunjukkan pergaulan negara Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia sekaligus wujud dari pelaksanaan politik luar negerinya. Lantas, apa dan bagaimana politik luar negeri Indonesia?

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. menjelaskan sifat politik luar negeri Indonesia bebas aktif;
2. menjelaskan dasar-dasar politik Indonesia bebas aktif; dan
3. menunjukkan contoh-contoh politik luar negeri Indonesia bebas aktif dewasa ini.

Kata Kunci

- Politik
- Bebas
- Aktif
- Pakar

A. Tentang Politik Luar Negeri Indonesia

Dalam era global seperti dewasa ini, sebuah negara tidak mungkin hidup menyendiri. Sebuah negara perlu membuka diri dan menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebuah negara butuh kerja sama dalam berbagai bidang dengan negara-negara lain. Karena kebutuhan menjalin hubungan serta kerja sama dengan bangsa-bangsa lain itulah pada akhirnya setiap negara memiliki kebijakan luar negeri, atau lebih tepat lagi politik luar negeri.



Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 9.2 Kerja sama Indonesia dengan negara lain

Tidak dapat dibantah lagi, bahwa negara Indonesia menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat internasional dan juga banyak terlibat dalam berbagai forum internasional. Indonesia menjadi anggota PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Konferensi Islam), Gerakan Non-Blok (GNB), dan lain sebagainya. Pendek kata, negara Indonesia memiliki kebijakan atau politik luar negeri.

1. Pengertian Politik Luar Negeri

Apakah gerangan politik luar negeri itu? Menurut J.R. Childs, politik luar negeri adalah pokok-pokok hubungan luar negeri dari suatu negara. Sementara itu, seorang peneliti utama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bidang hubungan internasional atau kebijakan politik luar negeri Riza Sihbudi mengatakan, bahwa politik luar negeri pada hakikatnya merupakan ”perpanjangan tangan” dari politik dalam negeri suatu negara.

Dari uraian dua pakar tersebut, maka politik luar negeri dapat diartikan sebagai kebijakan, sikap, dan tingkah pemerintahan suatu negara. Tidak lain dalam hal melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan badan-badan hukum internasional. Biasanya politik luar negeri suatu negara dipengaruhi minimal oleh tiga faktor. Masing-masing faktor tersebut meliputi:

a) faktor politik dalam negeri,

b) faktor kemampuan ekonomi dan militer, dan

c) faktor lingkungan internasional.

Sebaiknya Kamu Tahu

Faktor Pendorong Hubungan Kerja Sama Antarbangsa

Mengapa suatu negara mengadakan hubungan kerja sama dengan bangsa lain? Suatu negara mengadakan hubungan serta kerja sama dengan bangsa lain karena beberapa faktor berikut:

1. Persamaan Nasib

   Bangsa-bangsa yang memiliki persamaan nasib umumnya memiliki ikatan batin yang kuat. Ikatan batin semacam ini akhirnya menjadi faktor pendorong hubungan kerja sama. Contoh persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah (dalam hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, dan lain sebagainya.

2. Persamaan Politik

   Faktor kesamaan politik juga menjadi pendorong kerja sama antarbangsa. Contoh NATO, Pakta Warsawa (sudah dibubarkan), GNB (Gerakan Non-Blok), dan lain-lain.

3. Persamaan Kepentingan

Bangsa-bangsa yang memiliki kepentingan sama juga dapat menjadi faktor pendorong untuk mengadakan kerja sama. Contoh OPEC (kerja sama negara-negara pengekspor minyak), MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), NATO, ASEAN, dan lain sebagainya.

4. Persamaan Sejarah

Faktor persamaan sejarah seperti asal usul nenek moyang/keturunan misalnya juga menjadi pendorong terjadinya kerja sama antarbangsa. Salah satu contohnya Liga Arab, Zionisme (kerja sama bangsa Yahudi internasional untuk mendirikan negara Israel), dan lain sebagainya.

2. Tujuan dan Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Mengingat politik luar negeri bagi suatu negara merupakan pokok-pokok hubungan dengan bangsa lain maupun dunia internasional, dengan sendirinya ia mempunyai tujuan serta landasan. Lantas, apa tujuan dan landasan politik luar negeri Indonesia? Mari kita uraikan bersama.

a. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Bagaimana tujuan politik luar negeri Indonesia? Jika kita memerhatikan pembukaan UUD 1945, tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain tercermin dalam alenia pertama dan keempat.

Adapun uraian tentang tujuan politik luar negeri Indonesia dalam preambul tersebut kurang lebihnya sebagai berikut:

1) Indonesia mengupayakan agar setiap manusia di muka bumi bergaul dengan damai antara satu dengan yang lain, menghormati hak asasi manusia, juga menghormati kedaulatan negara masing-masing.
2) Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib tanpa pertikaian, perang, atau penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lain.
3) Indonesia mengupayakan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik antara negara satu dengan yang lain.
4) Indonesia berusaha agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga disumbangkan kepada masyarakat di negara lain.

5) Indonesia berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia*, Moh. Hatta menguraikan tujuan politik luar negeri Indonesia sbb:

1) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang tersebut tidak ada atau belum dihasilkan sendiri.
3) Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
4) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar, dan falsafah negara Indonesia.

b. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan politik luar negeri Indonesia adalah:

1) Pancasila sebagai Landasan idiil

   Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, Pancasila menjadi landasan yang menjiwai politik luar negeri Indonesia.
2) UUD 1945 (hasil amandemen) sebagai Landasan konstitusional

   UUD 1945 (dan hasil amandemennya) merupakan konstitusi bangsa Indonesia. Yang menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia dalam hal ini meliputi:
   - Pembukaan (alenia ke IV)
   - Batang tubuh: pasal 11 dan 13 ayat 1, 2, dan 3.
3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 Sebagai Landasan Operasional.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dinyatakan, bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri RI didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, serta Garis-Garis Besar Haluan Negara. Selanjutnya penjelasan dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tadi menyebutkan:

1) Pelaksanaan politik luar negeri RI haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan **landasan idiil** yang memengaruhi atau menjiwai politik luar negeri RI.

2) Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas hukum dasar, yaitu UUD 1945 sebagai **landasan konstitusional** yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.
3) Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah **landasan operasional** politik luar negeri RI yaitu suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Kegiatan

Kerjakan di buku tugas!
Ayo menyatakan Setuju dan Tidak Setuju
Berilah tanda cek (✓) pada kolom "setuju" dan "tidak setuju"

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Sebagai bangsa yang besar dan penduduknya Bhinneka Indonesia tidak perlu menjalin dengan bangsa-bangsa lain.		
2.	Inti dari politik luar negeri suatu negara adalah pokok-pokok hubungan luar negeri/internasional.		
3.	Pancasila menjiwai bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan luar negeri.		
4.	Politik luar negeri setiap negara sama.		
5.	Era globalisasi memengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan pada buku tugas!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Politik luar negeri menurut J.R. Childs adalah ....
2. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah ....
3. Negara kita menjadi anggota berbagai organisasi internasional, hal itu membuktikan bahwa negara kita memiliki ....
4. Tujuan politik luar negeri Indonesia tercantum dalam ....
5. ”Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang tersebut tidak ada atau belum dihasilkan sendiri,” merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia menurut ....
6. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah ....
7. ”Indonesia berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi” merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia yang tercantum dalam ....
8. Politik luar negeri sebagai ”perpanjangan tangan” politik dalam negeri merupakan definisi politik luar negeri menurut ....
9. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah ....
10. Di antara undang-undang yang mengatur hubungan luar negeri Indonesia adalah ....

B. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

Bagaimana perjalanan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, berikut akan diuraikan tentang sifat politik luar negeri Indonesia serta perkembangan-perkembangannya dewasa ini.

1. Bebas Aktif Sebagai Sifat Politik Luar Negeri Indonesia

Sejak Bung Hatta menyampaikan pidato berjudul ”*Mendajung Antara Dua Karang*” (1948) negara Republik Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. ***Bebas*** artinya Indonesia berhak menentukan sendiri dalam sikap serta pandangan internasionalnya, terlepas dari kekuatan-kekuatan negara besar. ***Aktif*** artinya tetap ikut andil dalam setiap upaya meredakan ketegangan yang terjadi di dunia internasional. RI tidak berpangku tangan dalam setiap persengketaan yang terjadi di berbagai kawasan internasional.

2. Beberapa Pengalaman Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

Dapatkah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif tersebut mengalami perubahan? Secara umum seharusnya tidak. Namun, karena politik luar negeri merupakan ”perpanjangan tangan” dari politik dalam negeri perubahan tersebut bisa menjadi mungkin. Pengalaman-pengalaman pada zaman Presiden Sukarno tahun 1960-an, zaman Orde Baru, juga Habibie, Abdurrahman Wahid, serta Megawati ketika memegang pemerintahan adalah sebagai contohnya.

Pada zaman Presiden Sukarno (1945-1965) misalnya, politik luar negeri RI saat itu condong ke negara-negara sosialis. Ingat, saat itu ada istilah ”poros Jakarta Beijing”. Selain itu, hubungan Jakarta-Moskow (Rusia), Beijing (RRC), dan Hanoi (Vietnam) yang merupakan kekuatan penting sosialis (komunis) juga erat. Sebaliknya terhadap negara-negara barat, hubungannya tampak renggang atau bahkan bermusuhan.

Bagaimana dengan politik luar negeri pada zaman Orde Baru? Bagaimana pula dengan pengalaman politik luar negeri pada masa Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati?

Pada zaman Orde Baru politik luar negeri Indonesia justru berbalik total. Politik luar negeri RI menjadi lebih condong kepada negara-negara Barat di bawah Amerika Serikat (AS). Sementara itu politik luar negeri RI pada masa pemerintahan Habibie tidak ada yang menonjol, sebab keadaan pemerintah ketika itu lebih banyak disibukkan oleh berbagai masalah dalam negeri.

Zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, politik luar negeri RI malah tampak berbeda lagi. Ketika itu presiden Wahid berkunjung ke RRC dan AS sekaligus. Terakhir, pada masa pemerintahan Megawati, kebijakan politik luar negeri RI kembali condong kepada negara-negara Barat. Karena itu, meskipun secara umum politik luar negeri RI adalah tetap, akan tetapi, arahnya tergantung kepada kepentingan nasionalnya saat itu.

3. Perkembangan Politik Luar Negeri Dewasa Ini

Bagaimana perkembangan politik dalam era globalisasi dewasa ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut antara lain bisa disimak sebagai berikut.

a. Politik Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

Undang-undang ini berisi tentang hubungan luar negeri. Dalam hubungannya dengan politik luar negeri, undang-undang ini menyatakan, bahwa ”hubungan luar negeri yang bebas dan aktif diabdikan untuk kepentingan nasional”. Kata ”bebas aktif” merupakan politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan politik netral. Akan tetapi merupakan bentuk politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada suatu kekuatan dunia. Selain itu, secara aktif Indonesia juga memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pikiran, maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan ”diabdikan kepada kepentingan nasional” berarti politik luar negeri yang dilakukan adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

b. Politik Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada menteri untuk mengambil langkah-langkah dalam membuat serta mengesahkan perjanjian internasional.

c. Politik Luar Negeri dalam GBHN 1999-2004 dan RPJM 2000 - 2004

Pada bagian ”Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional sebagai amanat GBHN 1999 - 2004” dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2000 - 2004 tentang Politik Luar Negeri dikatakan : ”Terwujudnya politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

d. Politik Luar Negeri dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025

RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai penjabaran dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan dengan kurun waktu 2005-2025.

Pada Bab IV tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menyangkut hubungan luar negeri antara lain disebutkan: ”dalam rangka Indonesia yang maju, mandiri dan adil, Indonesia sangat penting dalam politik luar negeri dan kerjasama lainnya baik di tingkat regional, maupun internasional mengingat situasi politik dan hubungan internasional lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat. Selanjutnya dalam pelaksanaan politik luar negeri tersebut dapat diringkaskan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Peranan hubungan luar negeri ditingkatkan dengan penekanan pada proses pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara bangsa.
- Peningkatan kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan di organisasi-organisasi internasional.
- Optimalisasi pemanfaatan diplomasi dan hubungan luar negeri dengan memaknai secara positif berbagai peluang menguntungkan bagi kepentingan nasional yang muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional yang dinamis.
- Peningkatan efektifitas dan perluasan fungsi jaringan-jaringan yang ada demi membangun kembali solidaritas ASEAN di bidang politik, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang solid.
- Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya, baik antarnegara maupun antar masyarakat di dunia.
- Penguatan jaringan kebudayaan dan kerja sama yang produktif antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri.

Rangkuman

1. Politik luar negeri suatu negara merupakan ”perpanjangan tangan” dari politik luar negerinya.
2. Sifat politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif.
3. Meskipun politik luar negeri Indonesia tidak berubah, sering kali arahnya tergantung kepada penguasa yang memerintah.
4. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional.
5. Situasi era global dan serba berubah cepat berpengaruh terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Sebaiknya Kamu Tahu

Enam Prinsip Pokok Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia mendasarkan politik luar negerinya pada enam prinsip pokok. Masing-masing prinsip tersebut adalah:

- Negara Indonesia menjalankan politik damai.
- Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
- Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum dan organisasi internasional untuk memimpin perdamaian yang kekal.
- Negara Indonesia berusaha mempermudah pertukaran pembayaran internasional.
- Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada piagam PBB.
- Negara Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah.

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo Membuat Kliping Peristiwa

Kegiatan Indonesia dengan negara-negara lain/dunia internasional cukup banyak. Mungkin dengan negara-negara satu kawasan (ASEAN), mungkin juga dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara.

Dalam kegiatan kali ini, carilah peristiwa yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan bangsa lain. Berilah komentarmu atas peristiwa (yang kamu pilih) dari sudut politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Susunlah hasil kerjamu menjadi laporan tertulis untuk dikumpulkan sekaligus diberi nilai. Selamat bertugas!

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Tokoh yang menggagas politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah ....
2. Pada zaman Presiden Sukarno politik luar negeri Indonesia condong kepada negara-negara ....
3. Kata bebas dalam politik luar negeri Indonesia artinya ....
4. Pada zaman Orde Baru politik luar negeri Indonesia condong kepada ....
5. Arti aktif dalam pengertian luar negeri Indonesia adalah ....
6. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk ....
7. Presiden Indonesia yang pernah mengunjungi negara Amerika Serikat sekaligus RRC adalah ....
8. Indonesia bersahabat dengan bangsa lain di dunia atas dasar ....
9. Zaman presiden Megawati politik luar negeri Indonesia condong kepada ....
10. Judul pidato Moh. Hatta tahun 1948 tentang politik luar negeri Indonesia adalah ....

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk ....
   a. kepentingan nasional
   b. kepentingan dunia
   c. kepentingan kawasan
   d. kemerdekaan bangsa
2. Sifat politik luar negeri Indonesia adalah ....
   a. nonblok
   b. bebas
   c. aktif
   d. bebas dan aktif
3. Berikut ini yang termasuk faktor berpengaruh dalam kebijakan politik luar negeri adalah ....
   a. kemerdekaan
   b. jumlah penduduk
   c. kemampuan ekonomi
   d. status negara
4. Kata ”bebas” dalam pengertian politik bebas aktif adalah ....
   a. tidak punya pilihan
   b. ikut kepada negara besar
   c. malu dengan budaya daerah sendiri
   d. menyembunyikan budaya daerah sendiri
5. Termasuk landasan idiil politik luar negeri Indonesia ....
   a. UUD 1945
   b. GBHN
   c. Pancasila
   d. RPJM Nasional
6. Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib tanpa pertikaian, perang, atau penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lain. Pernyataan tersebut merupakan tujuan hubungan luar negeri Indonesia dalam ....
   a. Pancasila
   b. Batang tubuh UUD 1945 (hasil amandemen)
   c. Pembukaan UUD 1945
   d. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

7. Alasan penting pengiriman pasukan perdamaian ke suatu negara yang sedang dilanda sengketa ....
   a. melaksanakan ketertiban dunia
   b. membela kemerdekaan suatu negara
   c. melaksanakan amanat PBB
   d. mencari muka di dunia internasional

8. Indonesia pernah menjadi penengah konflik antara pemerintah Filipina dan Moro. Dari peristiwa tersebut berarti politik luar negeri Indonesia menunjukkan sifat ....
   a. bebas
   b. aktif
   c. nonblok
   d. merdeka

9. Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pernah ikut salah satu blok, yakni apa yang dikenal dengan ”Poros Jakarta-Peking”. Hal tersebut terjadi pada masa ....
   a. Orde Lama
   b. Orde Baru
   c. Orde Reformasi
   d. awal kemerdekaan

10. Gagasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif muncul sejak tahun ....
   a. 1945
   b. 1946
   c. 1947
   d. 1948

11. Menurut J.R. Childs, politik luar negeri berarti ....
   a. pergaulan dengan negara lain
   b. pokok-pokok hubungan luar negeri
   c. kerja sama bilateral
   d. kerja sama multilateral

12. Indonesia termasuk salah satu negara sponsor penyelenggaraan KAA (Konferensi Asia Afrika). Dalam kaitannya dengan sifat politik luar negeri Indonesia, hal tersebut termasuk pengertian ....
   a. bebas
   b. aktif
   c. nonblok
   d. merdeka

13. Landasan konstitusionil politik luar negeri Indonesia adalah ....
   a. Pancasila
   b. UUD 1945
   c. GBHN
   d. RPJM Nasional

14. Selain untuk kepentingan nasional, sifat politik luar negeri bebas dan aktif juga ditujukan untuk ....
    a. mencari dukungan
    b. membantu negara lain
    c. ikut campur negara lain
    d. mencari kedudukan internasional
15. Berikut ini merupakan organisasi antarnegara yang didasarkan oleh faktor persamaan kepentingan ....
    a. Liga Arab
    b. GNB
    c. MEE
    d. ASEAN

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah ....
2. Tujuan pilihan luar negeri Indonesia tercantum dalam ....
3. Politik luar negeri menurut J.R. Childs adalah ....
4. Di antara Undang-Undang yang mengatur hubungan luar negeri Indonesia adalah ....
5. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah ....
6. Indonesia bersahabat dengan bangsa lain di dunia atas dasar ....
7. Tokoh yang menggagas politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah ....
8. Kata bebas dalam politik luar negeri Indonesia adalah ....
9. Judul pidato Moh. Hatta tahun 1948 tentang politik luar negeri Indonesia adalah ....
10. Pada zaman Orde Baru Politik luar negeri Indonesia condong kepada ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang kamu ketahui tentang politik luar negeri?
2. Jelaskan pengertian politik luar negeri bebas aktif!
3. Sebutkan tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Moh. Hatta!
4. Apa yang dimaksud dengan ”diabdikan untukkepentingan nasional” pelaksanaan politik luar negeri Indonesia?
5. Jelaskan landasan politik luar negeri Indonesia!

Bab X

Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional

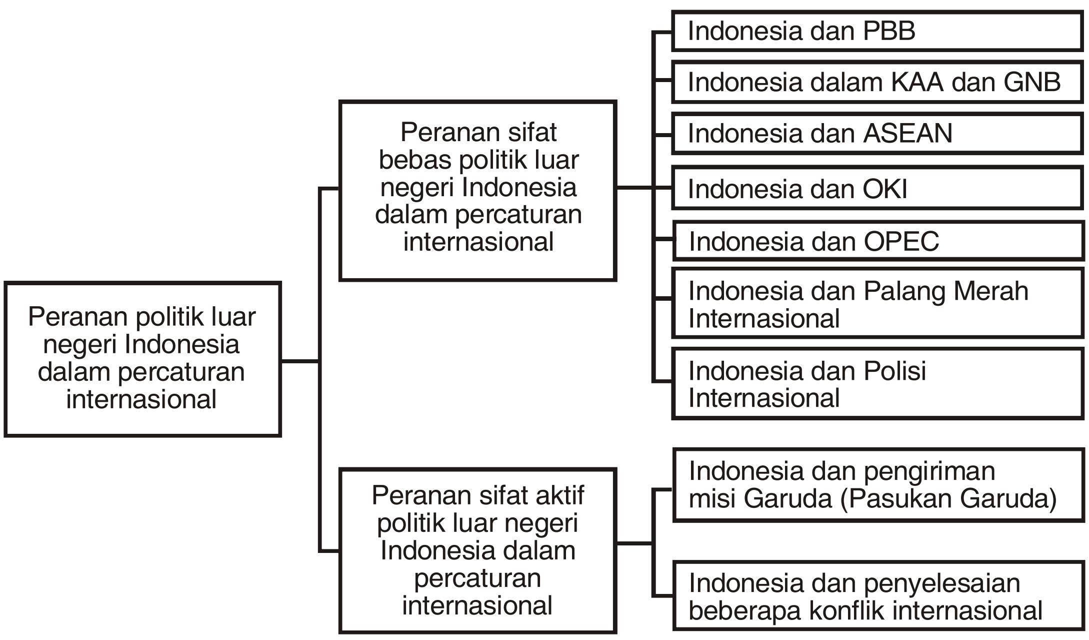


Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 10.1 Suasana KAA di Bandung tahun 1955

Dasa Sila Bandung lahir pada saat pertemuan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Pertemuan tersebut dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut adalah salah satu contoh peranan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dalam percaturan internasional. Bagaimana peranan politik Indonesia yang lain dalam percaturan yang sama?

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

1. memberikan contoh-contoh peranan sifat bebas politik luar negeri Indonesia dan
2. menunjukkan contoh-contoh peran sifat aktif politik luar negeri Indonesia.

Dasa Sila Bandung

Bandung, 18-24 April 1955. Saat itu 29 delegasi hadir mewakili bangsa-bangsa yang berasal dari Benua Asia dan Afrika. Mereka membicarakan banyak hal dalam pertemuan itu. Mereka juga menamakan pertemuan tersebut sebagai Konferensi Asia-Afrika.

Siapa pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika itu? Dalam catatan sejarah, penggagas Konferensi Asia-Afrika terdiri para perdana menteri dari lima negara. Masing-masing dari lima perdana menteri tersebut adalah :

1. Indonesia : Mr. Ali Sastroamidjojo
2. India : Pandit Jawaharlal Nehru
3. Pakistan : Mohammad Ali
4. Sri Lanka : Sir John Kotelawala
5. Burma (sekarang Myanmar) : U Nu

Sebenarnya, ada dua pertemuan persiapan sebelum Konferensi Asia-Afrika diselenggarakan. Pertemuan pertama diadakan di Kolombo (Sri Lanka) tanggal 28 April - 2 Mei 1954. Pertemuan kedua di Bogor tanggal 28 - 29 Desember 1954.

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan prinsip-prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya dikenal dengan ”Dasa Sila Bandung”, yang isinya sebagai berikut.

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dengan tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial (keutuhan wilayah) semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar (adikuasa) maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain.
5. Menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara bersama-sama (kolektif) yang sesuai dengan piagam PBB.
6. a. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari peraturan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar.
   b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas nasional atau kemerdekaan politik suatu negara.

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitras (pemutusan pertikaian oleh seorang wasit yang dipilih oleh pihak-pihak bertikai/bersengketa) atau menyelesaikan hukum atau cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan bekerja sama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Kata Kunci

- Percaturan internasional
- Perdamaian
- Konfrontasi
- Kriminal
- Pasukan Garuda

A. Peranan Sifat Bebas Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional

Dalam percaturan internasional, perwujudan dari sifat bebas dari politik luar negeri Indonesia cukup banyak. Sebagai contoh, keterlibatan negara Indonesia dalam berbagai organisasi kerja sama ekonomi, sosial, budaya, juga politik dan keamanan. Tentu juga keberadaan organisasi-organisasi tersebut ada yang bertaraf regional dan internasional.

Untuk lebih jelasnya, beberapa contoh peranan sifat bebas dari politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sering disebut dengan UNO (*United Nations Organization*). Organisasi ini dibentuk setelah organisasi sebelumnya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) gagal menjalankan perannya mempertahankan perdamaian dunia. Pembentukan PBB juga didorong oleh pecahnya Perang Dunia kedua.

PBB merupakan organisasi bangsa-bangsa sedunia dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia. Anggota perintisnya berjumlah 50 negara yang kemudian dikenal dengan negara anggota pendiri. Tujuan serta prinsip dari PBB adalah :

a. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
b. Memperkembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dengan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan berdasarkan persamaan hak serta kedudukan.

c. Meningkatkan kerja sama internasional di bidang sosial, ekonomi serta budaya.
d. Menjadikan pusat dari kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

Bagaimana peranan sifat bebas politik luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan PBB? Pada awal kemerdekaan politik luar negeri Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal, sebab perhatian Indonesia untuk mengatasi berbagai gejolak. Kita tahu Belanda saat itu ingin kembali mencengkeramkan kekuasaannya di Indonesia. Selain itu ada juga beberapa pemberontakan yang terjadi di tanah air.

Sejak pengakuan kedaulatan RI 27 September 1949 dan negara RI memperoleh pengakuan secara internasional, perintisan politik luar negeri Indonesia barulah dimulai. Usaha pertama dibuktikan dengan diterimanya RI menjadi anggota PBB tanggal 27 September 1950. Saat itu negara RI menjadi anggota PBB yang ke-60.

Pada tanggal 20 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, dengan alasan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ingat, saat itu dalam hal politik luar negeri Indonesia sedang konfrontasi dengan Negeri Jiran tersebut. Setelah keadaan berubah, Indonesia kembali lagi masuk PBB pada tanggal 28 September 1966.

2. Indonesia dalam KAA dan GNB

a) KAA (Konferensi Asia Afrika)

KAA (Konferensi Asia Afrika) merupakan konferensi yang dihadiri oleh para wakil negara berasal dari negara-negara Asia dan Afrika. Tujuan dari konferensi tersebut adalah Kemerdekaan dari penjajahan. Dengan peran politik luar negerinya Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa konferensi itu. Penyelenggara KAA pertama, di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 berlangsung gemilang serta sukses. Dalam konferensi tersebut dihasilkan keputusan bersama yang terkenal dengan *Dasa Sila Bandung* (sepuluh prinsip hubungan internasional).

b) GNB (Gerakan Negara Non-Blok)

Hampir semua peserta KAA termasuk negara Non-Blok. Karena itu, antara KAA dengan GNB punya keterkaitan yang erat. Gagasan Non-Blok (*non-align*) merupakan gerakan dari negara-negara berkembang sebagai upaya agar tidak menjadi sasaran pengaruh dua blok kekuatan besar (negara-negara adikuasa). Dua blok kekuatan yang dimaksud adalah blok Barat di bawah Amerika Serikat dan blok Timur di bawah pimpinan

Uni Soviet. Saat itu blok Barat membentuk pakta pertahanan yang dikenal dengan **NATO** *(North Atlantic Treaty Organization)*. Sementara itu blok Timur membentuk pakta pertahanan yang dikenal sebagai **Pakta Warsawa**. Penggagas gerakan Nonblok adalah:

1) Presiden Sukarno (Indonesia)
2) Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India)
3) Gamal Abdul Naser (presiden Mesir)
4) Kwame Nkrumah (presiden Ghana)
5) Joseph Broz Tito (presiden Yugoslavia)

KTT GNB pertama diselenggarakan di Beograd (Yugoslavia) tanggal 1-6 September 1961 dan dihadiri oleh 25 negara. KTT tersebut merekomendasikan perlunya penghapusan segala jenis kolonialisme kepada Sidang Umum PBB. Pada tanggal 1-7 Juli 1992 Indonesia menjadi tuan rumah atas penyelenggaraan KTT X GNB, dan Presiden Suharto menjadi ketua GNB masa bakti 1992-1995.

3. Indonesia dan ASEAN

ASEAN *(Association of Sout East Asia Nations)* merupakan organisasi kerja sama regional negara-negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara perintis berdirinya ASEAN (lihat kembali bab sebelumnya tentang ”Kerja sama Negara-negara Asia Tenggara”).

4. Indonesia dan OKI (Organisasi Konferensi Islam)

OKI (Organisasi Konferensi Islam) merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara Islam pada tanggal 25 September 1969, di Rabat, Maroko.

Negara Islam yang dimaksud adalah negara yang secara konstitusional Islam atau negara yang mayoritas penduduknya muslim. Pemrakarsa pembentukan OKI adalah Raja Faisal (Arab Saudi) dan Raja Hassan II (Maroko). Latar belakang didirikannya OKI adalah solidaritas umat Islam atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa di Palestina oleh tentara Zionis Israel. Secara resmi Indonesia masuk menjadi anggota OKI pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ketiga tahun 1972 di Jedah, Arab Saudi.

5. Indonesia dan OPEC (*Organization of Petrolium Exporting Countries*)

OPEC merupakan organisasi (kerja sama internasional) negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 September 1960, di Bagdad (Irak). Pemrakarsanya adalah lima negara : Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Indonesia salah satu negara penting penghasil minyak di Asia, dan telah menjadi anggota organisasi ini sejak tahun 1962.

Faktor pendorong berdirinya OPEC adalah penurunan harga minyak dunia oleh sebab permainan raksasa-raksasa perusahaan minyak seperti Shell, Exxo, Mobil, dan Gulf. Perusahaan-perusahaan minyak raksasa ini memonopoli perdagangan minyak ke negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.

6. Indonesia dan Palang Merah Internasional

Jalinan Indonesia dengan Palang Merah Internasional dirintis sejak awal kemerdekaan. Mula-mula Presiden Sukarno memerintahkan Menteri Kesehatan (saat itu Boentaran Martoatmodjo) untuk mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI). Akhirnya PMI terbentuk pada tanggal 17 September 1945 dengan ketua Prof. Dr. Mochtar.

Peran PMI pada saat itu adalah menangani para korban perang (mempertahankan) kemerdekaan. Untuk menarik simpati dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan pada saat itu, PMI mengadakan hubungan dengan Palang Merah Internasional.

Saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Palang Merah Internasional banyak memberikan bantuan obat-obatan, pakaian, makanan, uang dan berbagai bentuk fasilitas penting lain. Sebaliknya (setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan berhasil) Indonesia juga banyak mengirim bantuan kepada bangsa-bangsa lain seperti Afrika, India, Pakistan, Vietnam, Laos, Filipina, dan lain-lain.

7. Indonesia dan Polisi Internasional

Dalam kaitannya dengan era globalisasi, tindakan-tindakan pidana maupun perbuatan kriminal banyak dilakukan penjahat-penjahat kelas dunia. Mereka membentuk jaringan yang rapi dalam melakukan tindakan-tindakan itu. Ada penyelundupan, pembajakan pesawat udara, narkotika serta obat bius, terorisme, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut ada wadah kerja sama antar lembaga kepolisian internasional yang dikenal dengan Interpol *(International Police).* Indonesia antara lain telah menjadi anggota Interpol, dan berkali-kali diundang dalam pertemuan-pertemuan Interpol.

Sebaiknya Kamu Tahu

Indonesia dan Hubungan Internasional Bidang Ekonomi Serta Keuangan

Sebagai negara berkembang Indonesia tentunya berupaya ingin mengejar ketertinggalannya. Cara yang ditempuh? Tidak lain adalah dengan menjalin kerja sama internasional demi memajukan pembangunan ekonomi nasional. Bentuk kerja sama internasional dari memajukan pembangunan ekonomi nasional. Bentuk kerja sama internasional tersebut berupa pinjaman modal, pendidikan tenaga ahli, penerapan teknologi modern, peningkatan industri pariwisata, dan lain-lain.

Untuk keperluan itu, Indonesia membuka pintu bagi para penanam modal asing sejauh mereka mau tunduk kepada undang-undang dan aturan permainan negara Indonesia. Penanaman-penanaman modal asing tersebut bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, tekstil, pengawetan makanan, perakitan kendaraan bermotor, juga industri kimia. Pelaksanaannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang berlaku sejak tanggal 10 Januari 1967.

Indonesia dalam hal ini banyak mendapat bantuan modal dari badan-badan internasional seperti :

1. Bank Dunia (*World Bank*),
2. Dana Bantuan Internasional/IMF *(International Monetary Fund)*,
3. Asosiasi Pembangunan Internasional *(International Development Association),*
4. Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan Internasional (*Internasional Reconstruction Bank and Development*),
5. IGGI/*International Govermental Group on Indonesia* (telah berubah menjadi CGI/*Consultative Govermental on Indonesia*) negara-negara kreditor untuk Indonesia.

Kegiatan

Ayo Membuat Kliping Peristiwa

Karena sifat bebas dalam politik luar negerinya, kegiatan Indonesia dengan negara-negara lain/dunia internasional cukup banyak. Kegiatan-kegiatan tersebut mungkin dengan negara-negara satu kawasan (ASEAN), mungkin juga dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara.

Dalam kegiatan kali ini, carilah peristiwa yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan bangsa lain. Berilah komentarmu atas peristiwa (yang kamu pilih) dari segi sifat bebas politik luar negeri Indonesia. Susunlah hasil kerjamu menjadi laporan tertulis untuk dikumpulkan sekaligus diberi nilai. Selamat bertugas!

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Perdana menteri Indonesia yang menjadi pemrakarsa KAA adalah ....
2. Sebelum PBB terbentuk, organisasi internasional antar bangsa-bangsa bernama ....
3. Sifat bebas dari politik luar negeri Indonesia artinya ....
4. Dasa Sila Bandung berarti ....
5. KTT GNB pertama kali diselenggarakan di ... tanggal ....
6. OKI merupakan organisasi yang didirikan dengan latar belakang ....
7. Indonesia menjadi salah satu negara anggota OPEC yang merupakan organisasi ....
8. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB dengan alasan ....
9. Antara KAA dan GNB berkaitan erat, sebab ....
10. Wadah organisasi kepolisian internasional adalah ....

B. Peranan Sifat Aktif Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional

Seperti pernah disinggung, sifat aktif dari politik luar negeri artinya Indonesia tidak berpangku tangan terhadap konflik dan persengketaan yang terjadi di dunia Internasional. Dalam percaturan internasional, banyaklah contoh peranan sifat aktif dari politik luar negeri Indonesia itu. Perhatikan contoh-contoh peranan sifat aktif dari politik luar negeri Indonesia berikut.

1. Indonesia dan Pengiriman Misi Garuda (Pasukan Garuda)

Dalam kaitan dengan politik luar negerinya, berkali-kali Indonesia menjadi pasukan perdamaian atas mandat PBB. Pasukan perdamaian itu bisa dikenal sebagai Kontingen Garuda. Pasukan tersebut diterjunkan ke kawasan-kawasan yang sedang dilanda konflik serta menjadi penjaga perdamaian.

Bagaimanakah peranan yang ditunjukkan Indonesia melalui Kontingen Garuda dalam berbagai misi perdamaian tersebut? Mari kita simak uraiannya.

a. Pasukan Garuda I

Tahun 1956. Ketika itu kecamuk perang terjadi di Timur Tengah. Pihak-pihak yang terlibat adalah Mesir melawan pasukan gabungan Inggris, Prancis, dan Israel.

Dalam sidang umumnya PBB memutuskan untuk membentuk pasukan darurat pemelihara perdamaian. Maka, tanggal 5 November 1956 dibentuklah komando pasukan PBB yang diberi nama UNEF (*United Nations Emergency Forces*).

Tanggal 8 November 1956 Indonesia menyatakan bersedia menyumbangkan pasukan sebagai bagian dari UNEF. Sambutan dari PBB terbuka. Tanggal 28 Desember 1956 dibentuklah kontingen pasukan yang terdiri dari 550 orang. Kontingen ini dikomandani oleh Kolonel Hartoyo dan kemudian digantikan oleh Letkol. Saudi. Kontingen ini dikenal sebagai Pasukan Garuda I, dan berangkat ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957.

b. Pasukan Garuda II, III, serta IV, V, VI, VII, dan VIII

Pasukan Garuda II dan III merupakan wakil misi perdamaian PBB untuk negara Kongo (sekarang Zaire). Peristiwanya terjadi pada tahun 1960 dan jalan ceritanya seperti ini. Bulan Juni 1960 Kongo memperoleh kemerdekaan dari Belgia. Akan tetapi kemerdekaan tersebut malah menjadi penyebab perang saudara negara di Benua Afrika itu. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih hebat, juga untuk mencegah kemungkinan adanya campurtangan negara-negara asing PBB membentuk UNOC *(United Nation Operation For the Congo)*.

Kontingen Indonesia pada waktu itu terdiri dari 330 orang dan kemudian dikenal sebagai Pasukan Garuda II. Pemimpin kontingen pasukan tersebut adalah Kolonel Prijatna. Sedang Komandan batalion dipegang oleh Solichi GP (Gautama Purwanegara). Kontingen Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960.

Atas permintaan UNOC kontingen Indonesia diperbesar hingga menjadi satu birigade (350 orang) yang selanjutnya diberi nama Pasukan Garuda III. Pasukan Garuda III ini bertugas di Kongo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964. Kontingennya dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris, sedangkan komandan brigade dipegang oleh Kolonel Sabirin Moctar.

Pasukan Garuda IV, V, VI, VII, dan VIII dikirim untuk misi perdamaian di kawasan Indocina, Vietnam dan Kamboja (baca kembali bab ”Peranan Indonesia di Lingkungan Negara-Negara Asia Tenggara”)

Sebaiknya Kamu Tahu

Kontingen Pasukan Garuda XXIII/A

Kontingen-kontingen Pasukan Garuda memang sudah malang melintang menjadi pasukan perdamaian PBB. Setiap kali terjadi konflik atau sengketa dan PBB turun tangan mengirim pasukan perdamaian, bisa dipastikan kontingen Pasukan Garuda selalu tampil.

Kontingen Pasukan Garuda yang menjadi wakil pasukan perdamaian pada saat ini (Agustus 2007) adalah Kontingen Pasukan Garuda XXIII/A di Lebanon. Tugas pasukan tersebut adalah mengawasi pelaksanaan gencatan senjata/ perdamaian antara pasukan Israel dengan Hezbollah.

2. Indonesia dan Penyelesaian Beberapa Konflik Internasional

Selain melalui kontingen Pasukan Garuda, perwujudan sifat aktif politik luar negeri Indonesia ditunjukkan melalui peranannya sebagai penengah dalam berbagai ketegangan serta konflik di dunia internasional. Ingat, Indonesia pernah menjadi penengah konflik yang terjadi di Kamboja (karena masalah pendudukan Kamboja oleh pasukan Vietnam). Indonesia juga menjadi penengah sengketa di negeri Filipina (antara bangsa Moro/MNLF dan pemerintah Filipina).

Rangkuman

1. Indonesia memiliki kebebasan sepenuhnya dalam hal pandangan serta sikap hubungan internasional negaranya, sebab politik luar negerinya bersifat bebas.
2. Sifat bebas dalam politik luar negeri Indonesia bukan berarti netral, akan tetapi dibarengi sifat aktif. Sifat aktif dalam politik luar negeri Indonesia artinya tidak berpangku tangan terhadap segala ketegangan dan konflik yang terjadi di dunia internasional.
3. Peranan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif cukup beragam. Peranan-peranan tersebut pada akhirnya dikembalikan untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia.
4. Dengan politik luar negeri yang bersifat bebas, Indonesia banyak terlibat dalam berbagai organisasi kerjasama internasional.
5. Dengan politik luar negeri yang bersifat aktif, Indonesia banyak berperan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Tugas

Kerjakan di buku tugasmu!
Ayo menyatakan setuju dan tidak setuju
Berilah tanda (✓) cek pada kolom ”setuju” dan ”tidak setuju”

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Terhadap berbagai ketegangan serta konflik yang terjadi di dunia internasional Indonesia berusaha mendamaikan.		
2.	Menjadi wakil pasukan perdamaian untuk PBB adalah bukti sifat bebas dari politik luar negeri Indonesia.		
3.	Saat menjadi penengah atas berbagai ketegangan dan konflik yang terjadi di dunia internasional, Indonesia selalu sukses.		
4.	Negara Indonesia tidak mempedulikan konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro.		
5.	Sifat aktif politik luar negeri Indonesia merugikan bangsa sendiri.		

Latihan Pemahaman Materi

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Kontingen Pasukan Garuda I dikirim ke ....
2. UNOC dibentuk PBB untuk menyelesaikan konflik di ....
3. Pemimpin kontingen Pasukan Garuda I bernama ....
4. UNEF dibentuk PBB untuk menegakkan perdamaian di ....
5. Pemimpin Pasukan Garuda II bernama ....
6. Pemimpin kontingen Pasukan Garuda III adalah ....
7. Kontingen Pasukan Garuda IV bertugas di negara ....
8. Indonesia menjadi penengah konflik masalah Moro di negara ....
9. Dewasa ini pasukan Garuda XXIII/A sedang melaksanakan misi perdamaian PBB di ....
10. Sifat aktif politik luar negeri Indonesia berarti ....

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Perdana menteri Indonesia yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan KAA di Bandung adalah ....
   a. Adam Malik
   b. Mochtar Kusumaatmadja
   c. Mr. Ali Sastroamidjojo
   d. Ali Alatas SH
2. Pentingnya politik luar negeri suatu negara adalah ....
   a. menjalin hubungan-hubungan luar negeri
   b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan wisata luar negeri
   c. menjadi arah berbagai kebijakan dengan luar negeri
   d. mengadakan kunjungan-kunjungan ke luar negeri

3. Sesudah Perang Dunia kedua situasi dunia diliputi perang dingin antara dua blok negara super power Blok Timur di bawah pimpinan ....
   a. Amerika Serikat
   b. Jerman Barat
   c. RRC
   d. Uni Soviet
4. Sasaran dan tujuan politik luar negeri Indonesia tercapai apabila ....
   a. Indonesia terlibat salah satu fakta pertahanan
   b. Indonesia aktif dalam salah satu blok
   c. Indonesia aktif meredakan konflik di dunia internasional
   d. Indonesia ikut campur urusan negara lain
5. Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi adalah ....
   a. AFTA
   b. FAO
   c. OKI
   d. OPEC
6. Sebelum diselenggarakan KAA ada dua kali pertemuan persiapan. Pertemuan persiapan pertama diadakan di Kolombo, sedang pertemuan kedua diselenggarakan di ....
   a. Jakarta
   b. Bandung
   c. Bogor
   d. Surabaya
7. Contoh sifat aktif politik luar negeri Indonesia adalah ....
   a. menjadi anggota PBB
   b. kerjasama dalam pertahanan
   c. mengirim pasukan perdamaian
   d. menandatangani perjanjian bilateral
8. Masalah penting yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB adalah ....
   a. politik luar negeri Indonesia bersifat bebas
   b. politik luar negeri Indonesia bersifat aktif
   c. Indonesia negara nonblok
   d. Konfrontasi dengan Malaysia

9. Nama berikut termasuk orang yang menjadi ketua pertama PMI (Palang Merah Indonesia) adalah ....
   a. Boetaran Martoatmodjo
   b. Prof. Dr. Mochtar
   c. Mr. Ali Sastroamidjojo
   d. Mochtar Sabirin
10. Tujuan nasional yang hendak dicapai Indonesia dalam kaitannya dengan politik luar negeri tercantum dalam ....
   a. Pembukaan UUD 1945
   b. Pancasila
   c. Pasal-pasal UUD 1945
   d. Aturan peralihan dan tambahan
11. Organisasi berikut adalah kumpulan negara-negara Asia Pasifik ....
   a. AFTA
   b. APEC
   c. ASEAN
   d. OPEC
12. Hingga sekarang Indonesia tidak mengadakan hubungan (secara resmi) dengan negara Israel. Dalam kaitannya dengan sifat politik luar negeri bebas aktif, hal tersebut merupakan contoh pelaksanaan politik luar negeri yang ....
   a. bebas
   b. nonblok
   c. aktif
   d. netral
13. Alasan keeratan hubungan antara KAA dan GNB adalah ....
   a. para anggota KAA dan GNB negara berkembang
   b. para peserta GNB sama dengan KAA
   c. mayoritas peserta KAA menjadi anggota GNB
   d. negara-negara peserta KAA dan GNB
14. Wakil dari Indonesia dalam KTT I GNB adalah ....
   a. Adam Malik
   b. Presiden Soekarno
   c. Mr. Ali Sastroamidjojo
   d. H.R. Dharsono
15. Sesudah keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia kembali masuk pada tanggal ....
   a. 25 September 1966
   b. 26 September 1966
   c. 27 September 1966
   d. 28 September 1966

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Sikap bebas dari politik luar negeri Indonesia artinya ....
2. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB dengan alasan ....
3. Wadah organisasi kepolisian internasional adalah ....
4. Antara KAA dan GNB berkaitan erat, sebab ....
5. Dasa Sila Bandung berarti ....
6. KTT GNB pertama kali diselenggarakan di ....
7. Perdana Menteri Indonesia yang menjadi pemrakarsa KAA adalah ....
8. Pemimpin Pasukan Garuda II bernama ....
9. UNOC dibentuk PBB untuk menyelesaikan konflik di ....
10. UEF dibentuk PBB untu menegakkan perdamaian di ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan pengertian politik luar negeri Indonesia bebas aktif!
2. Bagaimana peran Indonesia dalam penyelenggaraan KAA?
3. Apa yang kamu ketahui tentang OKI?
4. Jelaskan peranan sifat bebas politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional!
5. Apa arti pengiriman pasukan perdamaian (Garuda) ke negeri yang sedang dilanda sengketa?

Uji Kompetensi Semester Genap

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Jumlah anggota BPUPKI seluruhnya kurang lebih ....
   a. 60 orang
   b. 64 orang
   c. 67 orang
   d. 70 orang

2. Tokoh yang menyampaikan pokok-pokok pikiran dasar negara serta menyebutkan lima dasar negara sebagai Pancasila adalah ....
   a. Sukarno
   b. Muh. Yamin
   c. Moh. Hatta
   d. Supomo

3. Tugas Panitia Kecil dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah ....
   a. menyusun kembali tentang usulan-usulan dasar negara
   b. membuat aturan main proses penyusunan Pancasila
   c. merumuskan kembali pidato Sukarno
   d. meneliti usulan-usulan dasar negara

4. Tidak ada anggota yang merasa kalah dalam musyawarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, meskipun pendapat-pendapat di antara mereka tidak disetujui. Hal tersebut merupakan nilai ....
   a. rendah hati
   b. mufakat
   c. berjiwa besar
   d. kerja keras

5. Terhadap kepentingan yang lebih besar, seharusnya kita menunjukkan sikap ....
   a. mempertahankan pendapat sendiri
   b. menghargai pendapat teman
   c. rela berkorban
   d. merasa paling benar pendapatnya

6. Tokoh berikut ini pernah menyatakan keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta ....
   a. Sukarno
   b. Muhammad Yamin
   c. Ki Bagushadikusumo
   d. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat
7. *Dokuritsu Junbi Cosakai* merupakan lembaga buatan Dai Nippon. Dalam bahasa kita lembaga tersebut dikenal dengan ....
   a. PPKI
   b. BPUPKI
   c. panitia kecil
   d. panitia sembilan
8. Kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara RI berada di tangan ....
   a. MPR
   b. DPR
   c. DPD
   d. rakyat
9. Badan yang menyelenggarakan Pemilu secara nasional adalah ....
   a. MPR
   b. DPR
   c. KPU
   d. DPD
10. Berikut ini yang termasuk perangkat pemerintahan pusat adalah ....
    a. DPR, MPR, dan DPD
    b. Presiden dan menteri negara
    c. Presiden dan MA
    d. Badan Pemeriksa Keuangan
11. Anggota lembaga negara ini secara otomatis menjadi anggota MPR ....
    a. DPD
    b. BPK
    c. MA
    d. KPU
12. Persamaan nasib yang melandasi berdirinya ASEAN adalah ....
    a. sama-sama negara berkembang
    b. sama-sama sedang membangun
    c. pernah mengalami penjajahan
    d. sedang membangun negeri
13. Pada lambang ASEAN (yang sudah mengalami perubahan) terdapat sepuluh buah untaian batang padi yang melambangkan ....
    a. tanggal pembentukan
    b. tujuan
    c. jumlah negara anggota
    d. dasar pembentukan

14. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan kepada Pembukaan UUD 1945 alenia ....
    a. pertama dan keempat
    b. pertama dan ketiga
    c. kedua dan keempat
    d. kedua dan ketiga
15. Berikut ini termasuk negara yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN yakni ....
    a. Brunai Darussalam
    b. Thailand
    c. India
    d. Vietnam
16. Kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam bidang olahraga terwujud dalam ....
    a. ASEAN GAMES
    b. SEAGAMES
    c. Olympiade
    d. AFTA
17. Forum yang di dalamnya berkumpul para kepala negara anggota ASEAN adalah ....
    a. KTT ASEAN
    b. AFTA
    c. APEC
    d. sidang kepala negara ASEAN
18. Anggota MK (Mahkamah Konstitusi) terdiri atas … orang.
    a. 6
    b. 7
    c. 8
    d. 9
19. Anggota DPD setiap daerah jumlahnya sama, yaitu ... orang.
    a. 4
    b. 5
    c. 6
    d. 7
20. Lembaga negara yang bertugas mengawasi para hakim adalah ....
    a. MA
    b. MK
    c. KY
    d. DPR

21. Untuk menunjukkan nilai kerja keras sebagai seorang pelajar adalah ....
   a. bercita-cita setinggi mungkin
   b. mematuhi nasihat guru
   c. belajar dengan giat dan rajin
   d. menjadi siswa berprestasi
22. Sikap bertanggung jawab pada diri seorang siswa di sekolah dapat diwujudkan melalui ....
   a. selalu belajar dengan tekun
   b. taat kepada semua tata tertib sekolah
   c. belajar rajin ketika menghadapi ulangan
   d. membantu teman mengerjakan PR
23. Berikut ini termasuk dalam pengertian kerja sama multilateral ....
   a. kerja sama dua negara
   b. kerja sama tiga negara
   c. kerja sama negara-negara sekawasan
   d. kerja sama dua negara sekawasan
24. Tahun 1999 terbit undang-undang tentang hubungan luar negeri, yakni ....
   a. UU No 35 Th. 1999
   b. UU No 36 Th. 1999
   c. UU No 37 Th. 1999
   d. UU No 38 Th. 1999
25. Termasuk masalah yang kerap muncul hubungan antara RI-Malaysia saat ini, yaitu ....
   a. ekspor impor
   b. TKI ilegal
   c. pemasaran hasil kekayaan alam
   d. TKI legal

26. Berikut adalah faktor penting yang memengaruhi politik luar negeri, yaitu ....
    a. jumlah penduduk
    b. kepala negara
    c. ekonomi dan militer
    d. kekayaan alam
27. Keputusan menteri dalam melaksanakan politik luar negeri termasuk ....
    a. landasan idiil
    b. landasan konstitusional
    c. landasan operasional
    d. landasan struktural
28. Sarana yang sah yang digunakan dalam melaksanakan politik luar negeri suatu negara adalah ....
    a. diplomatik
    b. bilateral
    c. multilateral
    d. regional
29. Indonesia tidak terpengaruh kepada negara manapun dalam menentukan politik luar negerinya, merupakan pengertian dari sifat ....
    a. aktif
    b. bebas
    c. netral
    d. bebas aktif
30. Sekretariat bersama organisasi ASEAN berkedudukan di ....
    a. Bangkok
    b. Kualalumpur
    c. Manila
    d. Jakarta

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pekerjaan yang sulit dan berat, namun akhirnya terwujud juga karena ....
2. Pilkada dan Pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan ....
3. Lembaga negara artinya ....
4. Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila tetap melaksanakan keputusan hasil musyawarah meskipun tidak sesuai kepentingan-kepentingannya karena mereka memiliki sikap ....

5. Pesta olahraga bangsa-bangsa Asia Tenggara disebut ....
6. Kerja sama antar dua negara dikenal sebagai kerja sama ....
7. Pemilu di tanah air Indonesia diadakan setiap ... sekali.
8. Indonesia tidak berpangku tangan terhadap konflik yang terjadi di dunia internasional, karena politik Indonesia memiliki sifat ....
9. Menteri luar negeri Indonesia yang turut menandatangani pendirian organisasi ASEAN adalah ....
10. ASEAN merupakan kerja sama antar negara yang bersifat ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang kamu ketahui tentang lembaga negara?
2. Jelaskan dua golongan yang saling berbeda pendapat dalam proses perumusan Pancasila pada sidang-sidang Panitia Sembilan!
3. Jelaskan pengertian politik luar negeri bebas dan aktif!
4. Sebutkan negara-negara pelopor pendiri ASEAN!
5. Apa yang kamu ketahui tentang Komisi Yudisial?

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi, (Penyunting), 1989. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, edisi pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan The Asia Foundation.

Djamain, Safril, 1989. *Mengenal Lebih Jauh ASEAN dan Anggota-Anggotanya*, edisi pertama. Klaten: PT Intan Pariwara.

Gill, Ranjit, 1988. *ASEAN* (alih bahasa: Sonya Sondakh), cetakan pertama. Jakarta: PT Gramedia.

Mestoko, Sumarsono, 1985. *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa*, cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Ratnawati, Tri. 2006. *Potret Pemerintahan di Indonesia di Masa Perubahan: Otonomi Daerah Tahun 2000 - 2006*. Yogyakarta-Jakarta : Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.

Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2004*. Terjemahan. Satrio Wahono dkk. Jakarta:Serambi.

Saputra, Lyndon, dkk. 2006. *RPUL: Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap Indonesia dan Dunia*. Tangerang : Scientific Press.

Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 1993. *ASEAN Selayang Pandang ASEAN*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.

Sihbudi, Riza, “Politk Luar Negeri RI Mau Ke Mana?”, dalam *Sinar Harapan* tanggal 12/10 2002.

Widjaja, AW, 1986. *Indonesia, Asia-Afrika, Non-Blok, Politik Bebas Aktif*, cetakan pertama. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Glosarium

Amandemen	:	Usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat
Asas	:	Sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir
Bilateral	:	Antara dua belah pihak
BPUPKI	:	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Damai	:	Aman
Deklarasi	:	Pernyataan ringkas dan jelas
Demokrasi	:	Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
Demos	:	Rakyat
Eksekutif	:	Kekuasaan menjalankan undang-undang
Festival	:	Pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting dan bersejarah
Formal	:	Sesuai dengan peraturan yang sah
Geografis	:	Bersangkutan dengan geografi
Inisiatif	:	Prakarsa
Kabinet	:	Susunan kementerian
Kampanye	:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk massa pemilih dalam pemungutan suara
Kapasitas	:	Daya tampung

Kolonialisme	:	Paham tentang penguasaan oleh suatu negara dengan maksud untuk memperluas negara itu
Konferensi	:	Pertemuan untuk berunding mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama
Konflik	:	Perselisihan
Kooperatif	:	Bersifat kerja sama
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
Kratein	:	Kekuasaan
Legislatif	:	Berwenang membuat undang-undang
Misi	:	Perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus dalam bidang diplomatik
Modern	:	Terbaru
Multilateral	:	Mengikutsertakan lebih dari dua bangsa
Musyawarah	:	Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah
NATO	:	*North Atlantic Treaty Organization*
OKI	:	Organisasi Konferensi Islam
Pancasila	:	Dasar negara Indonesia
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Piagam	:	Surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, tanah, berisi pernyataan dan peneguhan mengenai suatu hal
Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
Politik	:	Mengenai ketatanegaraan

PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Prerogatif	:	Hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan
Regional	:	Bersifat daerah, kedaerahan
Sosial	:	Berkenaan dengan masyarakat
Stabilitas	:	Kemantapan
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
Tradisional	:	Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun
Visi	:	Kemampuan melihat pada inti permasalahan
Wawasan	:	Pandangan
Yudikatif	:	Bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan

ISBN 978-979-068-625-0 (nomor jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-646-5

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009 Tanggal 12 Februari 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 10.400

